

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 60 /PK.KDH/A/2020  
NOMOR : 05 /N.KES.DPRD/2020  
TANGGAL : 5 Oktober 2020

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Sri Purnomo  
Jabatan : Bupati Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Haris Sugiharta  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman
- b. Nama : Arif Kurniawan  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman



c. Nama : H. R. Sukaptana  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

d. Nama : Tri Nugroho  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.



## **DAFTAR ISI**

Hal

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I	PENDAHULUAN	I.1
1.1.	Latar Belakang .....	I.1
1.2.	Tujuan .....	I.2
1.3.	Dasar Hukum Penyusunan PPAS .....	I.2
BAB II	RENCANA PENDAPATAN DAERAH T.A. 2021 .....	II.1
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH T.A. 2021 .....	III.1
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, RINGKASAN BELANJA, DAN PENGELOUARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 .....	IV.1
BAB V	PENUTUP	V.1

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2021.....	II.2
Tabel 3.1.	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional .....	III.1
Tabel 3.2.	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DIY .....	III.1
Tabel 3.3.	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah .....	III.1
Tabel 4.1.	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Barang dan Jasa, Subsidi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021.....	IV.1
Tabel 4.2.	Plafon Anggaran Sementara untuk Pengeluaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 .....	IV.2
Tabel 5.1.	Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 .....	V.1

**KABUPATEN SLEMAN**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penganggaran daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum anggaran, dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian arah dan kebijakan umum anggaran.

PPAS memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah, yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja daerah serta sumber-sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Penyusunan PPAS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah pusat setiap tahun;
3. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan PPAS adalah untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat.

## **C. Dasar hukum penyusunan**

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 3);
- 19) Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan
- 20) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 59/PK.KDH/A/2020 dan 04/N.KES-DPRD/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Pada Tahun 2021, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan keuangan dari daerah provinsi (BKK Danais dan BKK lainnya) dan bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota).

Asumsi penerimaan daerah mempertimbangkan juga adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan atau ancaman yang membahayakan perekonomian nasional yang menyebabkan Pendapatan Transfer ke daerah turun; 3) Kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, maka arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
- 3) Pendayagunaan aset daerah.
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
- 5) Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan zaman dan mempermudah investasi.

Pada akhir tahun 2019, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga merubah struktur anggaran untuk proyeksi tahun 2021 sebagaimana pada tabel 2.1. berikut ini:

**Tabel 2.1  
Rencana Penerimaan Daerah  
Tahun Anggaran 2021**

<b>NO. URUT</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PROYEKSI TAHUN 2021</b>	<b>PROYEKSI TAHUN 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.693.989.185.027</b>	<b>3.399.760.003.925,56</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>703.857.044.900</b>	<b>753.181.985.780,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	439.640.000.000	487.768.920.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	42.762.502.900	45.248.523.780,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.309.400.000	25.309.400.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	196.145.142.000	194.855.142.000,00
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.983.478.037.828</b>	<b>2.639.923.915.846,56</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.532.784.261.425</b>	<b>1.785.168.367.133,50</b>
I	Dana Perimbangan:	1.385.242.516.425	1.606.678.393.133,50
	1. Dana Transfer Umum	1.002.467.303.000	1.000.424.368.000,00
	a. Dana Bagi Hasil	45.865.307.000	53.293.679.000,00
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	956.601.996.000	947.130.689.000,00
	2. Dana Transfer Khusus	382.775.213.425	606.254.025.133,50
	a. DAK Fisik	64.676.904.000	225.916.356.358,60
	b. DAK Non Fisik	318.098.309.425	380.337.668.774,90
II	Dana Insentif Daerah	36.985.385.000	73.459.098.000,00
III	Dana Otonomi Khusus	-	-
IV	Dana Keistimewaan	-	-
V	Dana Desa	110.556.360.000	105.030.876.000,00

<b>NO. URUT</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PROYEKSI TAHUN 2021</b>	<b>PROYEKSI TAHUN 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>450.693.776.403</b>	<b>854.755.548.713,06</b>
I	Pendapatan Bagi Hasil	199.084.687.853	199.084.687.853,06
II	Bantuan Keuangan	251.609.088.550	655.670.860.860,00
	1. Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi	251.609.088.550	655.670.860.860,00
	a. BKK Danais	247.095.088.550	651.156.860.860,00
	b. BKK Lainnya	4.514.000.000	4.514.000.000,00
	2. Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota	-	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>6.654.102.299</b>	<b>6.654.102.299,00</b>
I	Hibah	6.654.102.299	6.654.102.299,00
II	Dana Darurat; dan/atau	-	-
III	Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>2.693.989.185.027</b>	<b>3.399.760.003.925,56</b>
<b>3</b>	<b>Pembayaran Daerah</b>		
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembayaran Daerah</b>	<b>155.411.025.306</b>	<b>146.000.000.000,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	155.411.025.306	146.000.000.000,00
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
3.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembayaran Daerah</b>	<b>155.411.025.306</b>	<b>146.000.000.000,00</b>



## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

- 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional  
(Tertuang pada Tabel 3.1)**
  
- 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DIY  
(Tertuang pada Tabel 3.2)**
  
- 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah  
(Tertuang pada Tabel 3.3)**
  
- 3.4 Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja  
(Tertuang pada Tabel 3.4 dalam BUKU LAMPIRAN I PPAS APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2021)**



## **Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja		
			DINAS TENAGA KERJA		
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
			Ketersediaan bahan pengambil kebijakan urusan ketenagakerjaan		
			DINAS TENAGA KERJA		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan		
			DINAS TENAGA KERJA		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			---		
			DINAS TENAGA KERJA		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani		
			DINAS TENAGA KERJA		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			---		
			DINAS TENAGA KERJA		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif		
			DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah; Peningkatan Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI) aktif; Peningkatan jumlah KWT pengelola Pemanfaatan pekarangan		
			DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN		
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin		
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			---		
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase koperasi aktif		
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase KSP/USP koperasi sehat		
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase pengelola koperasi yang bersertifikasi		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Jumlah volume usaha koperasi		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Jumlah Wirausaha baru		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Jumlah UMKM Naik Kelas		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Ketersediaan informasi investasi; Persentase investor yang terfasilitasi kemudahan berusaha melalui izin prinsip dan izin lokasi; Regulasi perizinan yang dievaluasi untuk mendukung kemudahan berusaha		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			---		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Investor baru yang menanamkan modalnya; Persentase jumlah pemohon izin		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
			Persentase aduan yang ditindaklanjuti; Persentase pelaku usaha sektor pertanian, pariwisata, dan kesehatan yang memiliki izin secara efektif; Rasio rumah berIMB	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
			Persentase investor yang terfasilitasi kemudahan berusahaanya melalui izin pemanfaatan ruang; Persentase pelaku usaha sektor perdagangan dan perindustrian yang memiliki izin secara efektif; Prosentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
			Persentase peningkatan Produksi ikan konsumsi	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
			Peningkatan kapasitas destinasi wisata	DINAS PARIWISATA	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
			Cakupan promosi pariwisata	DINAS PARIWISATA	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
			Jumlah ruang kreatif di destinasi	DINAS PARIWISATA	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Cakupan kelompok pelaku wisata yang dibina ; Cakupan kelompok pelaku wisata yang dibina		
			DINAS PARIWISATA		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan; Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura; Persentase peningkatan produksi tanaman pangan; Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan		
			DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Peningkatan jumlah kelompok tani hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat ; Peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat ; Prosentase peningkatan sarana pertanian (penyuluhan) di BP4 dalam melaksanakan tugas sebagai BPP sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI No. 03/KPTS/SM.200/I/05/2019		
			DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak		
			DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
			Peningkatan kelas kemampuan kelembagaan petani ; Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian sesuai tugas dan fungsinya; Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan		
			DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN		
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
			---		
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
		Jumlah pasar kabupaten dalam kondisi aman; Jumlah pasar kondisi baik yang dimiliki Kabupaten; Jumlah pedagang pasar terbina; Persentase pedagang pasar yang patuh			
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
		---			
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
		Persentase pedagang pemilik UTTP yang bertanda tera sah			
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
		Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan bidang perindustrian			
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
		Persentase calon transmigran yang berangkat			
		DINAS TENAGA KERJA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja			
		KAPANEWON NGAGLIK			
		KAPANEWON TURI			

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan				
1	2	3	4	5	6				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
		Percentase layanan perizinan selesai tepat waktu; Percentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Desa yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Musrenbang kecamatan							
		KAPANEWON NGAGLIK							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
		Percentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi							
		KAPANEWON MINGGIR							
		KAPANEWON TURI							
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
		Percentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan							
		KAPANEWON NGAGLIK							
<b>2</b>	<b>Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan</b>								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
		Percentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif							
		DINAS SOSIAL							
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
		Percentase Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial; Percentase pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan; Percentase PMKS yang ditangani							
		DINAS SOSIAL							
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
		Percentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan							

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			DINAS SOSIAL		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu; Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu		
			KAPANEWON NGAGLIK		
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja		
			DINAS PENDIDIKAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase sarpras satuan pendidikan dalam kondisi baik; Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaranya sesuai standar; Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A; Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A; Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A		
			DINAS PENDIDIKAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			---		
			DINAS PENDIDIKAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase satuan pendidikan pendidikan non formal menerapkan kurikulum muatan lokal sesuai standar ; Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal sesuai standar		
			DINAS PENDIDIKAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			---		
			DINAS PENDIDIKAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja		
			DINAS KESEHATAN		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Cakupan penanganan Acute Flaccid Paralysis (AFP) per 100 ribu penduduk usia < 15 tahun; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan; Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Persentase kalibrasi alat kesehatan Puskesmas; Presentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart (>60%)		
			DINAS KESEHATAN		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			---		
			DINAS KESEHATAN		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
			Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin; Persentase tenaga kesehatan yang sesuai standart		
			DINAS KESEHATAN		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
			Persentase sediaan obat, alkes dan makanan sesuai dengan standar; Persentase toko sarana prasarana kesehatan yang berizin		
			DINAS KESEHATAN		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
			Persentase rumah tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			DINAS KESEHATAN		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja		
			KAPANEWON TURI		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi		
			KAPANEWON TEMPEL		
<b>4</b>	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		
			Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi; Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan; Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW lain; Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan; Jumlah pemenuhan layanan sarana dan prasarana; Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi; Jumlah taman budaya di Kabupaten; Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing		
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
			DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
			DINAS PARIWISATA		
<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b>				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja		
			DINAS PENDIDIKAN		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan		
1	2	3	4	5	6		
			Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) aman; Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak				
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik				
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Percentase bangunan yang telah memiliki IMB ( atau Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan); Percentase kondisi gedung pemerintah baik				
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Meningkatnya kualitas kawasan dan lingkungan berimbang				
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Percentase jalan Kabupaten kondisi mantap				
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Percentase perbaikan rumah akibat bencana				
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah pengelola sampah mandiri; Jumlah TPS3R; Penanganan Sampah; Pengurangan Sampah		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
		---			
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja		
			DINAS PERHUBUNGAN		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase Ketersediaan SarPras Perhubungan; Level Keselamatan Transportasi; Tingkat Pelayanan Lalulintas dan Angkutan Jalan		
			DINAS PERHUBUNGAN		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		---			
			DINAS PERHUBUNGAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja		
			SEKRETARIAT DPRD		
<b>6</b>	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</b>				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Panjang Saluran Irigasi kewenangan kabupaten yang dibangun (atau persentase panjang saluran Irigasi kewenangan kabupaten yang dibangun terhadap total panjang saluran Irigasi yang wajib di bangun), Panjang Saluran Irigasi kewenangan kabupaten yang direhabilitasi, dioperasi dan dipelihara (atau persentase panjang saluran Irigasi kewenangan kabupaten yang direhabilitasi, dioperasi dan dipelihara terhadap total panjang saluran Irigasi yang wajib di direhabilitasi, dioperasi dan dipelihara)		
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum		
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Jumlah pengelola sampah mandiri; Jumlah TPS3R; Pengurangan Sampah; Penanganan Sampah		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
			Persentase perbaikan rumah akibat bencana		
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa konstruksi		
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten		
			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Percentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Percentase kawasan kumuh kewenangan Kabupaten yang tertangani	
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Percentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman Umum baik	
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Percentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; Percentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Percentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
				Percentase konflik pertanahan yang tertangani	
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
				Percentase redistribusi tanah; Percentase ganti rugi tanah terselesaikan	
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Percentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja	

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
			Ketersediaan Dokumen untuk Perencanaan Bidang LH		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
		---			
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
			Jumlah Usaha Kegiatan yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
			Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga yang mendapatkan pelatihan/penyuluhan/fasilitasi dalam pengelolaan lingkungan		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
			Capaian Penghargaan di Bidang LH		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
			Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan		
1	2	3	4	5	6		
			Jumlah pengelola sampah mandiri; Jumlah TPS3R; Penanganan Sampah; Pengurangan Sampah				
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan				
			KAPANEWON PRAMBANAN				
<b>7</b>	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</b>						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja				
			DINAS PENDIDIKAN				
			DINAS KESEHATAN				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Cakupan penanganan Acute Flaccid Paralysis (AFP) per 100 ribu penduduk usia < 15 tahun; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan; Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Persentase kalibrasi alat kesehatan Puskesmas; Presentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart (>60%)				
			DINAS KESEHATAN				
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Persentase sediaan obat, alkes dan makanan sesuai dengan standar; Persentase toko sarana prasarana kesehatan yang berizin				
			DINAS KESEHATAN				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja				
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
			DINAS SOSIAL		
			DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
			Percentase Lembaga PUG yang aktif		
			DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
			Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan / pendampingan perlindungan perempuan		
			DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
			Meningkatnya jumlah kelompok Desa Prima dan Industri Rumahan; Percentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		
			DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
			Cakupan ketersediaan data gender dan anak		
			DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase pemenuhan hak anak		
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase pemenuhan hak perlindungan khusus anak		
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja		
			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Cakupan dokumen pendaftaran penduduk		
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja		
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif; Persentase peningkatan kualitas pengelolaan PNPM mandiri perdesaan pasca program; Persentase peningkatan kualitas pengelolaan pasar desa		
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan		
1	2	3	4	5	6		
			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
			Prevalensi Peserta KB Aktif				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
			Indeks Ketahanan Keluarga Kabupaten				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
			Persentase aduan masyarakat terlayani				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
			---				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi; persentase layanan yang sudah berbasis digital; Persentase perangkat daerah tersambung jaringan komputer		
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			---		
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja		
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda yang aktif; Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang bisa mandiri pasca pelatihan		
			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase atlet pelajar yang meraih medali ditingkat provinsi		
			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja		
			DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
				Persentase minat baca masyarakat; Persentase perpustakaan milik Kabupaten yang memenuhi standar	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			---		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
				Persentase koleksi dan naskah kuno yang dikelola kurator	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
				Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-arsip terintegrasi; Persentase SKPD yang menerapkan tertib arsip dengan kategori baik.; Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kearsipan	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			---		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
				Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Percentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja			
			DINAS PARIWISATA		
			DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN		
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			SEKRETARIAT DAERAH		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		Nilai EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah); Percentase kerjasama yang aktif; Percentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat; persentase Raperda yang disepakati dengan DPRD			
			SEKRETARIAT DAERAH		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
		Percentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan; Percentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian; persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik			
			SEKRETARIAT DAERAH		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
		Percentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional ; Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada OPD Pemerintah Kabupaten Sleman			
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Percentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja			
			SEKRETARIAT DPRD		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
		Indeks Kepuasan DPRD atas layanan kehumasan; Persentase capaian kinerja DPRD			
		SEKRETARIAT DPRD			
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		Persentase Tingkat Keselarasan Sasaran Pembangunan Tahunan dan Sasaran Pembangunan 5 Tahunan; Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; Persentase realisasi capaian indikator tujuan, sasaran, program dibawah koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah			
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		---			
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja			
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		persentase ketepatan waktu dan keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah; persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran ; persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD			
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
		Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Level A			
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Percentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja			
		BANDAR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
		Pengelolaan Data dan Informasi ASN			
		BANDAR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
		persentase pengembangan kompetensi ASN			
		BANDAR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Percentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja			
		INSPEKTORAT			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
		Percentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti; Percentase hasil pemeriksaan yang ditindaklajuti; Percentase OPD dengan nilai LKjIP A			
		INSPEKTORAT			
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
		Jumlah OPD yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) ; Tersedianya dokumen program pengawasan tepat waktu			
		INSPEKTORAT			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan		
1	2	3	4	5	6		
			Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Percentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja				
			KAPANEWON GAMPING				
			KAPANEWON GODEAN				
			KAPANEWON MOYUDAN				
			KAPANEWON MINGGIR				
			KAPANEWON SEYEGAN				
			KAPANEWON MLATI				
			KAPANEWON DEPOK				
			KAPANEWON BERBAH				
			KAPANEWON PRAMBANAN				
			KAPANEWON KALASAN				
			KAPANEWON NGEMPLAK				
			KAPANEWON SLEMAN				
			KAPANEWON TEMPEL				
			KAPANEWON TURI				
			KAPANEWON PAKEM				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Percentase layanan perizinan selesai tepat waktu; Percentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Desa yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Musrenbang kecamatan				
			KAPANEWON GAMPING				

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			KAPANEWON GODEAN		
			KAPANEWON MINGGIR		
			KAPANEWON SEYEGAN		
			KAPANEWON MLATI		
			KAPANEWON KALASAN		
			KAPANEWON NGEMPLAK		
			KAPANEWON NGAGLIK		
			KAPANEWON SLEMAN		
			KAPANEWON TEMPEL		
			KAPANEWON TURI		
			KAPANEWON PAKEM		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi			
			KAPANEWON GAMPING		
			KAPANEWON GODEAN		
			KAPANEWON KALASAN		
			KAPANEWON NGEMPLAK		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan			
			KAPANEWON GAMPING		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			KAPANEWON GODEAN		
			KAPANEWON SEYEGAN		
			KAPANEWON MLATI		
			KAPANEWON TEMPEL		
			KAPANEWON PAKEM		
			KAPANEWON CANGKRINGAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
		Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti			
			KAPANEWON GAMPING		
			KAPANEWON GODEAN		
			KAPANEWON MLATI		
			KAPANEWON PRAMBANAN		
			KAPANEWON TEMPEL		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
		Persentase desa melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu; Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu			
			KAPANEWON GAMPING		
			KAPANEWON GODEAN		
			KAPANEWON MLATI		
			KAPANEWON BERBAH		
		Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu ; Persentase desa melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu			

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KAPANEWON PRAMBANAN	
				Persentase desa melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu; Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu	
				KAPANEWON TEMPEL	
				Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu ; Persentase desa melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu	
				KAPANEWON CANGKRINGAN	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Persentase Desa Rintisan Berkarakter Pancasila	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial daan budaya	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

**Tabel 3.2**  
**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Ketersediaan bahan pengambil kebijakan urusan ketenagakerjaan	1	DISNAKER	23.103.000
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan	0,25	DISNAKER , UPT BLK	2.669.823.000
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan pencari kerja	0,2	DISNAKER	917.348.000
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani	1	DISNAKER	450.251.000
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif	0,3	DINAS PERPARI	51.255.000
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan jumlah KWT pengelola Pemanfaatan pekarangan; Peningkatan Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI) aktif; Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah	2 kwt; 1 TTI; 15 ton	DINAS PERPARI	944.146.750
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan/waspada pangan	3 lokasi	DINAS PERPARI	97.512.000
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan	3 buah	DINAS PERPARI	120.985.000
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin	64.5 %	DINKOPUKM	29.400.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	82.9 %	DINKOPUKM	33.520.500
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi sehat	13.7 %	DINKOPUKM	119.070.500
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikasi	31.5 %	DINKOPUKM	743.647.655
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah volume usaha koperasi	959206800000	DINKOPUKM	771.491.600
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Wirausaha baru	75 wirausaha	DINKOPUKM	1.512.997.994
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM Naik Kelas	20 UMKM	DINKOPUKM	510.395.300
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang terfasilitasi kemudahan berusaha melalui izin prinsip dan izin lokasi; Regulasi perizinan yang dievaluasi untuk mendukung kemudahan berusaha; Ketersediaan informasi investasi	20 %; 6 Regulasi; 90 %	DPMPPPT	434.931.250
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pemohon izin; Investor baru yang menanamkan modalnya	80 %; 2 Investor	DPMPPPT	517.260.000
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha sektor pertanian, pariwisata, dan kesehatan yang memiliki izin secara efektif; Rasio rumah berIMB ; Persentase aduan yang ditindaklanjuti	95 %; 44 %; 25 %	DPMPPPT	941.074.600

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang terfasilitasi kemudahan berusahaanya melalui izin pemanfaatan ruang; Prosentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN; Persentase pelaku usaha sektor perdagangan dan perindustrian yang memiliki izin secara efektif	60 %; 0.15 %; 95 %	DPMPPPT	611.947.800	
Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah layanan perizinan yang telah terintegrasi secara elektronik	0,9	DPMPPPT	125.271.400	
Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan ragam spesies ikan di perairan umum	0,03	DINAS PERPARI	161.565.750	
Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi ikan konsumsi	0,03	DINAS PERPARI , UPT PBP3	1.642.551.935	
Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi	2 produk	DINAS PERPARI , UPT PBP3	130.487.542	
Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan kapasitas destinasi wisata	2 paket	DISPAR	3.419.015.250	
Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan promosi pariwisata	1	DISPAR	2.089.154.250	
Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah ruang kreatif di destinasi	1 lokasi	DISPAR	2.625.000	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan kelompok pelaku wisata yang dibina ; Cakupan kelompok pelaku wisata yang dibina	30 %; 5 %	DISPAR	2.640.823.100
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Percentase peningkatan produksi tanaman pangan; Percentase peningkatan produksi tanaman hortikultura; Percentase peningkatan produksi tanaman perkebunan; Percentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan	0.5 %; 1 %; 0.5 %; 0.12 %	DINAS PERPARI	3.607.254.895
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan jumlah kelompok tani hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat ; Peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat ; Prosentase peningkatan sarana pertanian (penyuluhan) di BP4 dalam melaksanakan tugas sebagai BPP sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI No. 03/KPTS/SM.200/I/05/2019	5 kelompok; 5 kelompok; 12.5 %	DINAS PERPARI	3.572.051.593
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Percentase penanganan pelayanan kesehatan ternak	0,7	DINAS PERPARI , UPT Pasar Hewan , UPT Kesehatan Hewan	1.010.343.375
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Percentase penurunan serangan hama penyakit tanaman pangan; Percentase penurunan serangan hama penyakit tanaman pangan	5 %; 5 %	DINAS PERPARI	537.414.900

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya; Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan ; Peningkatan kelas kemampuan kelembagaan petani	2 %; 2 %; 24 kelompok	DINAS PERPARI , UPT BP4 I , UPT BP4 II , UPT BP4 III , UPT BP4 IV , UPT BP4 V , UPT BP4 VI , UPT BP4 VII , UPT BP4 VIII , UPT Agribisnis	2.030.487.000
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pedagang pasar berijin; Persentase pelaku usaha perdagangan yang patuh; Jumlah temuan produk tidak layak konsumsi	55 %; 20 %; 50 Produk	DISPERINDAG	318.720.184
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar kondisi baik yang dimiliki Kabupaten; Jumlah pasar kabupaten dalam kondisi aman; Jumlah pedagang pasar terbina; Persentase pedagang pasar yang patuh	25 Pasar; 20 Pasar; 105 Pedaganag; 30 %	DISPERINDAG , UPT Pasar I , UPT Pasar II , UPT Pasar III , UPT Pasar IV , UPT Pasar V	8.011.384.842
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah	0,8	DISPERINDAG	239.750.000
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor	25 Pelaku	DISPERINDAG	610.833.500
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten; Jumlah Omzet UKM	10 %; 1000000000 Rupiah	DISPERINDAG	2.804.909.924
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah pelaku usaha yang menerapkan teknologi industri; Jumlah pelaku usaha yang menerapkan manajemen usaha industri	28 IKM; 50 IKM	DISPERINDAG	1.203.424.404
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah usaha industri yang layak untuk direkomendasikan mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI); Jumlah pelaku usaha industri yang menerapkan standarisasi produk	25 IKM; 20 IKM	DISPERINDAG	164.100.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan bahan pengambilankebijakan bidang perindustrian	1	DISPERINDAG	230.536.000
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigran yang berangkat	0,3	DISNAKER	1.001.940.651
2	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	0,67	DINSOS	1.724.892.542
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan; Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial	100 %; 100 %; 80 %	DINSOS	22.946.158.131
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	1	DINSOS	769.919.586
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah kampung siaga yang terbentuk	0,16	DINSOS	255.584.024
	Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pengelolaan tetenger	1	DINSOS	39.304.965
3	Pembangunan Manusia Unggul	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal sesuai standar ; Persentase satuan pendidikan pendidikan non formal menerapkan kurikulum muatan lokal sesuai standar	50 %; 30 %	DISDIK	215.512.500
	Pembangunan Manusia Unggul	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Kepuasan atas layanan fasilitasi perolehan sertifikat pendidik dan tunjangan profesi guru	0,8	DISDIK	1.416.401.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Manusia Unggul	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A; Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A; Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A; Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggarannya sesuai standar; Persentase sarpras satuan pendidikan dalam kondisi baik	20 %; 80 %; 65 %; 50 %; 80 %	DISDIK ,UPT SKB	346.870.460.440
4	Pembangunan Manusia Unggul	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kalibrasi alat kesehatan Puskesmas; Presentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart (>60%); Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Cakupan penanganan Acute Flaccid Paralysis (AFP) per 100 ribu penduduk usia < 15 tahun; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan	80 %; 75 %; 100 %; 89 %; 3 %; 100 %	DINKES ,RSUD SLEMAN ,RSUD PRAMBANAN ,UPTPUS Gamping I ,UPTPUS Gamping II ,UPTPUS Godean I ,UPTPUS Godean II ,UPTPUS Moyudan ,UPTPUS Minggir ,UPTPUS Seyegan ,UPTPUS Mlati I ,UPTPUS Mlati II ,UPTPUS Depok I ,UPTPUS Depok II ,UPTPUS Depok III ,UPTPUS Berbah ,UPTPUS Prambanan ,UPTPUS Kalasan ,UPTPUS Ngemplak I ,UPTPUS Ngemplak II ,UPTPUS Ngaglik I ,UPTPUS Ngaglik II ,UPTPUS Sleman ,UPTPUS Tempel I ,UPTPUS Tempel II ,UPTPUS Turi ,UPTPUS Pakem ,UPTPUS Cangkringan ,UPT Lapkes ,UPT POAK	351.247.721.706
	Pembangunan Manusia Unggul	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang sesuai standart; Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin	80 %; 85 %	DINKES ,UPTPUS Ngemplak II	326.865.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Manusia Unggul	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan obat, alkes dan makanan sesuai dengan standar; Persentase toko sarana prasarana kesehatan yang berizin	50 %; 15 %	DINKES ,UPTPUS Gamping I ,UPTPUS Gamping II ,UPTPUS Godean I ,UPTPUS Godean II ,UPTPUS Moyudan ,UPTPUS Minggir ,UPTPUS Mlati I ,UPTPUS Depok II ,UPTPUS Depok III ,UPTPUS Berbah ,UPTPUS Ngaglik I ,UPTPUS Ngaglik II ,UPTPUS Sleman ,UPTPUS Tempel I ,UPTPUS Tempel II ,UPTPUS Pakem ,UPTPUS Cangkringan ,UPT Lapkes	1.334.847.130
	Pembangunan Manusia Unggul	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	57.5%	DINKES ,UPTPUS Gamping I ,UPTPUS Gamping II ,UPTPUS Godean I ,UPTPUS Godean II ,UPTPUS Moyudan ,UPTPUS Minggir ,UPTPUS Seyegan ,UPTPUS Mlati I ,UPTPUS Mlati II ,UPTPUS Depok I ,UPTPUS Depok II ,UPTPUS Depok III ,UPTPUS Berbah ,UPTPUS Prambanan ,UPTPUS Kalasan ,UPTPUS Ngemplak I ,UPTPUS Ngemplak II ,UPTPUS Ngaglik I ,UPTPUS Ngaglik II ,UPTPUS Sleman ,UPTPUS Tempel I ,UPTPUS Tempel II ,UPTPUS Turi ,UPTPUS Pakem ,UPTPUS Cangkringan	5.762.404.375
5	Pembangunan Manusia Unggul	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi	0,7	UPT Museum Merapi	1.597.410.003

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Manusia Unggul	PROGRAM KEISTIMEWAAN KEBUDAYAAN KEKHUSUSAN YOGYAKARTA	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi; Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan; Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW lain; Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan; Jumlah pemenuhan layanan sarana dan prasarana; Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi;	3 Sumber Sejarah; 3 Karya; 0,02; 2,5%; 2 Layanan; 2 event seni	DPUPKP ,DISBUD ,DISPAR ,DINAS PERPARI ,DISPERINDAG	16.818.867.000
	Pembangunan Manusia Unggul	Penyusunan Kebijakan dan Pengordinasian Pelayanan Administratif Kaistimewan	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional; Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada OPD Pemerintah Kabupaten Sleman	80%; 50%	DINAS PMD ,SETDA	790.000.000
6	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik	64.59 %	DPUPKP	11.604.546.000
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang telah memiliki IMB ( atau Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan); Persentase kondisi gedung pemerintah baik	40 %; 82%	DPUPKP ,DISPERTARU	6.174.509.000
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya kualitas kawasan dan lingkungan berimbang	50%	DPUPKP ,DISPERTARU	1.343.907.750
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan Kabupaten kondisi mantap	0,62	DPUPKP ,UPT PLPA	139.504.000.726
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas	0.63 %	DISHUB ,UPT PKB ,UPT Parkir	6.158.256.850
7	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0,5	DPUPKP ,UPT PSDA Barat ,UPT PSDA Tengah ,UPT PSDA Timur	45.521.176.609

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum	1	DPUPKP	24.752.181.500
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak; Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) aman	96.36 %; 17.72%	DLH	10.351.862.750
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase perbaikan rumah akibat bencana	0,3	DPUPKP	977.725.000
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0,67	DPUPKP	902.110.000
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	0	DISPERTARU	1.297.912.884
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perbaikan rumah akibat bencana	50%	DPUPKP , UPT RSSS	1.416.205.000
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	100%	DPUPKP	26.307.787.000
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman Umum baik	60%	DPUPKP , UPT TPU	4.472.065.600

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani; cakupan penegakan perda; persentase anggota linmas yang bersertifikasi	100%; 100%; 25.6%	SATPOLPP	2.459.742.995
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persente kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	0,95	SATPOLPP	815.500.220
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan yang tertangani	0,5	DISPERTARU	112.337.478
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah; Persentase ganti rugi tanah terselesaikan	50 %; 50%	DISPERTARU	89.500.500
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin membuka tanah terselesaikan	0,9	DISPERTARU	176.705.218

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Luas (cakupan) bidang tanah bersertifikat; Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN; Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara; Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten; Persentase desa yang sudah mempunyai Perdes pemanfaatan tanah desa; Persentase desa yang sudah mempunyai Perdes pemanfaatan tanah desa; Persentase pengajuan serat kekancingan yang ditindaklanjuti	80 %; 0 Bidang; 0 Dokumen; 0 Bidang; 0 %; 0 %; 0 %	DISPERTARU	698.489.718	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan Dokumen untuk Perencanaan Bidang LH	2 Dokumen	DLH	22.470.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan data kualitas lingkungan	8 Dokumen	DLH	541.682.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian Luas RTH; Capaian Luas penghijauan di lahan kritis	30.06 %; 0.0112%	DLH	14.025.880.700	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Usaha Kegiatan yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	80 Usaha	DLH	12.250.000	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan/atau izin PPLH; Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	654 Usaha/Kegiatan; 80 %	DLH	431.291.000
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga yang mendapatkan pelatihan/penyuluhan/fasilitasi dalam pengelolaan lingkungan	34 Kelompok	DLH	544.261.000
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	capaian penghargaan di bidang Lingkungan hidup	3 penghargaan	DLH	178.030.000
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	91.67 %	DLH	25.000.000
	Penguatan Infrastruktur Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah pengelola sampah mandiri; Jumlah TPS3R; Pengurangan Sampah; Penanganan Sampah	227 Kelompok; 24 Unit; 20 %; 34 %	DLH , UPT Persampahan	13.339.370.400

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
8	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja	100 %; 20 %	DISDIK , UPT PP Gamping , UPT PP Godean , UPT PP Moyudan , UPT PP Minggir , UPT PP Seyegan , UPT PP Mlati , UPT PP Depok , UPT PP Berbah , UPT PP Prambanan , UPT PP Kalasan , UPT PP Ngemplak , UPT PP Ngaglik , UPT PP Sleman , UPT PP Tempel , UPT PP Turi , UPT PP Pakem , UPT PP Cangkringan , UPT SKB , TKN 1 , TKN 2 , TKN 3 , TK Pembina , TK Model	1.192.588.503.878
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga PUG yang aktif	1	DINAS P3AP2KB	229.638.000
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan / pendampingan perlindungan perempuan	51 Lembaga	DINAS P3AP2KB	77.183.098
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya jumlah kelompok Desa Prima dan Industri Rumahan; Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	41 Lembaga; 100 %	DINAS P3AP2KB , UPT PPA	475.954.700
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan data gender dan anak	1	DINAS P3AP2KB	129.495.800
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	0,86	DINAS P3AP2KB	213.584.000
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pemenuhan hak perlindungan khusus anak	53.33 %	DINAS P3AP2KB	91.066.150

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan dokumen pendaftaran penduduk	1	DISDUKCAPIL	1.547.881.750
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan dokumen akta kelahiran dan akta kematian; Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; Cakupan dokumen akta pengakuan anak dan pengesahan anak	100 %; 100 %; 100 %	DISDUKCAPIL	354.802.913
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan ketersediaan data SIAK; Cakupan dokumen akta perkawinan dan akta perceraian	100 %; 100 %	DISDUKCAPIL	644.197.681
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	1	DISDUKCAPIL	80.373.865
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa Mandiri; Persentase Jumlah Desa Maju; Persentase Jumlah Desa Berkembang; Persentase Jumlah BUMDES dengan katagori berkembang; Persentase Jumlah BUMDES dengan katagori maju; Persentase Desa yang melaksanakan perencanaan dan pelaporan , pengelolaan keuangan , pengelolaan Aset yang tepat waktu; Cakupan pemerintahan desa yang tertb administrasi	20 %; 57 %; 23 %; 9 %; 5 %; 60 %; 60 %	DINAS PMK, SETDA	8.793.939.050

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan pasar desa ; Persentase peningkatan kualitas pengelolaan PNPM mandiri perdesaan pasca program; Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	12 %; 60 %; 60 %	DINAS PMK, SETDA	2.679.679.550
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	0,02	DINAS P3AP2KB	70.691.938
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi Peserta KB Aktif	76.7 %	DINAS P3AP2KB	4.493.961.602
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Ketahanan Keluarga Kabupaten	0,6	DINAS P3AP2KB	1.138.532.580
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase aduan masyarakat terlayani	0,9	DISKOMINFO	931.059.200
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase layanan yang sudah berbasis digital; Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi; Persentase perangkat daerah tersambung jaringan komputer	90 %; 50 %; 100 %	DISKOMINFO	4.647.803.725
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda yang aktif; Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang bisa mandiri pasca pelatihan	28 Organisasi/Kelompok; 10 %	DISPORA	1.465.180.635
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali yang diperoleh melalui event POPDA	0	DISPORA	5.540.420.500

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan kapasitas pembina pramuka	0	DISPORA	580.214.887
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen statistik daerah tepat waktu	0,9	DISKOMINFO	193.196.500
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah daerah	0,9	DISKOMINFO	164.918.000
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan milik Kabupaten yang memenuhi standar (atau sebutkan jika ada penyebutan kategori yang baku); Persentase minat baca masyarakat	4.42%; 10.29%	DINAS PERPUSARSIP	621.289.300
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi dan naskah kuno yang dikelola kurator	1 1	DINAS PERPUSARSIP	625.000
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD yang menerapkan tertib arsip dengan kategori baik.; Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kearsipan; Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-arsip terintegrasi	79 %; 82 %; 52.08 %	DINAS PERPUSARSIP	283.057.000
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	0,1	DINAS PERPUSARSIP	6.274.400

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah); Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat; persentase Raperda yang disepakati dengan DPRD; Persentase kerjasama yang aktif	32.5 nilai; 100 %; 100 %; 100 %	SETDA	8.533.012.800
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian; Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan; persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	100 %; 100 %; 100 %	SETDA	3.008.863.850
	Pembangunan Manusia Unggul	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga; Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja "Baik"; Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan terselesaikan tepat waktu	76.61 %; 90 %; 76.61 %; 100 %	SETDA	41.272.634.224
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan DPRD atas layanan rapat; Indeks Kepuasan DPRD atas layanan keuangan	80 %; 90 %	SETWAN DPRD	48.376.893.299
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase capaian kinerja DPRD; Indeks Kepuasan DPRD atas layanan kehumasan	80 %; 80 %	SETWAN DPRD	49.507.720.400
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tingkat Keselarasan Sasaran Pembangunan Tahunan dan Sasaran Pembangunan 5 Tahunan; Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; Persentase realisasi capaian indikator tujuan, sasaran, program dibawah koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah	100 %; 95 %; 30 %	BAPPEDA	1.819.379.323

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase realisasi capaian indikator tujuan, sasaran, program dibawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan; Persentase realisasi capaian indikator tujuan, sasaran, program dibawah koordinasi bidang perekonomian; Persentase realisasi capaian indikator tujuan, sasaran, program dibawah koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana	0,2	BAPPEDA	899.724.348
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran ; persentase ketepatan waktu dan keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah; persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	100 %; 100 %; 100 %	BKAD , UPT PDPM	263.982.649.538
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Level A	0,7	BKAD , UPT Stadion Maguwo	5.567.009.800
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	0,31	BKAD	17.862.140.400

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase kualifikasi pendidikan ASN	0,003	DISDIK ,DINKES ,SATPOLPP ,DINSOS ,DISNAKER ,DINAS P3AP2KB ,DISPERTARU ,DLH ,DISDUKCAPIL ,DINAS PMD ,DISHUB ,DISKOMINFO ,DINKOPUKM ,DPMPPPT ,DISPORA ,DISBUD ,DINAS PERPUSARSIP ,DISPAR ,DINAS PERPARI ,DISPERINDAG ,SETDA ,GAMPING ,GODEAN ,MOYUDAN ,MINGGIR ,SEYEGAN ,MLATI ,DEPOK ,BERBAH ,PRAMBANAN ,KALASAN ,NGEMPLAK ,NGAGLIK ,SLEMAN ,TEMPEL ,TURI ,PAKEM ,CANGKRINGAN ,SETWAN DPRD ,INSPEKTORAT ,BAPPEDA ,BKAD ,BKPP ,KESBANGPOL ,BPBD ,UPT Korpri	22.042.475.052
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	persentase pengembangan kompetensi ASN	0,95	BKPP	8.635.014.700
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	0.25 %	BAPPEDA	334.218.440
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Indeks Kepuasan terhadap layanan Kantor Penghubung	76.61 %	SETDA	184.950.300
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dengan nilai LKjIP A; Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti; Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	100%; 86%; 100 %	INSPEKTORAT	488.326.500

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Pendukung Prioritas Pembangunan	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tersedianya dokumen program pengawasan tepat waktu; Jumlah OPD yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	100%; 2OPD	INSPEKTORAT	329.708.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musenbang Desa yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Musrenbang kecamatan	10%	GAMPING ,GODEAN ,MOYUDAN ,MINGGIR ,SEYEGAN ,MLATI ,DEPOK ,BERBAH ,PRAMBANAN ,KALASAN ,NGEMPLAK ,NGAGLIK ,SLEMAN ,TEMPEL ,TURI ,PAKEM ,CANGKRINGAN	1.863.433.500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	0,3	GAMPING ,GODEAN ,MOYUDAN ,MINGGIR ,SEYEGAN ,MLATI ,DEPOK ,BERBAH ,PRAMBANAN ,KALASAN ,NGEMPLAK ,NGAGLIK ,SLEMAN ,TEMPEL ,TURI ,PAKEM ,CANGKRINGAN	3.535.478.100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan penegakan perda sesuai kewenangan kecamatan	0,5	GAMPING ,GODEAN ,MOYUDAN ,MINGGIR ,SEYEGAN ,MLATI ,DEPOK ,BERBAH ,PRAMBANAN ,KALASAN ,NGEMPLAK ,NGAGLIK ,SLEMAN ,TEMPEL ,TURI ,PAKEM ,CANGKRINGAN	1.270.735.700	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	0,5	GAMPING ,GODEAN ,MOYUDAN ,MINGGIR ,SEYEGAN ,MLATI ,DEPOK ,BERBAH ,PRAMBANAN ,KALASAN ,NGEMPLAK ,NGAGLIK ,SLEMAN ,TEMPEL ,TURI ,PAKEM ,CANGKRINGAN	1.581.271.000	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu ; Persentase desa melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu	50 %; 50 %	GAMPING ,GODEAN ,MOYUDAN ,MINGGIR ,SEYEGAN ,MLATI ,DEPOK ,BERBAH ,PRAMBANAN ,KALASAN ,NGEMPLAK ,NGAGLIK ,SLEMAN ,TEMPEL ,TURI ,PAKEM ,CANGKRINGAN	1.243.754.000
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Desa Rintisan Berkarakter Pancasila	0,1	KESBANGPOL	497.934.986
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang politik	1	KESBANGPOL	2.247.418.223
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas dan LSM yang aktif	0,6	KESBANGPOL	44.917.090
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial daan budaya	1	KESBANGPOL	428.749.403

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Target	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Percentase Capaian Kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)	0,6	KESBANGPOL	437.765.445
		Penyusunan Kebijakan dan Pengordinasian Pelayanan Administratif Kaistimewan	Percentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional; Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada OPD Pemerintah Kabupaten Sleman	80%; 50%	DINAS PMK, SETDA	790.000.000,00



### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Ekonomi</b>						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja						
				DINAS PARIWISATA		1.681.215.440	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
	persentase ketepatan waktu dan keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah; persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran ; persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD						
				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		1.842.800.000	
	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
	Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing						
				DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN		530.970.000	
	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian						
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						
	Persentase Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif						
				DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN		102.510.000	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
				Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah; Peningkatan Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI) aktif; Peningkatan jumlah KWT pengelola Pemanfaatan pekarangan						
					DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	1.888.293.500				
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
				Penanganan daerah rawan pangan/waspada pangan						
					DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	195.024.000				
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
				Peningkatan Jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan						
					DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	241.970.000				
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
				Persentase peningkatan ragam spesies ikan di perairan umum						
					DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	323.131.500				
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
				Persentase peningkatan Produksi ikan konsumsi						

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN		3.285.103.870	
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
				Peningkatan kapasitas destinasi wisata			
					DINAS PARIWISATA	6.838.030.500	
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
				Cakupan promosi pariwisata			
					DINAS PARIWISATA	4.178.308.500	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
				Jumlah ruang kreatif di destinasi			
					DINAS PARIWISATA	5.250.000	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
				Cakupan kelompok pelaku wisata yang dibina ; Cakupan kelompok pelaku wisata yang dibina			
					DINAS PARIWISATA	5.281.646.200	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
				Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan; Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura; Persentase peningkatan produksi tanaman pangan; Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan			
					DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	7.214.509.790	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				Peningkatan jumlah kelompok tani hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat ; Peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat ; Prosentase peningkatan sarana pertanian (penyuluhan) di BP4 dalam melaksanakan tugas sebagai BPP sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI No. 03/KPTS/SM.200/I/05/2019						
					DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	7.144.103.186				
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
				Persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak						
					DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	1.841.046.750				
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
				Persentase penurunan serangan hama penyakit tanaman pangan						
					DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	1.074.829.800				
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
				Peningkatan kelas kemampuan kelembagaan petani ; Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian sesuai tugas dan fungsinya; Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan						
					DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	4.060.974.000				
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								
				Jumlah temuan produk tidak layak konsumsi; Persentase pedagang pasar berijin; Persentase pelaku usaha perdagangan yang patuh						

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		637.440.368	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
				Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	479.500.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
				Jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.221.667.000	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
				Jumlah Omzet UKM; Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.609.819.848	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
				Jumlah pelaku usaha yang menerapkan manajemen usaha industri; Jumlah pelaku usaha yang menerapkan teknologi industri			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.406.848.808	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							
				Jumlah pelaku usaha industri yang menerapkan standarisasi produk; Jumlah usaha industri yang layak untuk direkomendasikan mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI)			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	328.200.000	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan bidang perindustrian							
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		461.072.000	
Meningkatnya kesempatan kerja							
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							
Ketersediaan bahan pengambil kebijakan urusan ketenagakerjaan							
				DINAS TENAGA KERJA		46.206.000	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan							
				DINAS TENAGA KERJA		5.339.646.000	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
Persentase penempatan pencari kerja							
				DINAS TENAGA KERJA		1.834.696.000	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani							
				DINAS TENAGA KERJA		900.502.000	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
Persentase calon transmigran yang berangkat							
				DINAS TENAGA KERJA		329.446.900	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik							

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket													
1	2	3	4	5	6	7	8													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
<p>Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Percentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja</p> <table> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>DINAS PARIWISATA</td><td></td><td>4.200.261.600</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</td><td></td><td>235.710.000</td><td></td></tr> </table>										DINAS PARIWISATA		4.200.261.600					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		235.710.000	
			DINAS PARIWISATA		4.200.261.600															
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		235.710.000															
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																				
<p>Percentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi</p> <table> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>KAPANEWON NGEMPLAK</td><td></td><td>154.390.000</td><td></td></tr> </table>											KAPANEWON NGEMPLAK		154.390.000							
			KAPANEWON NGEMPLAK		154.390.000															
<p>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</p> <table> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																	
<p>Ketersediaan informasi investasi; Percentase investor yang terfasilitasi kemudahan berusaha melalui izin prinsip dan izin lokasi; Regulasi perizinan yang dievaluasi untuk mendukung kemudahan berusaha</p> <table> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</td><td></td><td>869.862.500</td><td></td></tr> </table>											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		869.862.500							
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		869.862.500															
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																				
<p>Investor baru yang menanamkan modalnya; Percentase jumlah pemohon izin</p> <table> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</td><td></td><td>1.034.520.000</td><td></td></tr> </table>											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1.034.520.000							
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1.034.520.000															
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																				
<p>Percentase aduan yang ditindaklanjuti; Percentase pelaku usaha sektor pertanian, pariwisata, dan kesehatan yang memiliki izin secara efektif; Rasio rumah berIMB</p>																				

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1.882.149.200	
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
				Persentase investor yang terfasilitasi kemudahan berusahaanya melalui izin pemanfaatan ruang; Persentase pelaku usaha sektor perdagangan dan perindustrian yang memiliki izin secara efektif; Prosentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1.223.895.600	
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
				Persentase Jumlah layanan perizinan yang telah terintegrasi secara elektronik			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		250.542.800	
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
				Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi			
				DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN		260.975.084	
				Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
				Jumlah pasar kabupaten dalam kondisi aman; Jumlah pasar kondisi baik yang dimiliki Kabupaten; Jumlah pedagang pasar terbina; Persentase pedagang pasar yang patuh			
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		3.801.634.068	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Kemiskinan</b>						
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	Percentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi						
					KAPANEWON NGEMPLAK	241.828.750	
	Menurunnya kemiskinan						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
	Percentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif						
					DINAS SOSIAL	151.569.916	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
	Percentase Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial; Percentase pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan; Percentase PMKS yang ditangani						
					DINAS SOSIAL	1.587.356.726	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
	Percentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan						
					DINAS SOSIAL	1.407.429.636	
<b>3</b>	<b>Pendidikan</b>						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Percentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja						
					DINAS PENDIDIKAN	822.898.500	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja	DINAS PENDIDIKAN	344.147.800	
Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
				Persentase sarpras satuan pendidikan dalam kondisi baik; Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggarannya sesuai standar; Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A; Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A; Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A	DINAS PENDIDIKAN	241.712.274.090	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							
				Persentase satuan pendidikan pendidikan non formal menerapkan kurikulum muatan lokal sesuai standar ; Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal sesuai standar	DINAS PENDIDIKAN	215.512.500	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
				Indeks Kepuasan atas layanan fasilitasi perolehan sertifikat pendidik dan tunjangan profesi guru	DINAS PENDIDIKAN	1.416.401.000	
<b>4</b>	<b>Kesehatan</b>						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja	DINAS KESEHATAN	275.518.010.400	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Cakupan penanganan Acute Flaccid Paralysis (AFP) per 100 ribu penduduk usia < 15 tahun; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan; Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Persentase kalibrasi alat kesehatan Puskesmas; Presentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart (>60%)	DINAS KESEHATAN	192.433.718.520	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin; Persentase tenaga kesehatan yang sesuai standart	DINAS KESEHATAN	597.630.000	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase sediaan obat, alkes dan makanan sesuai dengan standar; Persentase toko sarana prasarana kesehatan yang berizin	DINAS KESEHATAN	1.038.889.360	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase rumah tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	DINAS KESEHATAN	5.616.919.510	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja	DINAS KESEHATAN	24.807.340.588	
<b>5</b>	<b>Kebudayaan</b>						
		Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya					

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
				Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi; Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan; Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW lain; Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan; Jumlah pemenuhan layanan sarana dan prasarana; Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi; Jumlah taman budaya di Kabupaten; Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing						
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.069.164.000				
					DINAS PARIWISATA	2.400.000.000				
<b>6</b>	<b>Infrastruktur</b>									
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum						
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	908.620.000				
		Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian								
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								
				Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik						
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.926.844.000				

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
Percentase bangunan yang telah memiliki IMB ( atau Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan); Percentase kondisi gedung pemerintah baik							
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.566.643.500	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							
Meningkatnya kualitas kawasan dan lingkungan berimbang							
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.189.080.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
Percentase jalan Kabupaten kondisi mantap							
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	173.691.320.452	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
Percentase Ketersediaan SarPras Perhubungan; Level Keselamatan Transportasi; Tingkat Pelayanan Lalulintas dan Angkutan Jalan							
					DINAS PERHUBUNGAN	1.559.261.000	
Menurunnya kemiskinan							
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket					
1	2	3	4	5	6	7	8					
				Persentase perbaikan rumah akibat bencana								
						DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		5.333.798.400				
7	Lingkungan Hidup											
				Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana								
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
				Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.310.353.280						
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) aman; Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak								
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.703.725.500						
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
				Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten								
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	2.595.825.768						

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							
Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten							
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		450.409.820.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
Persentase kawasan kumuh kewenangan Kabupaten yang tertangani							
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		52.615.574.000	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							
Persentase konflik pertanahan yang tertangani							
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		224.674.956	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSUMUM DAN TANAH ABSENTEE							
Persentase redistribusi tanah; Persentase ganti rugi tanah terselesaikan							
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		179.001.000	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN; Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara; Luas (cakupan) bidang tanah bersertifikat; Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten; Persentase desa yang sudah mempunyai Perdes pemanfaatan tanah desa; Persentase pengajuan serat kekancingan yang ditindaklanjuti						
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	1.396.979.436				
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
				Ketersediaan Dokumen untuk Perencanaan Bidang LH						
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	44.940.000				
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
				Ketersediaan data kualitas lingkungan						
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.083.364.000				
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
				Capaian Luas RTH; Capaian Luas penghijauan di lahan kritis						
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.051.761.400				
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
				Jumlah Usaha Kegiatan yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3						
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24.500.000				

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan/atau izin PPLH; Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan						
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP	862.582.000			
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
				Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga yang mendapatkan pelatihan/penyuluhan/fasilitasi dalam pengelolaan lingkungan						
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.088.522.000			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
				Jumlah pengelola sampah mandiri; Jumlah TPS3R; Penanganan Sampah; Pengurangan Sampah						
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP	25.419.642.570			
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik						
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja						
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP	356.514.000			
						KAPANEWON DEPOK	68.200.000			
				Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian						
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				Panjang Saluran Irigasi kewenangan kabupaten yang dibangun (atau persentase panjang saluran Irigasi kewenangan kabupaten yang dibangun terhadap total panjang saluran Irigasi yang wajib di bangun), Panjang Saluran Irigasi kewenangan kabupaten yang direhabilitasi, dioperasi dan dipelihara (atau persentase panjang saluran Irigasi kewenangan kabupaten yang direhabilitasi, dioperasi dan dipelihara terhadap total panjang saluran Irigasi yang wajib di direhabilitasi, dioperasi dan dipelihara)						
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.363.523.600				
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							
				Persentase perbaikan rumah akibat bencana						
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.955.450.000				
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
				Persentase bangunan yang telah memiliki IMB ( atau Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan); Persentase kondisi gedung pemerintah baik						
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	87.039.450				
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							
				Meningkatnya kualitas kawasan dan lingkungan berimbang						
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	487.815.340				

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa konstruksi							
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1.804.220.000	
	Menurunnya kemiskinan						
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
				Persentase perbaikan rumah akibat bencana			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		2.832.410.000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
				Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman Umum baik			
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		9.789.421.200	
<b>8</b>	<b>Pelayanan Publik</b>						
				Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana			
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
				Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	223.177.750				
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Percentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja							
					DINAS PENDIDIKAN	966.605.600				
					DINAS KESEHATAN	8.418.907.600				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.875.733.390				
					DINAS TENAGA KERJA	2.399.194.600				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.653.794.400				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	10.521.247.200				
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
				Cakupan pemerintahan desa yang tertib administrasi; Percentase Desa yang melaksanakan perencanaan dan pelaporan , pengelolaan keuangan , pengelolaan Aset yang tepat waktu; Percentase Jumlah BUMDES dengan katagori berkembang; Percentase Jumlah BUMDES dengan katagori maju; Percentase Jumlah Desa Berkembang; Percentase Jumlah Desa Maju; Percentase Jumlah Desa Mandiri						

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN		181.892.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja			
					DINAS PERHUBUNGAN	15.892.183.056	
					DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	12.711.883.566	
					DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	72.934.699.570	
					SEKRETARIAT DAERAH	15.521.355.740	
					SEKRETARIAT DPRD	13.669.347.234	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
				Persentase Tingkat Keselarasan Sasaran Pembangunan Tahunan dan Sasaran Pembangunan 5 Tahunan; Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; Persentase realisasi capaian indikator tujuan, sasaran, program dibawah koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.006.140.816	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
				persentase ketepatan waktu dan keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah; persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran ; persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD			
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	134.016.294.072	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
Percentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Level A							
				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		10.102.234.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Percentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja							
				INSPEKTORAT		576.909.600	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
Percentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti; Percentase hasil pemeriksaan yang ditindaklajuti; Percentase OPD dengan nilai LKJP A							
				INSPEKTORAT		206.690.000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
Jumlah OPD yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) ; Tersedianya dokumen program pengawasan tepat waktu							
				INSPEKTORAT		143.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Percentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja							
				KAPANEWON GODEAN		341.402.400	
				KAPANEWON MOYUDAN		5.891.141.672	
				KAPANEWON MINGGIR		6.595.448.480	
				KAPANEWON SEYEGAN		5.818.687.798	
				KAPANEWON MLATI		6.374.955.364	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				KAPANEWON BERBAH		140.627.400	
				KAPANEWON NGAGLIK		32.623.000	
				KAPANEWON TURI		22.320.000	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		376.182.424	
				Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
				Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi			
					DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	3.194.820.006	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
				Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi; Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan; Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW lain; Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan; Jumlah pemenuhan layanan sarana dan prasarana; Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi; Jumlah taman budaya di Kabupaten; Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing			
					DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	2.281.308.420	
				Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian			
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
				persentase pedagang pemilik UTTP yang bertanda tera sah			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	694.935.800	
				Meningkatnya kemandirian keuangan daerah			

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
Percentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah; Indeks kepuasan terhadap layanan perpajakan daerah							
				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		3.477.025.200	
	Meningkatnya kerukunan masyarakat						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
				Organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda yang aktif; Percentase peserta pelatihan kewirausahaan yang bisa mandiri pasca pelatihan			
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		1.813.126.184	
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
				Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Cakupan penanganan Acute Flaccid Paralysis (AFP) per 100 ribu penduduk usia < 15 tahun; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan; Percentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Percentase kalibrasi alat kesehatan Puskesmas; Presentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart (>60%)			
				DINAS KESEHATAN		315.660.000	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						
				Percentase sediaan obat, alkes dan makanan sesuai dengan standar; Percentase toko sarana prasarana kesehatan yang berizin			
				DINAS KESEHATAN		23.736.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
				Percentase rumah tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)			
				DINAS KESEHATAN		118.146.000	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja	DINAS PENDIDIKAN	1.122.708.646.362	
					DINAS KESEHATAN	190.865.042.168	
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	44.782.630.948	
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	239.828.258	
					DINAS SOSIAL	2.133.925.322	
					DINAS TENAGA KERJA	18.375.038.912	
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.244.460.792	
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	13.594.783.784	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.287.959.784	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERHUBUNGAN		679.188.400	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		20.822.985.784	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
				Persentase aduan masyarakat terlayani			
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		1.862.118.400	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							
				Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi; persentase layanan yang sudah berbasis digital; Persentase perangkat daerah tersambung jaringan komputer			
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		8.434.004.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		1.211.879.746	
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		21.091.082.190	
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		568.661.194	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
				Persentase dokumen statistik daerah tepat waktu			

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	386.393.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
				Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah daerah			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	329.836.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.807.219.600	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
				Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-arsip terintegrasi; Persentase SKPD yang menerapkan tertib arsip dengan kategori baik.; Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kearsipan			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	566.114.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							
				Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.548.800	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	50.297.287.656	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
Nilai EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah); Persentase kerjasama yang aktif; Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat; persentase Raperda yang disepakati dengan DPRD							
					SEKRETARIAT DAERAH	10.860.000	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
Indeks Kepuasan DPRD atas layanan kehumasan; Persentase capaian kinerja DPRD							
					SEKRETARIAT DPRD	18.902.880.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja							
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.805.782.362	
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	70.052.278.184	
					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	16.946.916.000	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
Pengelolaan Data dan Informasi ASN							
					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.902.546.600	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
				persentase pengembangan kompetensi ASN			

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	17.183.057.400	
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
				Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	341.500.000	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja			
					KAPANEWON GAMPING	135.027.754	
					KAPANEWON GODEAN	702.967.600	
					KAPANEWON MOYUDAN	46.848.000	
					KAPANEWON MINGGIR	576.893.600	
					KAPANEWON DEPOK	6.860.012.914	
					KAPANEWON BERBAH	5.930.234.800	
					KAPANEWON PRAMBANAN	6.689.765.394	
					KAPANEWON KALASAN	6.958.191.050	
					KAPANEWON NGEMPLAK	7.271.955.102	
					KAPANEWON NGAGLIK	388.166.000	
					KAPANEWON SLEMAN	183.951.828	
					KAPANEWON TEMPEL	6.524.759.470	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KAPANEWON TURI	99.538.000	
					KAPANEWON PAKEM	5.969.895.476	
					KAPANEWON CANGKRINGAN	283.551.636	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
				Percentase layanan perizinan selesai tepat waktu; Percentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Desa yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Musrenbang kecamatan			
					KAPANEWON GAMPING	159.231.750	
					KAPANEWON GODEAN	299.524.400	
					KAPANEWON MINGGIR	214.700.800	
					KAPANEWON SEYEGAN	189.384.400	
					KAPANEWON MLATI	70.013.200	
					KAPANEWON DEPOK	324.937.100	
					KAPANEWON PRAMBANAN	240.390.400	
					KAPANEWON KALASAN	273.610.000	
					KAPANEWON NGEMPLAK	193.586.000	
					KAPANEWON NGAGLIK	21.120.000	
					KAPANEWON SLEMAN	12.200.000	
					KAPANEWON TEMPET	219.875.586	
					KAPANEWON CANGKRINGAN	132.000.000	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
Percentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi							
				KAPANEWON MINGGIR	274.478.000		
				KAPANEWON DEPOK	535.613.706		
				KAPANEWON KALASAN	355.069.680		
				KAPANEWON TEMPEL	253.239.800		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
Percentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan							
				KAPANEWON GODEAN	200.229.900		
				KAPANEWON MINGGIR	134.480.000		
				KAPANEWON DEPOK	174.166.550		
				KAPANEWON KALASAN	155.499.900		
				KAPANEWON NGEMPLAK	204.443.800		
				KAPANEWON TEMPEL	91.121.470		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
Percentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti							
				KAPANEWON MOYUDAN	258.960.000		
				KAPANEWON MINGGIR	135.704.000		
				KAPANEWON KALASAN	307.365.000		
				KAPANEWON NGEMPLAK	207.320.000		

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
Percentase desa melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu; Percentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu							
				KAPANEWON GODEAN		90.647.000	
				KAPANEWON MOYUDAN		55.669.000	
				KAPANEWON MINGGIR		180.058.800	
Percentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu ; Percentase desa melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu							
				KAPANEWON DEPOK		143.903.566	
Percentase desa melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu; Percentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu							
				KAPANEWON KALASAN		74.282.850	
				KAPANEWON NGEMPLAK		165.369.892	
				KAPANEWON NGAGLIK		11.600.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Percentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja							
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		158.091.958	
Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan							
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
Percentase atlet pelajar yang meraih medali ditingkat provinsi							
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		4.161.772.938	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket				
1	2	3	4	5	6	7	8				
				Percentase minat baca masyarakat; Percentase perpustakaan milik Kabupaten yang memenuhi standar							
							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.242.578.600			
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								
				Percentase koleksi dan naskah kuno yang dikelola kurator							
							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.250.000			
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak									
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
				Percentase Lembaga PUG yang aktif							
							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	182.894.820			
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
				Meningkatnya jumlah kelompok Desa Prima dan Industri Rumahan; Percentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak							
							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.645.545.400			
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun							
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		141.383.876	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi							
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Percentase pengelola koperasi yang bersertifikasi			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		1.487.295.310	
Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Percentase Ketersediaan SarPras Perhubungan; Level Keselamatan Transportasi; Tingkat Pelayanan Lalulintas dan Angkutan Jalan			
				DINAS PERHUBUNGAN		2.026.010.800	
Menurunnya kemiskinan							
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Percentase Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial; Percentase pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan; Percentase PMKS yang ditangani			
				DINAS SOSIAL		285.879.826	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
				Cakupan pengelolaan tetenger			

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS SOSIAL		78.609.930	
		---					
			---	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
				SEKRETARIAT DAERAH		369.900.600	



## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, RINGKASAN BELANJA, DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan isu strategis dan rencana pembangunan daerah pada tahun anggaran 2021, maka ditetapkan prioritas dan plafon anggaran sementara Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2021 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan oleh Bupati Sleman dan Ketua beserta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Adapun plafon anggaran sementara tersebut, secara terinci dapat dilihat dalam tabel 4.1.

2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga tertuang dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.135.066.237.678</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.062.827.826.390
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	880.239.377.788
5.1.05	Belanja Hibah	168.230.383.500
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	23.768.650.000
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>414.541.902.059</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.849.540.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.567.124.208
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.194.165.838
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	333.717.536.613
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	213.535.400
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>18.233.211.836</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.233.211.836
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>276.558.858.760</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	48.558.858.760
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	228.000.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>2.844.400.210.333</b>

3. Adapun Plafon Anggaran Sementara Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk masing-masing organisasi perangkat daerah termasuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam matriks masing-masing OPD dan UPT pada Buku Lampiran II.



## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>812.938.942.671</b>	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>812.938.942.671</b>	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>809.743.906.571</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>565.537.277.981</b>	
<b>1.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.318.884.000</b>	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.600.000	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.750.000	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.900.000	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.250.000	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.222.384.000	
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>554.604.370.581</b>	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	551.352.795.081	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.936.880.000	
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.812.500	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	302.883.000	
<b>1.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5.757.486.000</b>	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.757.486.000	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.642.549.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.915.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	276.035.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	183.250.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.600.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	645.652.500	
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	81.188.500	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70.908.000	
<b>1.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>110.800.000</b>	
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	110.800.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>808.972.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.800.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.172.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.294.216.400</b>	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	776.716.400	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	35.000.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	282.500.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>242.574.715.090</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>118.165.955.340</b>	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	676.675.000	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	214.722.000	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	102.613.000	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.024.368.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.057.007.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.602.030.000	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	106.462.000	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	111.187.000	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	153.570.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	468.224.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.463.266.000	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.313.520.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2.900.278.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	542.840.000	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	15.172.319.840	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	965.807.500	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	715.157.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84.575.909.000	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>72.529.243.750</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	455.812.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	314.915.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.239.985.000	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	642.513.000	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	282.505.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.012.460.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	516.185.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	220.000.000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	300.000.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.931.466.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	403.153.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3.261.446.500	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.110.863.500	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.571.500.500	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	360.500.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	855.809.250	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	47.050.130.000	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>46.104.088.500</b>	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	463.464.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	102.242.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	239.092.000	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	600.000.000	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	108.415.000	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	237.682.500	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	214.177.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	164.971.250	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	345.500.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	17.111.602.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	937.332.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	253.980.750	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.325.630.000	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>5.775.427.500</b>	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	237.031.000	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	262.414.000	
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100.907.000	
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.715.000	
1.01.02.2.04.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.050.000	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	84.901.500	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	801.185.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	799.156.000	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	119.628.500	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	570.044.250	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	183.958.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.410.437.250	
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>215.512.500</b>	
<b>1.01.03.2.02</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>215.512.500</b>	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	215.512.500	
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>1.416.401.000</b>	
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>1.416.401.000</b>	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.416.401.000	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN GAMPING</b>	<b>76.794.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>76.794.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>40.194.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.944.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.590.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.000.000</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.400.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.0.00.00.01.0002</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN GODEAN</b>	<b>71.309.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>71.309.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>40.109.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.869.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.580.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.600.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.01.0.00.00.01.0003</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN MOYUDAN</b>	<b>67.228.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>67.228.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>32.628.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.028.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.940.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.000.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.0.00.00.01.0004</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN MINGGIR</b>	<b>74.695.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>74.695.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>34.395.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.075.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.660.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15.700.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.700.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.000.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.0.00.00.01.0005</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN SEYEGAN</b>	<b>63.256.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>63.256.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>34.956.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.296.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.700.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.700.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.000.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>18.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
<b>1.01.0.00.00.01.0006</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN MLATI</b>	<b>86.277.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>86.277.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>44.557.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.857.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.200.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17.120.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.720.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.0.00.00.01.0007</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN DEPOK</b>	<b>90.780.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>90.780.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>48.980.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.320.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.200.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.600.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.00.00.00.01.0008</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN BERBAH</b>	<b>105.569.200</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>105.569.200</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>30.140.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.820.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.660.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.429.200</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.829.200	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>23.000.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.0.00.00.01.0009</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN PRAMBANAN</b>	<b>112.491.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>112.491.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>38.291.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.631.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>49.600.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.000.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.0.00.00.01.0010</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN KALASAN</b>	<b>91.232.800</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>91.232.800</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>29.356.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.576.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.420.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.200.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48.376.800</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.200.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.176.800	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0011</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN NGEMPLAK</b>	<b>108.942.200</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>108.942.200</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>35.293.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.853.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.140.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.800.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>50.049.200</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.049.200	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>23.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.0.00.00.01.0012</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN NGAGLIK</b>	<b>126.665.200</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>126.665.200</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>43.756.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.776.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.500.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.980.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.309.200</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.300.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.009.200	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>22.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.000.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.01.0.00.00.01.0013</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN SLEMAN</b>	<b>83.406.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>83.406.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>40.486.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.186.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.800.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>18.320.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.720.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.0.00.00.01.0014</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN TEMPEL</b>	<b>71.360.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>71.360.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>35.140.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.380.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.100.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.120.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.720.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>23.100.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0015</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN TURI</b>	<b>107.686.200</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>107.686.200</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>32.957.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.297.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>50.129.200</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.329.200	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.0.00.00.01.0016</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN PAKEM</b>	<b>111.511.200</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>111.511.200</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>33.982.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.662.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.660.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.929.200</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.329.200	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.600.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.0.00.00.01.0017</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN CANGKRINGAN</b>	<b>102.288.200</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>102.288.200</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>33.359.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.759.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.700.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.900.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>44.929.200</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.129.200	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.000.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0018</b>	<b>UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA)</b>	<b>667.363.600</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>347.363.600</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>127.115.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.615.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.500.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>119.648.600</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.620.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.028.600	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.600.000</b>	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.600.000	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	18.000.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>320.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>320.000.000</b>	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	320.000.000	
<b>1.01.00.0.00.01.0019</b>	<b>TK NEGERI 1</b>	<b>184.004.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>184.004.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>71.659.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.249.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.250.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63.920.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.500.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.620.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48.425.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	8.425.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.500.000	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0020</b>	<b>TK NEGERI 2</b>	<b>143.500.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>143.500.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>53.400.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.840.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.800.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>47.900.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.400.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.500.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>42.200.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	7.200.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.000.000	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0021</b>	<b>TK NEGERI 3</b>	<b>132.007.500</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>132.007.500</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>51.947.500</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.347.500	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.440.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.020.000</b>	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.020.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>45.040.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.840.000	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.200.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>28.000.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000	
<b>1.01.00.00.00.01.0022</b>	<b>TK PEMBINA</b>	<b>126.050.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>126.050.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>80.490.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.600.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.240.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.250.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.800.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.400.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.000.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>34.160.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.760.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.600.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.800.000	
<b>1.01.00.00.00.01.0023</b>	<b>TK MODEL</b>	<b>390.620.000</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>390.620.000</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>155.820.000</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.660.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.160.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>157.800.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.200.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.600.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.000.000</b>	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	18.000.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>490.870.573.683</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>490.870.573.683</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>173.709.839.449</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>92.775.529.934</b>	
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>329.350.000</b>	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175.638.000	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.833.000	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.299.000	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.380.000	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.200.000	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>88.986.409.402</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86.742.240.244	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.897.416.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	346.753.158	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>427.331.875</b>	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	391.331.875	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.134.198.307</b>	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.242.200	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.726.017	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258.855.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.000.690	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.210.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421.914.400	
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39.970.000	
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36.280.000	
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.500.000</b>	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	22.500.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.294.911.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.880.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.118.031.000	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>580.829.350</b>	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	345.369.350	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.460.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>78.303.232.460</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.094.204.890</b>	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.000.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.123.850.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.963.854.890	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	6.500.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>62.803.115.730</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	399.316.300	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	105.873.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	111.889.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	170.085.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	284.872.500	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	467.492.500	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	72.928.800	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	29.941.500	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	46.135.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	554.893.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	209.612.500	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	120.483.200	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	172.295.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100.041.800	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.418.705.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	150.550.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.186.906.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	14.181.900	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	164.762.600	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50.381.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	28.988.200	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.123.211.180	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	51.221.812.830	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	578.295.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.130.026.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	141.585.200	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.747.851.720	
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>337.419.360</b>	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	98.146.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	239.273.360	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.068.492.480</b>	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	79.389.680	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.823.428.800	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	93.125.000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	72.549.000	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>298.815.000</b>	
<b>1.02.03.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>66.165.000</b>	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	49.060.000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	17.105.000	
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>63.000.000</b>	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	63.000.000	
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>169.650.000</b>	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.650.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>503.229.680</b>	
<b>1.02.04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>160.580.000</b>	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	137.420.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	23.160.000	
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>110.339.680</b>	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	110.339.680	
<b>1.02.04.2.04</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>87.810.000</b>	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	87.810.000	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>49.420.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	49.420.000	
<b>1.02.04.2.06</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>95.080.000</b>	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	95.080.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>1.829.032.375</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>906.862.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	906.862.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>637.810.775</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	637.810.775	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>284.359.600</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	284.359.600	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>RSUD SLEMAN</b>	<b>133.116.078.314</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>120.893.962.522</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>35.893.962.522</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.893.962.522	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>85.000.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	85.000.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>12.222.115.792</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.234.069.082</b>	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	496.627.010	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	993.493.640	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.775.702.512	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.485.884.800	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.482.361.120	
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>988.046.710</b>	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	988.046.710	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>RSUD PRAMBANAN</b>	<b>61.594.950.000</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>38.473.020.944</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.473.020.944</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.473.020.944	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>28.000.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	28.000.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>23.121.929.056</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>21.154.185.056</b>	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.200.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.944.940.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.640.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	8.726.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.643.245.056	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.967.744.000</b>	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.967.744.000	
<b>1.02.00.00.00.01.0003</b>	<b>UPT PUSKESMAS GAMPING I</b>	<b>4.013.353.000</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.165.768.000</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>905.268.000</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	905.268.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>40.000.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>70.500.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.500.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.150.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.150.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>547.245.000</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>103.940.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	48.950.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	52.990.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.000.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>443.305.000</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.750.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.590.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.500.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.865.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.550.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16.525.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.025.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	11.860.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.840.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.095.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.665.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.800.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	109.525.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	49.335.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	44.125.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44.255.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>8.700.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>8.700.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	8.700.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>291.640.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>251.195.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	251.195.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.445.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	40.445.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>UPT PUSKESMAS GAMPING II</b>	<b>3.754.293.000</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.897.624.000</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>897.624.000</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	897.624.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>75.000.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.925.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.925.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>721.931.000</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>68.800.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	38.800.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>653.131.000</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.247.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.657.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.150.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	34.285.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.745.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.620.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	26.985.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.970.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.970.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	60.460.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.210.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	17.930.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35.428.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.850.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	70.622.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	64.780.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	30.430.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.188.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	89.604.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>7.500.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>7.500.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	7.500.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>127.238.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>127.238.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	127.238.000	
<b>1.02.00.0.00.01.0005</b>	<b>UPT PUSKESMAS GODEAN I</b>	<b>4.843.262.300</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.894.420.800</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.094.620.800</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.094.620.800	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>84.000.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>115.800.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.800.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.600.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.600.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>719.391.500</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.450.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	73.500.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	26.950.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>618.941.500</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.760.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.260.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.295.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.170.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.090.500	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	69.384.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	50.600.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.840.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.274.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25.550.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	31.710.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.435.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	109.280.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.380.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	92.523.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	39.262.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	43.128.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>6.841.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>6.841.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	6.841.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>222.609.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>122.980.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	122.980.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>66.987.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	66.987.000	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>32.642.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	32.642.000	
<b>1.02.00.00.00.01.0006</b>	<b>UPT PUSKESMAS GODEAN II</b>	<b>3.415.496.500</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.578.204.000</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>886.704.000</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	886.704.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.691.500.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.691.500.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>555.955.500</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>555.955.500</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.452.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.625.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.950.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	41.945.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.356.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.925.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	52.050.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.000.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.250.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	42.679.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	35.160.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	26.625.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	85.897.500	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.200.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	34.862.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	24.950.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12.500.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.720.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.250.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	74.559.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>17.001.000</b>	
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>12.000.000</b>	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12.000.000	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>5.001.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5.001.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>264.336.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>247.465.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	247.465.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.871.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	16.871.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.0.00.00.01.0007</b>	<b>UPT PUSKESMAS MOYUDAN</b>	<b>3.467.377.670</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.589.049.600</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>853.944.000</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	853.944.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>25.105.600</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.105.600	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.000.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.710.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.710.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>724.520.070</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>105.488.070</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	42.538.070	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	62.950.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>619.032.000</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.614.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.025.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.920.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.900.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.557.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	18.825.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	22.590.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.625.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	23.750.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	45.861.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.345.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.125.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	115.378.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.359.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	91.863.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	47.280.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.110.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	7.650.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20.550.000	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	9.705.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>19.986.000</b>	
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>8.278.000</b>	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	8.278.000	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>11.708.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	11.708.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>133.822.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.780.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	90.780.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29.360.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	29.360.000	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.682.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.682.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0008</b>	<b>UPT PUSKESMAS MINGGIR</b>	<b>4.755.041.500</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.764.173.000</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.144.416.000</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.144.416.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>9.958.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.458.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>94.999.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.999.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.514.800.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.514.800.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>924.853.500</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26.225.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.425.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.800.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>898.628.500</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.074.750	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.950.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.025.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.127.500	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.950.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	38.313.500	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.850.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	61.140.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	46.760.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.881.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	67.063.500	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.165.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	106.634.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.865.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	133.573.500	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	135.400.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	76.943.750	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	25.145.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	4.660.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.106.500	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>16.140.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>16.140.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	16.140.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>49.875.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.875.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	49.875.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0009</b>	<b>UPT PUSKESMAS SEYEGAN</b>	<b>5.128.824.500</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.300.908.000</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.090.908.000</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.090.908.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>3.200.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.200.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>799.841.500</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.000.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>774.841.500</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.500.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	22.435.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19.595.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	37.226.500	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.900.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	13.390.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	49.100.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	101.800.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	13.315.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.700.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.875.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	20.815.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	95.704.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	72.302.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	94.875.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.704.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	43.725.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	13.880.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>28.075.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.075.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	28.075.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0010</b>	<b>UPT PUSKESMAS MLATI I</b>	<b>3.879.459.900</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.014.122.400</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>905.122.400</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	905.122.400	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>40.700.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.700.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>108.300.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.300.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.960.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.960.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>800.917.500</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>135.000.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	70.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	45.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.000.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>665.917.500</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.920.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	360.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.510.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	42.025.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.510.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	13.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.000.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	32.665.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	32.665.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	41.190.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.210.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	28.105.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	114.536.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.710.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.449.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	69.845.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.860.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	113.357.500	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>9.660.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>9.660.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9.660.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>54.760.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.000.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	49.000.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.760.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5.760.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0011</b>	<b>UPT PUSKESMAS MLATI II</b>	<b>5.900.040.400</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.904.679.200</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.353.643.200</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.353.643.200	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>40.036.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.836.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.200.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>111.000.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.000.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>3.400.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.400.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>810.297.400</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>249.950.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	59.500.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	190.450.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>560.347.400</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.800.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.100.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.100.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	54.766.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.631.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	28.396.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	41.950.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.040.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	34.750.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	71.188.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.809.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12.080.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	11.655.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	64.152.400	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.069.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	86.138.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.615.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44.108.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>185.063.800</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>148.383.800</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	148.383.800	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.940.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	30.940.000	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.740.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.740.000	
<b>1.02.00.00.00.01.0012</b>	<b>UPT PUSKESMAS DEPOK I</b>	<b>3.431.848.400</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.646.958.400</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>830.138.400</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	830.138.400	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>95.120.000</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.615.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.505.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>71.700.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.700.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.650.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.650.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>579.839.000</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>130.570.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	93.570.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.000.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>449.269.000</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.804.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.260.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19.670.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.360.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.290.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.125.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.202.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.400.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.400.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.586.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.284.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	24.045.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	86.117.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.410.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	84.785.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	63.720.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12.615.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.196.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>205.051.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>178.659.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	178.659.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26.392.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	26.392.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0013</b>	<b>UPT PUSKESMAS DEPOK II</b>	<b>3.316.684.800</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.383.814.800</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>714.604.800</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	714.604.800	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>47.210.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.210.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.000.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.550.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.550.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>700.666.000</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.020.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.020.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>651.646.000</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.112.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	780.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.050.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	45.941.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.700.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.930.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.537.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.390.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.610.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.500.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	76.702.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.770.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48.019.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.860.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	47.035.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	33.480.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88.230.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>845.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>845.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	845.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>231.359.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>219.004.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	219.004.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.355.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12.355.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.0.00.00.01.0014</b>	<b>UPT PUSKESMAS DEPOK III</b>	<b>3.710.442.300</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.606.652.800</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>757.192.800</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	757.192.800	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>71.160.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.160.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>78.300.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.300.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.700.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.700.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>958.600.500</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>241.390.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	116.690.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	103.400.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.300.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>717.210.500</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.952.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.722.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.400.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.329.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.623.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	21.795.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	32.265.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	104.370.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.050.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	38.755.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.574.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	36.649.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	73.705.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.571.500	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60.878.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	52.175.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	24.191.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.015.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.635.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	4.650.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.906.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>4.386.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>4.386.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	4.386.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>140.803.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>99.548.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	99.548.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>33.005.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	33.005.000	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.250.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.250.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0015</b>	<b>UPT PUSKESMAS BERBAH</b>	<b>5.009.911.600</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.122.350.300</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.305.595.200</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.305.595.200	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>96.755.100</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.755.100	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>120.000.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.600.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.600.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>750.120.300</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>206.850.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	55.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	121.110.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.740.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>543.270.300</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.650.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.800.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.300.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.435.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.372.500	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	33.020.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.201.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	92.244.500	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23.050.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.525.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.955.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	125.425.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.405.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.822.300	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	43.905.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34.960.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13.200.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>43.855.000</b>	
<b>1.02.04.2.04</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>40.000.000</b>	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.000.000	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>3.855.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	3.855.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>93.586.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>80.766.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	80.766.000	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.820.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.820.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.0.00.00.01.0016</b>	<b>UPT PUSKESMAS PRAMBANAN</b>	<b>4.688.383.800</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.785.686.800</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>977.776.800</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	977.776.800	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.910.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.910.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.700.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.700.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>808.624.000</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.000.000</b>	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.000.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>788.624.000</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.150.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.000.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.435.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.805.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45.500.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	37.950.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.900.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	131.790.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	28.240.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.920.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	32.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.280.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	91.915.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	171.759.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	87.090.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60.890.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>94.073.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>54.668.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	54.668.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39.405.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	39.405.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0017</b>	<b>UPT PUSKESMAS KALASAN</b>	<b>5.496.757.400</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.760.020.800</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.313.020.800</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.313.020.800	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>97.000.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.000.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>3.300.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.300.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>680.972.500</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.500.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	110.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.500.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>530.472.500</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.510.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	39.510.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.500.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	21.050.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	55.280.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.480.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.230.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	82.300.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.490.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27.745.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.590.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.410.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	44.015.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	46.597.500	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	105.265.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.500.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>55.764.100</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.364.100</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	40.364.100	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.400.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	15.400.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0018</b>	<b>UPT PUSKESMAS NGEMPLAK I</b>	<b>4.702.641.600</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.577.997.600</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.362.597.600</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.362.597.600	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>108.800.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.500.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.300.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>101.600.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.600.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.005.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.005.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>955.546.000</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>362.000.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	212.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>593.546.000</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93.610.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	73.900.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.920.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	47.995.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.529.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.408.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.956.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	30.725.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	18.011.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17.377.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.911.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.500.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.704.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.050.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	29.525.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	105.567.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	13.796.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28.062.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>169.098.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>169.098.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	169.098.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0019</b>	<b>UPT PUSKESMAS NGEMPLAK II</b>	<b>3.347.313.200</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.254.597.200</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>929.947.200</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	929.947.200	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>26.250.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.250.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>68.400.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.230.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.230.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>800.495.000</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>115.150.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	45.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	61.150.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.000.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>685.345.000</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.270.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.440.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.550.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	75.400.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.850.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	17.295.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.900.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.300.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.560.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.440.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.370.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.820.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	94.846.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.500.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	111.173.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	24.365.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	4.995.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.445.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.960.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72.866.000	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>28.050.000</b>	
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.050.000</b>	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	28.050.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>264.171.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.926.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	60.926.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>110.475.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	110.475.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>92.770.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	92.770.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0020</b>	<b>UPT PUSKESMAS NGAGLIK I</b>	<b>3.805.064.100</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.950.917.600</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>936.717.600</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	936.717.600	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73.200.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.200.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.921.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.921.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>760.244.500</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>121.400.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	45.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	66.400.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.000.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>638.844.500</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.060.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.600.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.250.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.360.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.110.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	64.915.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.100.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	108.900.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.350.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.205.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.458.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.475.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	82.803.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.569.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	91.830.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	78.900.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.800.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30.159.500	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>6.670.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>6.670.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	6.670.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>87.232.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>59.752.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	59.752.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27.480.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	27.480.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0021</b>	<b>UPT PUSKESMAS NGAGLIK II</b>	<b>3.754.407.800</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.762.632.800</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>833.632.800</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	833.632.800	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>45.000.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>84.000.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.800.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.800.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>846.580.000</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>113.200.500</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	89.700.500	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.500.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>733.379.500</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.450.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.950.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.650.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	34.280.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.145.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	65.060.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34.200.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	56.790.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.500.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.915.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.710.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	34.415.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4.375.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	124.150.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.135.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	93.214.500	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	73.965.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	8.140.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.900.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	7.500.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	13.335.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	37.600.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>5.070.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>5.070.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5.070.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>140.125.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>117.195.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	117.195.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.310.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	8.310.000	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.620.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.620.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0022</b>	<b>UPT PUSKESMAS SLEMAN</b>	<b>5.716.363.600</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.803.596.800</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.343.596.800</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.343.596.800	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>79.000.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>81.000.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>3.300.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.300.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>689.700.300</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	55.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.000.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>589.700.300</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.040.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.975.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.990.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	53.130.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.460.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19.925.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.175.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	68.750.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.275.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.441.500	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.035.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	16.225.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	11.125.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27.025.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26.270.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	89.345.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	73.133.800	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	8.900.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.920.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	8.130.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44.430.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>8.500.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>8.500.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	8.500.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>214.566.500</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>84.341.500</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	84.341.500	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>38.225.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	38.225.000	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>92.000.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	92.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0023</b>	<b>UPT PUSKESMAS TEMPOL I</b>	<b>4.196.223.800</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.192.005.500</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.204.039.200</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.204.039.200	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>98.566.300</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.461.300	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.105.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>89.400.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.400.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.800.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.800.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>933.277.300</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>157.830.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	48.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	94.030.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.800.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>775.447.300</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.679.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	43.380.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	28.378.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.731.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.841.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.440.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.633.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	42.880.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	41.630.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	35.018.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.338.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.305.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	92.852.300	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60.870.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	173.948.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	4.365.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.058.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	61.101.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>11.868.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>11.868.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	11.868.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>59.073.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>59.073.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	59.073.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0024</b>	<b>UPT PUSKESMAS TEMPIL II</b>	<b>3.388.289.100</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.445.496.160</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>832.104.000</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	832.104.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.792.160</b>	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.792.160	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.600.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.600.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.530.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.530.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>738.191.685</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>58.620.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.840.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	36.780.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>679.571.685</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.810.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	975.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	650.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.791.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.309.875	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.100.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.643.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.980.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	37.395.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27.560.200	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.250.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.683.565	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170.364.585	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36.994.500	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	127.179.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	75.695.960	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	7.210.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	14.740.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12.240.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>20.105.875</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>20.105.875</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	20.105.875	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>184.495.380</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>147.885.380</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	147.885.380	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.690.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	11.690.000	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>24.920.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.920.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.0.00.00.01.0025</b>	<b>UPT PUSKESMAS TURI</b>	<b>4.581.677.200</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.579.703.200</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.140.703.200</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.140.703.200	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>44.500.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.500.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>94.500.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.500.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.300.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.300.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>855.792.000</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>87.000.000</b>	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	55.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	32.000.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>768.792.000</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	58.000.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.000.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.000.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	59.485.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	23.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19.900.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.000.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.100.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	124.076.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	146.742.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142.449.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	55.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	82.040.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>146.182.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>146.182.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	146.182.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0026</b>	<b>UPT PUSKESMAS PAKEM</b>	<b>4.000.292.450</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.948.707.700</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>953.971.200</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	953.971.200	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>76.136.500</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.671.500	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.465.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>58.100.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.100.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.860.500.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.860.500.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>769.925.750</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>769.925.750</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110.243.750	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.341.500	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.120.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	54.216.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.325.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	41.200.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.930.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.245.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	23.250.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.265.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.259.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	30.475.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	171.775.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.852.500	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	46.150.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.080.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	16.390.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.763.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.240.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	47.500.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	75.305.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>5.350.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>5.350.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5.350.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>276.309.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>218.812.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	218.812.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27.969.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	27.969.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29.528.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	29.528.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0027</b>	<b>UPT PUSKESMAS CANGKRINGAN</b>	<b>3.791.890.900</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.943.648.400</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>846.518.400</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	846.518.400	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>32.150.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.150.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>64.980.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.980.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.000.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>802.822.500</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>213.500.000</b>	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	143.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	56.500.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>589.322.500</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.000.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.520.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.407.500	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	42.400.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.178.900	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	46.195.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.184.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.520.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.520.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.949.500	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.520.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.442.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	91.797.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	79.395.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	156.502.350	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	32.090.500	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	53.700.750	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>6.420.000</b>	
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>6.420.000</b>	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	6.420.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>39.000.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39.000.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	39.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0028</b>	<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN</b>	<b>2.585.856.200</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>936.029.000</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>499.262.400</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	499.262.400	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>42.999.000</b>	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.660.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.989.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.350.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>281.129.450</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.100.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.029.450	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>112.638.150</b>	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.480.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.158.150	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.017.152.750</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.152.750</b>	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.152.750	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.000.000.000</b>	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>632.674.450</b>	
<b>1.02.04.2.06</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>632.674.450</b>	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	632.674.450	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0029</b>	<b>UPT PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN</b>	<b>13.768.508.900</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>149.700.400</b>	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>8.394.000</b>	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.614.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.780.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>141.306.400</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.680.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.626.400	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>13.618.808.500</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.618.808.500</b>	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	13.528.418.500	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.000.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75.390.000	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>444.015.258.479</b>	
<b>1.03.1.04.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>206.873.145.450</b>	
<b>1.03.1.04.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>196.761.749.400</b>	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>24.982.290.324</b>	
<b>1.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>329.166.400</b>	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.721.400	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.500.000	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.500.000	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.500.000	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.500.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	213.445.000	
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19.612.295.054</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.934.820.204	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.585.474.850	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	92.000.000	
<b>1.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>394.621.800</b>	
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	369.356.800	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.265.000	
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.657.430.500</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	798.000.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.700.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	196.812.500	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.500.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.098.000	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	44.320.000	
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>543.225.000</b>	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.725.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.000.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.500.000	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.445.551.570</b>	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.109.801.570	
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	25.000.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.750.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	245.000.000	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>38.050.838.600</b>	
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.639.620.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	673.400.000	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.750.775.000	
1.03.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	636.540.000	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	347.070.000	
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	165.000.000	
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	66.835.000	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>34.411.218.600</b>	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	879.990.000	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	19.660.102.224	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	13.871.126.376	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>24.752.181.500</b>	
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>24.752.181.500</b>	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	454.310.000	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.704.785.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	12.749.823.000	
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	440.663.500	
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	4.402.600.000	
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>11.604.546.000</b>	
<b>1.03.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.604.546.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	963.422.000	
1.03.06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	458.870.000	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	8.449.444.000	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.732.810.000	
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>977.725.000</b>	
<b>1.03.07.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>977.725.000</b>	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	977.725.000	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>7.783.321.750</b>	
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>7.783.321.750</b>	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	2.629.098.750	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.674.421.000	
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1.479.802.000	
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>1.094.540.000</b>	
<b>1.03.09.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.094.540.000</b>	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	844.540.000	
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	250.000.000	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>86.614.196.226</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>86.614.196.226</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	953.301.000	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	627.916.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.171.554.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	33.514.587.368	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	14.556.907.858	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	9.959.846.000	
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	23.733.909.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.096.175.000	
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>902.110.000</b>	
<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>744.975.000</b>	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	744.975.000	
<b>1.03.11.2.03</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>157.135.000</b>	
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IJUK Nasional	157.135.000	
<b>1.03.1.04.0.00.01.0001</b>	<b>UPT PERALATAN, LABORATORIUM DAN PENGOLAHAN ASPAL</b>	<b>2.984.235.000</b>	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>2.984.235.000</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.984.235.000</b>	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.984.235.000	
<b>1.03.1.04.0.00.01.0004</b>	<b>UPT PELAYANAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH BARAT</b>	<b>2.685.735.700</b>	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>2.685.735.700</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.02.2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>704.193.000</b>	
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	704.193.000	
1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.981.542.700</b>	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.981.542.700	
1.03.1.04.0.00.01.0005	<b>UPT PELAYANAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH TENGAH</b>	<b>2.299.657.000</b>	
1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>2.299.657.000</b>	
1.03.02.2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>521.221.450</b>	
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	521.221.450	
1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.778.435.550</b>	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.778.435.550	
1.03.1.04.0.00.01.0006	<b>UPT PELAYANAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH TIMUR</b>	<b>2.141.768.350</b>	
1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>2.141.768.350</b>	
1.03.02.2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>362.762.650</b>	
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	362.762.650	
1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.779.005.700</b>	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.779.005.700	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.10.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)</b>	<b>226.790.250.279</b>	
<b>2.10.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)</b>	<b>226.790.250.279</b>	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>43.519.725</b>	
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>43.519.725</b>	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	43.519.725	
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>243.907.670</b>	
<b>1.03.09.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>243.907.670</b>	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	243.907.670	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.297.912.884</b>	
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>572.318.996</b>	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	146.999.863	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	314.399.858	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	110.919.275	
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>80.079.765</b>	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	80.079.765	
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>645.514.123</b>	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	133.514.445	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	165.999.855	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	345.999.823	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.03.13</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	<b>225.204.910.000</b>	
<b>1.03.13.2.02</b>	<b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>	<b>225.204.910.000</b>	
1.03.13.2.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	225.204.910.000	
<b>2.11.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>10.351.862.750</b>	
<b>2.11.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>10.351.862.750</b>	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>10.351.862.750</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.351.862.750</b>	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	217.584.000	
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	15.390.000	
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	242.169.000	
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	579.232.200	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.686.905.250	
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	273.680.000	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.328.352.300	
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	8.550.000	
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>35.285.601.800</b>	
<b>1.03.1.04.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>35.285.601.800</b>	
<b>1.03.1.04.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>30.654.887.000</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>1.416.205.000</b>	
<b>1.04.02.2.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>1.416.205.000</b>	
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.416.205.000	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>26.307.787.000</b>	
<b>1.04.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>8.825.575.000</b>	
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	8.825.575.000	
<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>7.099.970.000</b>	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	7.099.970.000	
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>10.382.242.000</b>	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	10.382.242.000	
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>2.930.895.000</b>	
<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>2.930.895.000</b>	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.930.895.000	
<b>1.03.1.04.0.00.01.0002</b>	<b>UPT RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA</b>	<b>2.666.899.200</b>	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.666.899.200</b>	
<b>1.04.02.2.05</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>2.666.899.200</b>	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.666.899.200	
<b>1.03.1.04.0.00.01.0003</b>	<b>UPT TAMAN PEMAKAMAN UMUM</b>	<b>1.963.815.600</b>	
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>1.963.815.600</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>1.963.815.600</b>	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.963.815.600	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>27.739.050.940</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>16.905.077.730</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>16.905.077.730</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.631.834.515</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>63.405.675</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.766.250	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.690.925	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.690.925	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.690.925	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.690.925	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.690.925	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.184.800	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.475.731.580</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.277.766.680	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188.340.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9.624.900	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.843.304.540</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.843.304.540	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>197.559.255</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.984.480	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.193.770	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.036.130	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.221.275	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.237.000	
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.061.600	
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.325.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>415.452.615</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.687.260	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.040.000	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.744.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.981.355	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>636.380.850</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	506.443.850	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.937.000	
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.459.742.995</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.198.845.695</b>	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	934.750.000	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	302.444.375	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	749.850.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	108.250.000	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	103.551.320	
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>256.272.300</b>	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	45.562.300	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	39.195.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	171.515.000	
<b>1.05.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>4.625.000</b>	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	4.625.000	
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>813.500.220</b>	
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>759.992.720</b>	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	651.830.000	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	108.162.720	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.05.04.2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>4.837.500</b>	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.837.500	
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>48.670.000</b>	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	48.670.000	
<b>1.05.00.00.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>10.833.973.210</b>	
<b>1.05.00.00.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>10.833.973.210</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.042.230.411</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>87.424.309</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.259.766	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.499.970	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.499.970	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.862.310	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.862.310	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.439.983	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.713.592.008</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.482.032.200	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	225.660.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.899.808	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah</b>	<b>169.044.060</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	169.044.060	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>223.551.218</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.243.925	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.098.274	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.389.998	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.700.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.016.000	
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.073.026	
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	41.029.995	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>519.479.966</b>	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.112.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	325.367.966	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>329.138.850</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.487.000	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.950.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.727.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.974.850	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>4.791.742.799</b>	
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>320.532.467</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	94.749.918	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	225.782.549	
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1.634.836.825</b>	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	292.973.600	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	112.712.375	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	352.879.728	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	337.036.380	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	539.234.742	
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>2.334.912.905</b>	
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	44.649.920	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	442.404.838	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.177.175.990	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	670.682.157	
<b>1.05.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>501.460.602</b>	
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	111.588.875	
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	207.546.994	
1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	182.324.733	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>31.707.981.265</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>31.707.981.265</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>31.707.981.265</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.972.122.017</b>	
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>81.587.245</b>	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.055.375	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.007.370	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.007.370	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.007.370	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.007.370	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.502.390	
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.448.602.686</b>	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.233.382.876	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	207.740.000	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.479.810	
<b>1.06.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>501.345.788</b>	
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	501.345.788	
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>237.409.918</b>	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.378.750	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.680	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.969.070	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.501.418	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.325.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.218.000	
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.400.000	
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19.442.000	
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>290.829.380</b>	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.799.900	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.500.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.529.480	
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>412.347.000</b>	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.046.000	
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.600.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.710.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.991.000	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>1.724.892.542</b>	
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.724.892.542</b>	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75.784.958	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	225.299.950	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	558.939.891	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	679.002.855	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	185.864.888	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>22.946.158.131</b>	
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>20.980.403.698</b>	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.145.479.900	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.368.994.350	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	793.678.363	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	10.672.251.085	
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.965.754.433</b>	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	142.939.913	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	1.247.279.821	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	410.794.934	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	164.739.765	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>769.919.586</b>	
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>769.919.586</b>	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	703.714.818	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	66.204.768	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>255.584.024</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>255.584.024</b>	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	76.754.209	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	178.829.815	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>39.304.965</b>	
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>39.304.965</b>	
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39.304.965	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>14.702.651.756</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	<b>14.702.651.756</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	<b>12.519.035.756</b>	
<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.642.126.756</b>	
<b>2.07.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>197.515.000</b>	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.320.000	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.940.000	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.260.000	
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.815.000	
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.440.000	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.740.000	
<b>2.07.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.563.292.056</b>	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.291.962.056	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	255.010.000	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.320.000	
<b>2.07.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>128.887.804</b>	
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	128.887.804	
<b>2.07.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>357.664.100</b>	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.007.600	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.850.000	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.199.000	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.375.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.232.500	
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>841.933.200</b>	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.400.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231.000.000	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	568.533.200	
<b>2.07.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>552.834.596</b>	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	313.528.000	
2.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	11.500.000	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.985.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159.821.596	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>23.103.000</b>	
<b>2.07.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>23.103.000</b>	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	23.103.000	
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>486.207.000</b>	
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>405.570.000</b>	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	405.570.000	
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>31.825.000</b>	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	31.825.000	
<b>2.07.03.2.03</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>13.155.000</b>	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	13.155.000	
<b>2.07.03.2.05</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35.657.000</b>	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	35.657.000	
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>917.348.000</b>	
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>777.540.000</b>	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	171.345.000	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	59.745.000	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	546.450.000	
<b>2.07.04.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>44.440.000</b>	
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	44.440.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.07.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>71.755.000</b>	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	71.755.000	
<b>2.07.04.2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.493.000</b>	
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	5.493.000	
<b>2.07.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.120.000</b>	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.120.000	
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>450.251.000</b>	
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>61.950.000</b>	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	19.680.000	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	19.780.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	22.490.000	
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>388.301.000</b>	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.340.000	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.250.000	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	25.865.000	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	325.846.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.07.3.32.0.00.01.0001	<b>UPT BALAI LATIHAN KERJA</b>	<b>2.183.616.000</b>	
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>2.183.616.000</b>	
2.07.03.2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>2.183.616.000</b>	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.183.616.000	
2.08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>10.162.832.770</b>	
2.08.2.14.0.00.01.0000	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>10.162.832.770</b>	
2.08.2.14.0.00.01.0000	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>9.340.060.070</b>	
2.08.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.439.871.535</b>	
2.08.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>103.672.963</b>	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.564.788	
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.434.825	
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.434.825	
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.434.825	
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.434.825	
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.368.875	
2.08.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.180.041.401</b>	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.910.669.078	
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	236.295.500	
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.076.823	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.08.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>826.897.200</b>	
2.08.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	818.897.200	
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	
<b>2.08.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>472.123.871</b>	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.995.690	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.993.088	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	224.669.922	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.079.171	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.550.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.836.000	
<b>2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>803.222.100</b>	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.600.000	
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.122.100	
<b>2.08.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.053.914.000</b>	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	675.434.000	
2.08.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	21.200.000	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.500.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.780.000	
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>236.137.760</b>	
<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>91.447.410</b>	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	91.447.410	
<b>2.08.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>79.010.475</b>	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	79.010.475	
<b>2.08.02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>65.679.875</b>	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.679.875	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>138.412.925</b>	
<b>2.08.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>138.412.925</b>	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	138.412.925	
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>91.491.900</b>	
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>91.491.900</b>	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	91.491.900	
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>129.495.800</b>	
<b>2.08.05.2.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>129.495.800</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	129.495.800	
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>213.584.000</b>	
<b>2.08.06.2.01</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>104.935.250</b>	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	104.935.250	
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>108.648.750</b>	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	108.648.750	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>91.066.150</b>	
<b>2.08.07.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>42.202.350</b>	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.202.350	
<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>48.863.800</b>	
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	48.863.800	
<b>2.08.2.14.0.00.01.0001</b>	<b>UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>	<b>822.772.700</b>	
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>822.772.700</b>	
<b>2.08.04.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>822.772.700</b>	
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	822.772.700	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>1.213.898.750</b>	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN</b>	<b>1.213.898.750</b>	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN</b>	<b>1.213.898.750</b>	
<b>2.09.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>51.255.000</b>	
<b>2.09.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>51.255.000</b>	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	51.255.000	
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>944.146.750</b>	
<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>363.991.750</b>	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	23.904.000	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	95.745.000	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	56.098.750	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	28.904.000	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	159.340.000	
<b>2.09.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>186.900.000</b>	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	186.900.000	
<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>393.255.000</b>	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	369.890.000	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	23.365.000	
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>97.512.000</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.09.04.2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>97.512.000</b>	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	97.512.000	
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>120.985.000</b>	
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>120.985.000</b>	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	120.985.000	
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>13.753.727.319</b>	
<b>2.10.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)</b>	<b>13.753.727.319</b>	
<b>2.10.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)</b>	<b>13.753.727.319</b>	
<b>2.10.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.907.301.602</b>	
<b>2.10.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>98.025.172</b>	
2.10.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.709.870	
2.10.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.429.808	
2.10.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.429.808	
2.10.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.729.778	
2.10.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	990.000	
2.10.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.735.908	
<b>2.10.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.326.208.387</b>	
2.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.018.038.677	
2.10.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	306.260.000	
2.10.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.909.710	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.10.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>514.456.930</b>	
2.10.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	514.456.930	
<b>2.10.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>232.848.955</b>	
2.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.991.690	
2.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.992.922	
2.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.302.853	
2.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.471.790	
2.10.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.245.000	
2.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.270.000	
2.10.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.449.925	
2.10.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	61.124.775	
<b>2.10.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>507.078.408</b>	
2.10.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.074.500	
2.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000	
2.10.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000	
2.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.503.908	
<b>2.10.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>228.683.750</b>	
2.10.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.605.850	
2.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.780.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.10.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.297.900	
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>112.337.478</b>	
<b>2.10.04.2.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>112.337.478</b>	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	112.337.478	
<b>2.10.06</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>89.500.500</b>	
<b>2.10.06.2.01</b>	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>89.500.500</b>	
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	89.500.500	
<b>2.10.09</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>176.705.218</b>	
<b>2.10.09.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	<b>176.705.218</b>	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	176.705.218	
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>698.489.718</b>	
<b>2.10.10.2.01</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>698.489.718</b>	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	506.847.400	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	191.642.318	
<b>2.10.11</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>	<b>5.769.392.803</b>	
<b>2.10.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>5.769.392.803</b>	
2.10.11.2.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	5.519.392.931	
2.10.11.2.01.08	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	99.999.932	
2.10.11.2.01.09	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	149.999.940	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>42.925.659.909</b>	
<b>2.11.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>42.925.659.909</b>	
<b>2.11.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>33.175.659.909</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.434.973.924</b>	
<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>136.415.000</b>	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.010.000	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.245.000	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.245.000	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.245.000	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.245.000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.425.000	
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.386.591.524</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.066.231.524	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	313.560.000	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.800.000	
<b>2.11.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.250.000</b>	
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000	
<b>2.11.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>136.729.000</b>	
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	136.729.000	
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>339.392.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.750.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000.000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000	
2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.850.000	
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	37.792.000	
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.144.937.400</b>	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	552.500.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	590.637.400	
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.288.659.000</b>	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.242.159.000	
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.500.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>22.470.000</b>	
<b>2.11.02.2.01</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>22.470.000</b>	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	22.470.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>541.682.000</b>	
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>541.682.000</b>	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	231.369.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	310.313.000	
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>14.025.880.700</b>	
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>14.025.880.700</b>	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	13.648.898.700	
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	376.982.000	
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>12.250.000</b>	
<b>2.11.05.2.01</b>	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>12.250.000</b>	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12.250.000	
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>431.291.000</b>	
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>431.291.000</b>	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	365.091.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66.200.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>544.261.000</b>	
<b>2.11.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>544.261.000</b>	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	142.231.000	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	402.030.000	
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>178.030.000</b>	
<b>2.11.09.2.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>178.030.000</b>	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	178.030.000	
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>2.11.10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	25.000.000	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>2.959.821.285</b>	
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>2.959.821.285</b>	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	162.315.000	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	415.797.500	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2.381.708.785	
<b>2.11.1.03.0.00.01.0001</b>	<b>UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN</b>	<b>9.750.000.000</b>	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>9.750.000.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>9.565.623.600</b>	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	9.565.623.600	
<b>2.11.11.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>184.376.400</b>	
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	184.376.400	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>12.563.691.233</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>12.563.691.233</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>12.563.691.233</b>	
<b>2.12.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.936.435.024</b>	
<b>2.12.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>95.523.902</b>	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.010.863	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.824.713	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.824.100	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.823.888	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.825.000	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.215.338	
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.052.373.799</b>	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.877.489.974	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	172.180.000	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.703.825	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.12.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>684.391.875</b>	
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	674.247.125	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.144.750	
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.816.807.819</b>	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.273.873	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.977.705.246	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	458.934.300	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.894.400	
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>471.906.400</b>	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.375.000	
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	456.531.400	
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>405.208.229</b>	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.515.367	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.568.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.124.862	
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>410.223.000</b>	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.182.000	
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.675.000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.726.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.640.000	
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>1.547.881.750</b>	
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1.547.881.750</b>	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	45.245.000	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.442.111.300	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	60.525.450	
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>354.802.913</b>	
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>294.336.663</b>	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	229.939.463	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	64.397.200	
<b>2.12.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>60.466.250</b>	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	60.466.250	
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>644.197.681</b>	
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>283.478.731</b>	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	216.163.888	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	67.314.843	
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>360.718.950</b>	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	360.718.950	
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>80.373.865</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>80.373.865</b>	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	80.373.865	
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>24.282.249.300</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN</b>	<b>24.282.249.300</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN</b>	<b>24.282.249.300</b>	
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.327.522.700</b>	
<b>2.13.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>106.910.000</b>	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.185.000	
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.590.000	
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.590.000	
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.590.000	
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.590.000	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.365.000	
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.981.493.600</b>	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.732.658.600	
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	231.625.000	
2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.260.000	
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.950.000	
<b>2.13.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>494.105.000</b>	
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	494.105.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>556.042.400</b>	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.283.900	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	192.410.500	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.180.000	
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.975.000	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.203.000	
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.900.000	
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26.090.000	
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>465.699.700</b>	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.140.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.300.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.259.700	
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>723.272.000</b>	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	419.172.000	
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	12.500.000	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	229.700.000	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.900.000	
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>13.410.047.050</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>13.410.047.050</b>	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	35.630.000	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	21.690.000	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	156.170.000	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.115.787.200	
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	17.200.000	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	183.977.750	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	8.578.405.000	
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16.635.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	74.230.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1.733.911.100	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	84.298.000	
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	6.648.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	385.465.000	
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>3.544.679.550</b>	
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.544.679.550</b>	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	233.156.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	90.709.800	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	87.597.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.697.694.000	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.435.522.750	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>5.703.186.120</b>	
<b>2.08.2.14.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>5.703.186.120</b>	
<b>2.08.2.14.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>5.703.186.120</b>	
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>70.691.938</b>	
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70.691.938</b>	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	70.691.938	
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>4.493.961.602</b>	
<b>2.14.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>953.136.000</b>	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	953.136.000	
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.540.825.602</b>	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3.487.146.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	53.679.602	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.138.532.580</b>	
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>658.117.080</b>	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	624.952.750	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	33.164.330	
<b>2.14.04.2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>480.415.500</b>	
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	412.800.000	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	31.950.850	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	35.664.650	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>17.104.520.378</b>	
<b>2.15.0.00.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>17.104.520.378</b>	
<b>2.15.0.00.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>14.797.315.378</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.543.261.128</b>	
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>193.624.000</b>	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.315.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.250.000	
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.050.000	
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.600.000	
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.600.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.100.000	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.709.000	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.255.491.528</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.915.266.528	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	309.400.000	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.825.000	
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>77.408.200</b>	
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56.908.200	
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.500.000	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>493.351.200</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.109.200	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.725.000	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.615.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.200.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.600.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	900.000	
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	39.202.000	
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>70.925.000</b>	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	24.850.000	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.075.000	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>718.289.200</b>	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.460.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.829.200	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>734.172.000</b>	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	617.622.000	
2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	12.250.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.800.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.500.000	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>4.254.054.250</b>	
<b>2.15.02.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota</b>	<b>44.925.000</b>	
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	44.925.000	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.509.554.000</b>	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	181.713.750	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	490.957.500	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	23.950.500	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.812.932.250	
<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>261.916.000</b>	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	194.395.000	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	67.521.000	
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>845.635.750</b>	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	40.400.000	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	631.534.250	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	34.804.000	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	138.897.500	
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>75.966.000</b>	
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	17.450.000	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	35.236.000	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	23.280.000	
<b>2.15.02.2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan</b>	<b>195.140.000</b>	
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	154.940.000	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	40.200.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>309.892.500</b>	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	309.892.500	
<b>2.15.02.2.14</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.025.000</b>	
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11.025.000	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>1.251.327.900</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>1.251.327.900</b>	
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.251.327.900</b>	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.013.005.400	
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33.762.500	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	204.560.000	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN</b>	<b>1.055.877.100</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>1.055.877.100</b>	
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>1.055.877.100</b>	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	65.058.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	990.819.100	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>16.035.912.892</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>16.035.912.892</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>16.035.912.892</b>	
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.457.049.967</b>	
<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>49.590.000</b>	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.109.000	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.061.000	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.150.000	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.150.000	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.150.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.970.000	
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.064.324.742</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.846.825.742	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	205.399.000	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.100.000	
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>45.557.075</b>	
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45.557.075	
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>229.418.500</b>	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.388.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.750.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.500.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.750.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.807.000	
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.170.500	
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.053.000	
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.791.044.650</b>	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.281.250	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.493.740.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.023.400	
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>277.115.000</b>	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.340.000	
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.775.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.000.000	
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>931.059.200</b>	
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>931.059.200</b>	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	150.261.400	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	28.900.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	464.975.000	
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	212.747.800	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	11.885.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	62.290.000	
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>4.647.803.725</b>	
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.145.772.400</b>	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.145.772.400	
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.502.031.325</b>	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	268.502.800	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	628.982.400	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	811.431.400	
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1.111.843.200	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	430.801.725	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	250.469.800	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>9.264.966.360</b>	
<b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>9.264.966.360</b>	
<b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>9.264.966.360</b>	
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.544.442.811</b>	
<b>2.17.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>148.827.500</b>	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.577.500	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.843.750	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.843.750	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.968.750	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.031.250	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.562.500	
<b>2.17.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.876.633.788</b>	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.694.813.788	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168.760.000	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.060.000	
<b>2.17.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>36.240.000</b>	
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36.240.000	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>472.124.030</b>	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.886.000	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.821.400	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.529.030	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.487.350	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.750.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.510.000	
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.897.750	
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	115.242.500	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>558.559.873</b>	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.450.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.300.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	442.809.873	
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>452.057.620</b>	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.135.800	
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	21.250.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.140.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	179.531.820	
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>29.400.000</b>	
<b>2.17.02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29.400.000</b>	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.400.000	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>33.520.500</b>	
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>33.520.500</b>	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	33.520.500	
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>119.070.500</b>	
<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>119.070.500</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	119.070.500	
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>743.647.655</b>	
<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>743.647.655</b>	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	743.647.655	
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>771.491.600</b>	
<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>771.491.600</b>	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	771.491.600	
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>1.512.997.994</b>	
<b>2.17.07.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1.512.997.994</b>	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	741.988.844	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	91.394.350	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	80.816.200	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	598.798.600	
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>510.395.300</b>	
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>510.395.300</b>	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	510.395.300	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>13.176.026.145</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.18.0.00.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>13.176.026.145</b>	
<b>2.18.0.00.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>13.176.026.145</b>	
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.545.541.095</b>	
<b>2.18.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>119.155.000</b>	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.900.000	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.412.500	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.412.500	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.225.000	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.225.000	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.980.000	
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.790.341.295</b>	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.553.778.198	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	232.288.000	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.275.097	
<b>2.18.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>814.697.500</b>	
2.18.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	814.697.500	
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>883.028.900</b>	
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	883.028.900	
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>544.464.600</b>	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.174.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.805.100	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.050.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.962.500	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.869.000	
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	123.740.000	
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26.864.000	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>849.733.800</b>	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.240.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	367.800.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	460.693.800	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>544.120.000</b>	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	292.170.000	
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.750.000	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.200.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.000.000	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>434.931.250</b>	
<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>274.007.050</b>	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	196.670.800	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	77.336.250	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>160.924.200</b>	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	160.924.200	
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>517.260.000</b>	
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>517.260.000</b>	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	246.074.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	271.186.000	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>941.074.600</b>	
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>941.074.600</b>	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	62.138.200	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	764.022.800	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	3.340.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	111.573.600	
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>611.947.800</b>	
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>611.947.800</b>	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	235.807.600	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	326.462.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	49.678.200	
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>125.271.400</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>125.271.400</b>	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	125.271.400	
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>13.268.169.550</b>	
<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>13.268.169.550</b>	
<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>13.268.169.550</b>	
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.682.354.549</b>	
<b>2.19.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>127.207.356</b>	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.959.559	
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.169.790	
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.169.543	
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.419.518	
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.419.518	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.069.428	
<b>2.19.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.537.019.718</b>	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.375.971.200	
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.720.000	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.328.518	
<b>2.19.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>196.089.465</b>	
2.19.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	181.089.465	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	
<b>2.19.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>308.214.354</b>	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.766.300	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.772.200	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.983.241	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.952.419	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.840.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.826.000	
2.19.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.074.194	
<b>2.19.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>38.706.000</b>	
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	38.706.000	
<b>2.19.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>207.657.656</b>	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.057.656	
<b>2.19.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>267.460.000</b>	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.260.000	
2.19.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	7.500.000	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.700.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>1.465.180.635</b>	
<b>2.19.02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>1.181.015.791</b>	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	871.892.989	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	218.175.929	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	56.276.770	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	34.670.103	
<b>2.19.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>284.164.844</b>	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	284.164.844	
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>5.540.419.479</b>	
<b>2.19.03.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>438.104.923</b>	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	438.104.923	
<b>2.19.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.024.774.370</b>	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.024.774.370	
<b>2.19.03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>1.522.691.559</b>	
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	682.241.908	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	390.449.805	
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	449.999.846	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.19.03.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>1.367.149.929</b>	
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	245.130.244	
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	1.122.019.685	
<b>2.19.03.2.05</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>1.187.698.698</b>	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	520.761.861	
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	666.936.837	
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>580.214.887</b>	
<b>2.19.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>580.214.887</b>	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	580.214.887	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>193.196.500</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>193.196.500</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>193.196.500</b>	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>193.196.500</b>	
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>193.196.500</b>	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	105.234.000	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	6.570.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	6.120.000	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	75.272.500	
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>164.918.000</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>164.918.000</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.2.20.2.21.01.0000	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>164.918.000</b>	
2.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>164.918.000</b>	
2.21.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>164.918.000</b>	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	164.918.000	
2.22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>23.650.945.436</b>	
1.03.1.04.0.00.01.0000	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>1.034.582.000</b>	
1.03.1.04.0.00.01.0000	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>1.034.582.000</b>	
2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.034.582.000</b>	
2.22.08.2.05	<b>Pengelolaan Taman Budaya</b>	<b>1.034.582.000</b>	
2.22.08.2.05.02	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	1.034.582.000	
2.22.00.0.00.01.0000	<b>DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)</b>	<b>20.852.093.436</b>	
2.22.00.0.00.01.0000	<b>DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)</b>	<b>19.254.683.433</b>	
2.22.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.938.118.883</b>	
2.22.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>92.304.000</b>	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.315.000	
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.989.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.22.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.246.202.562</b>	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.059.492.562	
2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.600.000	
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.110.000	
<b>2.22.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>532.161.150</b>	
2.22.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	532.161.150	
<b>2.22.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>207.759.100</b>	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.181.000	
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.240.000	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.455.000	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.630.000	
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.825.000	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.248.000	
2.22.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.180.100	
<b>2.22.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>460.093.000</b>	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.740.000	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	383.353.000	
<b>2.22.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>399.599.071</b>	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.399.071	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.500.000	
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.200.000	
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.500.000	
<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>12.316.564.550</b>	
<b>2.22.08.2.01</b>	<b>Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman</b>	<b>1.470.815.560</b>	
2.22.08.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	369.418.560	
2.22.08.2.01.02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	430.625.000	
2.22.08.2.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	670.772.000	
<b>2.22.08.2.04</b>	<b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>	<b>340.610.650</b>	
2.22.08.2.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	340.610.650	
<b>2.22.08.2.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>717.614.500</b>	
2.22.08.2.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	717.614.500	
<b>2.22.08.2.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>9.787.523.840</b>	
2.22.08.2.09.02	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	973.000.000	
2.22.08.2.09.03	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	279.905.000	
2.22.08.2.09.04	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	151.648.900	
2.22.08.2.09.05	Penghargaan Seniman dan Budayawan	215.775.000	
2.22.08.2.09.06	Festival Kebudayaan Yogyakarta	353.480.540	
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	2.788.603.400	
2.22.08.2.09.08	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	405.000.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.22.08.2.09.09	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	534.400.000	
2.22.08.2.09.10	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	2.611.402.000	
2.22.08.2.09.12	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	597.709.000	
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	876.600.000	
<b>2.22.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI</b>	<b>1.597.410.003</b>	
<b>2.22.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>1.597.410.003</b>	
<b>2.22.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	<b>1.597.410.003</b>	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1.597.410.003	
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>1.200.000.000</b>	
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>1.200.000.000</b>	
<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.200.000.000</b>	
<b>2.22.08.2.08</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>1.200.000.000</b>	
2.22.08.2.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1.200.000.000	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN</b>	<b>265.485.000</b>	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN</b>	<b>265.485.000</b>	
<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>265.485.000</b>	
<b>2.22.08.2.08</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>265.485.000</b>	
2.22.08.2.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	265.485.000	
<b>3.30.3.31.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>298.785.000</b>	
<b>3.30.3.31.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>298.785.000</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>298.785.000</b>	
2.22.08.2.08	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>298.785.000</b>	
2.22.08.2.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	298.785.000	
2.23	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>8.385.760.656</b>	
2.23.2.24.0.00.01.0000	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>8.385.760.656</b>	
2.23.2.24.0.00.01.0000	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>8.385.760.656</b>	
2.23.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.763.846.356</b>	
2.23.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>31.255.000</b>	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.330.000	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.037.500	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.037.500	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.037.500	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.037.500	
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.775.000	
2.23.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.341.255.556</b>	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.148.154.556	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	191.051.000	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.050.000	
2.23.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.250.000</b>	
2.23.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.250.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.23.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>188.784.000</b>	
2.23.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	188.784.000	
<b>2.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>284.041.000</b>	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.694.000	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.921.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.000.000	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.950.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.630.000	
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.256.000	
2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28.590.000	
<b>2.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>479.767.500</b>	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.750.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.000.000	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.017.500	
<b>2.23.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>437.493.300</b>	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.793.300	
2.23.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.700.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>621.289.300</b>	
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>616.874.800</b>	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	264.696.600	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	4.910.000	
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	12.340.000	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	625.000	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	206.050.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	127.053.200	
<b>2.23.02.2.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.414.500</b>	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.072.000	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	3.342.500	
<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>625.000</b>	
<b>2.23.03.2.01</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>625.000</b>	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	625.000	
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>289.331.400</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>289.331.400</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>289.331.400</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>283.057.000</b>	
<b>2.24.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>192.693.800</b>	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	27.029.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	165.664.800	
<b>2.24.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>31.000.000</b>	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	31.000.000	
<b>2.24.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>59.363.200</b>	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	59.363.200	
<b>2.24.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>6.274.400</b>	
<b>2.24.03.2.01</b>	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b>	<b>3.741.000</b>	
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	3.741.000	
<b>2.24.03.2.03</b>	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	<b>2.533.400</b>	
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1.120.000	
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubarhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1.413.400	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>1.934.605.227</b>	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN</b>	<b>1.934.605.227</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN</b>	<b>1.803.637.227</b>	
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>161.565.750</b>	
<b>3.25.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>161.565.750</b>	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	161.565.750	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1.582.359.853</b>	
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>492.875.000</b>	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	84.750.000	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	225.810.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	182.315.000	
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1.089.484.853</b>	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.484.853	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.068.000.000	
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>59.711.624</b>	
<b>3.25.06.2.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>36.496.124</b>	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	36.496.124	
<b>3.25.06.2.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>23.215.500</b>	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.215.500	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.2.09.3.25.01.0012	<b>UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERIKANAN</b>	<b>130.968.000</b>	
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>60.192.082</b>	
3.25.04.2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>60.192.082</b>	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.192.082	
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>70.775.918</b>	
3.25.06.2.03	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>70.775.918</b>	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.775.918	
3.26	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>16.711.564.718</b>	
3.26.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>16.711.564.718</b>	
3.26.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>16.711.564.718</b>	
3.26.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.559.947.118</b>	
3.26.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>192.360.000</b>	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.232.500	
3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.177.500	
3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.215.000	
3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.215.000	
3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.215.000	
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.305.000	
3.26.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.834.393.598</b>	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.619.208.598	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.680.000	
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.505.000	
<b>3.26.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>478.853.060</b>	
3.26.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	478.853.060	
<b>3.26.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>282.144.050</b>	
3.26.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	274.964.050	
3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.180.000	
<b>3.26.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>460.212.720</b>	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.167.500	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.000.000	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.106.720	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	121.878.000	
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.187.500	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.873.000	
<b>3.26.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>931.588.690</b>	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.904.500	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.000.000	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	725.684.190	
<b>3.26.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>380.395.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.820.000	
3.26.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.450.000	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.125.000	
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>3.419.015.250</b>	
<b>3.26.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>1.126.045.000</b>	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.126.045.000	
<b>3.26.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>2.280.920.250</b>	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.158.895.250	
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	84.560.000	
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	37.465.000	
<b>3.26.02.2.04</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.050.000</b>	
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	12.050.000	
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>2.089.154.250</b>	
<b>3.26.03.2.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>2.089.154.250</b>	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	396.735.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.268.167.000	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	157.550.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	266.702.250	
<b>3.26.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>2.625.000</b>	
<b>3.26.04.2.01</b>	<b>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.625.000</b>	
3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	2.625.000	
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>2.640.823.100</b>	
<b>3.26.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>2.640.823.100</b>	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	63.990.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	388.418.600	
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1.322.960.500	
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	350.334.000	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	515.120.000	
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>47.224.901.548</b>	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN</b>	<b>47.224.901.548</b>	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN</b>	<b>45.794.952.048</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>36.467.349.785</b>	
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>123.273.745</b>	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.973.875	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.877.500	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.582.370	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.502.500	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.582.500	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.755.000	
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>32.518.714.920</b>	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.840.000.000	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	656.420.000	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22.294.920	
<b>3.27.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>322.365.770</b>	
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	309.746.270	
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.619.500	
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>378.927.150</b>	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.725.000	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.600.000	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.837.650	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.592.000	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.375.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.850.000	
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.070.000	
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.877.500	
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.926.238.200</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.100.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.000.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.673.138.200	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.197.830.000</b>	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.019.500.000	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.830.000	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.500.000	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>3.607.254.895</b>	
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>2.790.025.495</b>	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	524.742.500	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.265.282.995	
<b>3.27.02.2.03</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>817.229.400</b>	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	817.229.400	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>3.572.051.593</b>	
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>221.090.498</b>	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	221.090.498	
<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>3.350.961.095</b>	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	662.202.150	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyaluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1.941.379.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	747.379.945	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>553.974.875</b>	
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>399.609.000</b>	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	399.609.000	
<b>3.27.04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>154.365.875</b>	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	116.461.000	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	37.904.875	
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>537.414.900</b>	
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>537.414.900</b>	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	425.869.900	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	111.545.000	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1.056.906.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>1.056.906.000</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	611.742.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	232.667.500	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	212.496.500	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0001</b>	<b>UPT BALAI PENYULUHAN, PERTANIAN, PANGAN, DAN, PERIKANAN/BP4 WILAYAH I (KEC. MOYUDAN DAN MINGGI)</b>	<b>106.400.000</b>	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>106.400.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>106.400.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	106.400.000	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0002</b>	<b>UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH II</b>	<b>98.440.000</b>	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>98.440.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>98.440.000</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	98.440.000	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0003</b>	<b>UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH III</b>	<b>110.681.000</b>	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>110.681.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>110.681.000</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	110.681.000	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0004</b>	<b>UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH IV</b>	<b>96.188.000</b>	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>96.188.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>96.188.000</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	96.188.000	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0005</b>	<b>UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH V</b>	<b>100.105.000</b>	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>100.105.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>100.105.000</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	100.105.000	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0006</b>	<b>UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH VI</b>	<b>92.823.000</b>	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>92.823.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>92.823.000</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	92.823.000	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0007</b>	<b>UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH VII</b>	<b>95.578.000</b>	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>95.578.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>95.578.000</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	95.578.000	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0008</b>	<b>UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH VIII</b>	<b>91.352.500</b>	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>91.352.500</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>91.352.500</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	91.352.500	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0009</b>	<b>UPT PASAR HEWAN AMBARKETAWANG DAN RUMAH POTONG HEWAN</b>	<b>89.820.000</b>	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>89.820.000</b>	
<b>3.27.04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>89.820.000</b>	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	89.820.000	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0010</b>	<b>UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN</b>	<b>366.548.500</b>	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>366.548.500</b>	
<b>3.27.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>366.548.500</b>	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	366.548.500	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0011</b>	<b>UPT SUB TERMINAL AGRIBISNIS</b>	<b>182.013.500</b>	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>182.013.500</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>182.013.500</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	182.013.500	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>38.080.082.378</b>	
<b>3.30.3.31.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>38.080.082.378</b>	
<b>3.30.3.31.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>36.725.005.128</b>	
<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>25.747.016.028</b>	
<b>3.30.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>156.240.000</b>	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.855.000	
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.965.000	
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.670.000	
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.820.000	
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.820.000	
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.110.000	
<b>3.30.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.491.800.660</b>	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.027.579.460	
3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	450.407.200	
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.762.000	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12.052.000	
<b>3.30.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.640.282.668</b>	
3.30.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.640.282.668	
<b>3.30.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>534.823.900</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.626.400	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	257.979.000	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.850.500	
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.500.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.720.000	
3.30.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.918.000	
3.30.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	32.230.000	
<b>3.30.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.116.047.600</b>	
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.700.000	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.152.000.000	
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.125.000	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.800.222.600	
<b>3.30.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>807.821.200</b>	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	676.708.000	
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.500.000	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.613.200	
<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>318.720.184</b>	
<b>3.30.02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>158.645.184</b>	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	158.645.184	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>3.30.02.2.02</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>63.720.000</b>	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	63.720.000	
<b>3.30.02.2.06</b>	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>96.355.000</b>	
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	96.355.000	
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>7.003.775.492</b>	
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>6.110.567.808</b>	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.756.744.000	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.353.823.808	
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>893.207.684</b>	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	614.832.684	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	278.375.000	
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>239.750.000</b>	
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>224.305.000</b>	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	75.750.000	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	148.555.000	
<b>3.30.04.2.03</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.445.000</b>	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	15.445.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>610.833.500</b>	
<b>3.30.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>610.833.500</b>	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	12.085.000	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	404.520.000	
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	118.478.500	
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	75.750.000	
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>2.804.909.924</b>	
<b>3.30.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>2.804.909.924</b>	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	797.558.928	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.843.305.496	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	164.045.500	
<b>3.30.3.31.0.00.01.0001</b>	<b>UPT PELAYANAN PASAR WILAYAH I</b>	<b>92.743.200</b>	
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>92.743.200</b>	
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>92.743.200</b>	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	92.743.200	
<b>3.30.3.31.0.00.01.0002</b>	<b>UPT PELAYANAN PASAR WILAYAH II</b>	<b>179.469.000</b>	
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>179.469.000</b>	
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>179.469.000</b>	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	179.469.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.30.3.31.0.00.01.0003	<b>UPT PELAYANAN PASAR WILAYAH III</b>	<b>181.356.800</b>	
3.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>181.356.800</b>	
3.30.03.2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>181.356.800</b>	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	181.356.800	
3.30.3.31.0.00.01.0004	<b>UPT PELAYANAN PASAR WILAYAH IV</b>	<b>259.871.000</b>	
3.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>259.871.000</b>	
3.30.03.2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>259.871.000</b>	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	259.871.000	
3.30.3.31.0.00.01.0005	<b>UPT PELAYANAN PASAR WILAYAH V</b>	<b>294.169.350</b>	
3.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>294.169.350</b>	
3.30.03.2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>294.169.350</b>	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	294.169.350	
3.30.3.31.0.00.01.0006	<b>UPT PELAYANAN METROLOGI LEGAL</b>	<b>347.467.900</b>	
3.30.06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>347.467.900</b>	
3.30.06.2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>347.467.900</b>	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	347.467.900	
3.31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>1.598.060.404</b>	
3.30.3.31.0.00.01.0000	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>1.598.060.404</b>	
3.30.3.31.0.00.01.0000	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>1.598.060.404</b>	
3.31.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1.203.424.404</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>1.203.424.404</b>	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	88.653.000	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	812.624.904	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	302.146.500	
<b>3.31.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>164.100.000</b>	
<b>3.31.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>164.100.000</b>	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	164.100.000	
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>230.536.000</b>	
<b>3.31.04.2.01</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>230.536.000</b>	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	145.497.000	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	85.039.000	
<b>3.32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>1.001.940.651</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.001.940.651</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.001.940.651</b>	
<b>3.32.03</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>1.001.940.651</b>	
<b>3.32.03.2.01</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.001.940.651</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	153.200.000	
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	684.017.201	
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	164.723.450	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>53.804.460.874</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN</b>	<b>589.950.000</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN</b>	<b>589.950.000</b>	
<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>589.950.000</b>	
<b>4.01.04.2.09</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan</b>	<b>589.950.000</b>	
4.01.04.2.09.02	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	589.950.000	
<b>4.01.5.06.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>53.214.510.874</b>	
<b>4.01.5.06.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>53.214.510.874</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>41.272.634.224</b>	
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>220.055.000</b>	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	163.704.000	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.369.000	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.369.000	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.369.000	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.369.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.875.000	
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>21.090.638.964</b>	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.552.428.964	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	525.220.000	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.990.000	
<b>4.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>17.360.000</b>	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.360.000	
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah</b>	<b>1.103.973.800</b>	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiyan	1.086.258.800	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.715.000	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.982.482.000</b>	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.818.300	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	484.400.000	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	238.360.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	422.095.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	202.080.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	213.497.500	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.284.520.000	
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	58.711.200	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.769.500.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.652.500.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.500.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.500.000	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.296.951.600</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	109.302.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.441.200.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.746.449.600	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.826.252.400</b>	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.377.646.400	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	40.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.050.000	
4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	13.500.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	222.056.000	
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.394.211.060</b>	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	178.746.360	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	165.200.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	74.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	976.264.700	
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>4.050.271.700</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	266.152.300	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	206.529.870	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.577.589.530	
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>726.782.000</b>	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	142.724.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.000.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	129.238.000	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	259.820.000	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	95.000.000	
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>794.155.700</b>	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	57.540.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	311.737.500	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	424.878.200	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>8.533.012.800</b>	
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>3.968.564.100</b>	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.946.255.500	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	360.727.600	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	661.581.000	
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>2.920.000.000</b>	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.520.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	985.447.260	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	414.552.740	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>1.486.177.100</b>	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	466.607.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	712.000.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	307.570.100	
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>158.271.600</b>	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	152.841.600	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5.430.000	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>3.008.863.850</b>	
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>367.074.000</b>	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	115.370.250	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	210.000.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	41.703.750	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>820.859.250</b>	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	150.145.500	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	120.537.750	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	550.176.000	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.573.300.600</b>	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.284.320.600	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	188.150.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.830.000	
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>247.630.000</b>	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	247.630.000	
<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>400.000.000</b>	
<b>4.01.04.2.01</b>	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>200.000.000</b>	
4.01.04.2.01.05	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Sleman	125.000.000	
4.01.04.2.01.12	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	75.000.000	
<b>4.01.04.2.02</b>	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>200.000.000</b>	
4.01.04.2.02.03	Implementasi Budaya Pemerintahan Sleman	200.000.000	
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>97.884.613.699</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>97.884.613.699</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>97.884.613.699</b>	
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>48.376.893.299</b>	
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>76.884.747</b>	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.092.000	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.181.247	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.611.500	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.580.075.140</b>	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.421.765.140	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	153.910.000	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.400.000	
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.172.158.080</b>	
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.755.544.080	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	416.614.000	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5.539.661.838</b>	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.275.000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.170.619.738	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	563.980.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	173.862.100	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	448.120.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.037.575.000	
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	116.705.000	
4.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.525.000	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>528.000.000</b>	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	528.000.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.488.702.000</b>	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.631.376.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	857.326.000	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.003.979.000</b>	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	732.380.000	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	25.000.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	276.558.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	970.041.000	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>27.091.630.704</b>	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.586.913.536	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	324.717.168	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	180.000.000	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>3.895.801.790</b>	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3.895.801.790	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>49.507.720.400</b>	
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>17.756.975.000</b>	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.249.141.500	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9.451.440.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.549.516.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	3.934.710.000	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	1.572.167.500	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>2.453.615.000</b>	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	357.247.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	276.884.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	528.877.500	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	354.247.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	936.359.500	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>6.816.396.500</b>	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.475.165.000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.942.026.500	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.744.642.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.654.563.000	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>6.648.966.900</b>	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	3.156.207.900	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.100.090.500	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	345.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	409.660.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	169.547.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.468.461.500	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>15.004.062.500</b>	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	15.004.062.500	
<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>635.033.500</b>	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	635.033.500	
<b>4.02.02.2.07</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>192.671.000</b>	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	192.671.000	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>13.016.706.431</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>13.016.706.431</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>13.016.706.431</b>	
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.297.602.760</b>	
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.493.908</b>	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.662.000	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.073.160	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	624.938	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.624.635	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.294.425	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.214.750	
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.728.479.978</b>	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.506.272.478	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	214.760.000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.447.500	
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>338.364.795</b>	
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	326.364.795	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>779.060.015</b>	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.755.348	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	294.769.200	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.758.185	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.305.282	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.850.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.712.000	
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.910.000	
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>586.383.528</b>	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.600.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.283.528	
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>841.820.536</b>	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.769.200	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.250.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.750.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	460.051.336	
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.819.379.323</b>	
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.224.169.070</b>	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	42.327.500	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	88.232.420	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	75.699.775	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	161.401.125	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	440.819.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	415.689.250	
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>373.143.003</b>	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	90.319.995	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	282.823.008	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>222.067.250</b>	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	111.724.750	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	110.342.500	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>899.724.348</b>	
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>258.888.950</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	113.282.500	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	70.322.500	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.979.950	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	42.994.500	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.309.500	
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>235.556.348</b>	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	47.369.025	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	86.787.500	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	101.399.823	
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah</b>	<b>405.279.050</b>	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.665.375	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.381.425	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah	30.776.750	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	260.455.500	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>394.758.483.108</b>	
<b>5.02.0.00.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>394.758.483.108</b>	
<b>5.02.0.00.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>390.295.083.108</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>70.059.059.572</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>204.960.000</b>	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.470.000	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.588.750	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.588.750	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.588.750	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.588.750	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.135.000	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>32.172.206.692</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.167.460.492	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	790.600.000	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	214.146.200	
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.005.076.000</b>	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.005.076.000	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.194.777.600</b>	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63.000.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	734.513.560	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	347.264.040	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.000.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	948.000.000	
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.230.000.000</b>	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.730.000.000	
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>30.921.351.280</b>	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	257.523.520	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.163.235.560	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.071.200	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.521.000	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.330.688.000</b>	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	825.848.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.600.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	333.240.000	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>300.348.873.336</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>4.005.156.800</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	615.432.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	563.771.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.393.222.500	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	378.262.500	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	54.468.800	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>491.162.400</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	77.562.600	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	171.455.000	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	41.808.800	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20.985.000	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100.249.000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31.002.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	48.100.000	
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>1.219.342.300</b>	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	84.108.800	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	655.357.500	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	367.636.000	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	112.240.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>294.633.211.836</b>	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	228.000.000.000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	18.233.211.836	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	48.400.000.000	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>2.025.009.800</b>	
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2.025.009.800</b>	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	142.623.800	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	327.960.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	691.570.000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	515.892.800	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	346.963.200	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>17.862.140.400</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>17.862.140.400</b>	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	102.725.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	141.120.000	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.383.664.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.208.995.000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	293.661.200	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	604.070.400	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	449.350.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	10.591.207.000	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	44.405.000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.962.775.200	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	80.167.600	
<b>5.02.0.00.00.01.0001</b>	<b>UPT PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO</b>	<b>3.542.000.000</b>	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>3.542.000.000</b>	
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>3.542.000.000</b>	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3.542.000.000	
<b>5.02.0.00.00.01.0002</b>	<b>UPT PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL</b>	<b>921.400.000</b>	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>921.400.000</b>	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>921.400.000</b>	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	921.400.000	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>12.272.195.084</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>12.272.195.084</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>12.018.195.084</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.196.666.784</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>127.070.250</b>	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.400.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.000	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	750.000	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.670.250	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.816.460.000</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.546.100.000	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	259.580.000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.780.000	
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>130.035.000</b>	
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	130.035.000	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>386.036.034</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.284.200	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.239.334	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.205.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.797.500	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.765.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.745.000	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>473.551.300</b>	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.360.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.400.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344.791.300	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>263.514.200</b>	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.264.200	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.250.000	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.821.528.300</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1.072.692.300</b>	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	38.700.000	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	859.588.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	145.748.300	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	8.713.000	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	19.943.000	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>628.703.000</b>	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	75.593.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	62.818.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	490.292.000	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>804.900.000</b>	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	693.144.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	111.756.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>315.233.000</b>	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	117.383.000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	197.850.000	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0001</b>	<b>UPT SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>254.000.000</b>	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>254.000.000</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>254.000.000</b>	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	254.000.000	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>8.635.014.700</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>8.635.014.700</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>8.635.014.700</b>	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>8.635.014.700</b>	
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>599.031.450</b>	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	43.486.000	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	555.545.450	
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>8.035.983.250</b>	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	8.035.983.250	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>334.218.440</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>334.218.440</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>334.218.440</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>334.218.440</b>	
<b>5.05.02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>1.434.600</b>	
5.05.02.2.01.15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	1.434.600	
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>332.783.840</b>	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	170.750.000	
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	162.033.840	
<b>5.06</b>	<b>PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>184.950.300</b>	
<b>4.01.5.06.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>184.950.300</b>	
<b>4.01.5.06.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>184.950.300</b>	
<b>5.06.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>184.950.300</b>	
<b>5.06.02.2.01</b>	<b>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>	<b>184.950.300</b>	
5.06.02.2.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	184.950.300	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>7.804.315.712</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>7.804.315.712</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>7.804.315.712</b>	
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.986.281.212</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>67.080.000</b>	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.225.000	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.255.000	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.255.000	
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.255.000	
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.255.000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.835.000	
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.054.370.312</b>	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.915.895.312	
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.235.000	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.240.000	
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>159.714.800</b>	
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	88.234.800	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71.480.000	
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>143.373.000</b>	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.117.000	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.960.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.900.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.916.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.680.000	
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.800.000	
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>331.631.100</b>	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.920.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	263.711.100	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>230.112.000</b>	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.660.000	
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.500.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.952.000	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>488.326.500</b>	
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>301.092.500</b>	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	33.590.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	33.590.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	34.475.500	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	47.252.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	69.755.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	82.430.000	
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>187.234.000</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	187.234.000	
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>329.708.000</b>	
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>6.120.000</b>	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.120.000	
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>323.588.000</b>	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5.645.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35.750.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	246.443.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35.750.000	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>71.131.022.705</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KAPANEWON GAMPING</b>	<b>4.399.894.247</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KAPANEWON GAMPING</b>	<b>4.399.894.247</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.774.068.749</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.137.136</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.914.923	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	675.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	675.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	675.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	675.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.522.213	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.107.118.848</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.027.953.928	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.790.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.374.920	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>95.499.800</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	95.499.800	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>98.550.115</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.597.942	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.111.027	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.454.545	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.009.860	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.925.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.971.816	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.479.925	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>64.000.000</b>	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>231.487.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.240.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.855.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.392.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>149.275.850</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.275.850	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.500.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>105.059.625</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>15.224.800</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.224.800	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>89.834.825</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.219.900	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.999.050	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	79.615.875	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>245.096.998</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>245.096.998</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	142.135.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	102.961.998	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>79.949.725</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>75.259.825</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75.259.825	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>4.689.900</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.689.900	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>97.605.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>97.605.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	97.605.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>98.114.150</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>98.114.150</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.699.850	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.289.950	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.279.950	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.680.875	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.939.875	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.389.900	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.644.950	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.188.800	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.0.00.00.02.0000	<b>KAPANEWON GODEAN</b>	<b>4.385.250.688</b>	
7.01.0.00.00.02.0000	<b>KAPANEWON GODEAN</b>	<b>4.385.250.688</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.758.296.588</b>	
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>53.824.200</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.872.200	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	415.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	365.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	565.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	420.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.187.000	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.202.718.588</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.124.226.588	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.540.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.952.000	
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>39.133.200</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.133.200	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>65.516.600</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.210.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.379.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.201.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.995.600	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.150.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.625.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	956.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>246.834.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.460.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.374.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>150.270.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.520.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.750.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>182.599.900</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyeleggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>11.620.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.620.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>170.979.900</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	32.837.700	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	138.142.200	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>192.020.750</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>192.020.750</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	136.340.750	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.680.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>105.199.950</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100.114.950</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.114.950	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>5.085.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.085.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>78.282.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>78.282.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	78.282.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>68.851.500</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>68.851.500</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.310.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.817.500	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.500	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.480.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	43.045.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.920.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.278.500	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>KAPANEWON MOYUDAN</b>	<b>4.019.942.736</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>KAPANEWON MOYUDAN</b>	<b>4.019.942.736</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.484.606.736</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>57.359.500</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.121.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.625.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.625.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.560.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.250.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.178.500	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.862.444.336</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.779.754.336	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.125.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.565.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.424.000</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.424.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>167.058.900</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.034.700	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.225.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.493.700	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.225.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.170.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.775.500	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.635.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>230.775.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.090.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.185.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>143.545.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.995.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	8.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.550.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>95.551.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>11.970.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.970.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>83.581.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.793.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	79.788.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>193.950.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>193.950.000</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	118.080.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.870.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>70.492.750</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>63.466.750</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	63.466.750	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>7.026.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.026.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>129.480.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>129.480.000</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	129.480.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>45.862.250</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>45.862.250</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.610.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	853.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.382.500	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.800.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.950.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.502.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.019.750	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	745.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>KAPANEWON MINGGIR</b>	<b>4.075.601.840</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>KAPANEWON MINGGIR</b>	<b>4.075.601.840</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.595.641.040</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>90.630.400</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.055.400	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.490.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.490.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.490.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.240.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.865.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.915.510.840</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.835.703.840	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.040.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.767.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>42.760.400</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42.760.400	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>158.233.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.493.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.920.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.060.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.980.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.780.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>245.686.400</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.448.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.880.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.358.400	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>142.820.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.570.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.250.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>107.350.400</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>40.830.400</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.830.400	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>66.520.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8.810.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	57.710.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>137.239.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>137.239.000</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	73.029.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64.210.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>77.490.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>67.240.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	67.240.000	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>10.250.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.250.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>67.852.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>67.852.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	67.852.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>90.029.400</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>90.029.400</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.040.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.740.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.500.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	47.375.400	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.070.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.304.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>KAPANEWON SEYEGAN</b>	<b>4.061.907.249</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>KAPANEWON SEYEGAN</b>	<b>4.061.907.249</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.533.821.299</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>56.105.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.250.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.625.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.625.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.200.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.250.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.155.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.939.428.899</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.859.393.899	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.555.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.480.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.688.500</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.688.500	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>103.470.750</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.709.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.715.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.651.750	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.350.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32.045.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>269.088.150</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.480.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.608.150	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>142.040.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.550.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.350.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.140.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>110.712.200</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>9.850.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.850.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100.862.200</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.170.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	94.692.200	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>198.110.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>198.110.000</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	134.895.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63.215.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>77.200.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>69.740.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	69.740.000	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>7.460.000</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.460.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>84.730.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>84.730.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	84.730.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>57.333.750</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>57.333.750</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.540.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.300.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.850.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.730.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.340.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26.952.500	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.891.250	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.730.000	
<b>7.01.00.0.00.06.0000</b>	<b>KAPANEWON MLATI</b>	<b>4.252.183.782</b>	
<b>7.01.00.0.00.06.0000</b>	<b>KAPANEWON MLATI</b>	<b>4.252.183.782</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.721.712.182</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>76.571.600</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.041.600	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.125.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.125.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	915.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	900.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.465.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.043.307.982</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.961.207.982	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.180.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.920.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>43.101.600</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	43.101.600	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>101.164.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.940.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.347.500	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.125.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.236.500	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.515.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>35.000.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	35.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>255.537.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.820.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.917.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>167.030.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.630.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.400.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>162.951.600</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>35.006.600</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.006.600	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>127.945.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25.250.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	102.695.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>174.805.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>174.805.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	93.275.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.530.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>81.345.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>74.305.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	74.305.000	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>7.040.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.040.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>35.420.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>35.420.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.420.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>75.950.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>75.950.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.400.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.925.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.350.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12.725.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36.430.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.070.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.050.000	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>KAPANEWON DEPOK</b>	<b>4.438.173.720</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>KAPANEWON DEPOK</b>	<b>4.438.173.720</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.744.970.392</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.892.162</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.567.162	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.325.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.140.968.976</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.054.503.976	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.165.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.300.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>72.324.400</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	72.324.400	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>72.205.779</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.809.123	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.718.306	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.158.350	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.200.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.320.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>240.940.575</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.400.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.200.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.340.575	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>189.638.500</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.214.900	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.100.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.823.600	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>162.468.550</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyeleggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>13.909.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.909.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>148.559.550</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.074.650	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	136.484.900	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>267.806.853</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>267.806.853</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	132.174.900	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	135.631.953	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>90.917.140</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>87.083.275</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	87.083.275	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>3.833.865</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.833.865	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>94.109.304</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>94.109.304</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	94.109.304	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>77.901.481</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>77.901.481</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.949.698	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.709.375	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.099.770	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.948.950	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	40.374.863	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.904.500	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.914.325	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>KAPANEWON BERBAH</b>	<b>4.129.332.753</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>KAPANEWON BERBAH</b>	<b>4.129.332.753</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.506.245.753</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>43.774.200</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.464.200	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	900.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.100.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	900.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.510.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.965.117.400</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.885.147.400	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.340.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.630.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>34.581.200</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.581.200	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>83.738.500</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.720.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.640.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.012.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.200.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.676.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.990.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>211.842.058</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.024.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.400.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.418.058	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>167.192.395</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.882.400	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.309.995	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>90.650.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>20.250.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.250.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>70.400.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.000.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	61.400.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>271.872.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>271.872.000</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	134.609.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	137.262.500	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>75.350.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>70.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	70.000.000	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>5.350.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.350.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>121.775.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>121.775.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	121.775.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>63.440.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>63.440.000</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.150.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.700.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.250.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.400.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26.775.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.165.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>KAPANEWON PRAMBANAN</b>	<b>4.317.799.347</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>KAPANEWON PRAMBANAN</b>	<b>4.317.799.347</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.843.087.147</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>49.801.500</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.259.800	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.744.800	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.744.800	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.744.800	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.744.800	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.562.500	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.213.248.497</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.100.864.297	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.540.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36.844.200	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>14.702.500</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.702.500	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>110.122.850</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.942.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.845.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.676.900	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.841.250	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.678.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.735.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.717.200	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.687.500	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>307.021.800</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.471.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>148.190.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.440.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.750.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>142.790.200</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>18.000.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.000.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>124.790.200</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.595.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	120.195.200	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>155.068.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>155.068.000</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	85.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.068.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>53.595.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>52.595.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	52.595.000	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>1.000.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.000.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>48.750.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>48.750.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	48.750.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>74.509.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>74.509.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.720.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.236.500	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.100.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	31.380.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.675.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.397.500	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>KAPANEWON KALASAN</b>	<b>4.229.245.040</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>KAPANEWON KALASAN</b>	<b>4.229.245.040</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.646.331.325</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>31.275.025</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.545.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	802.500	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.222.500	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	618.900	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	529.125	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.557.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.124.553.500</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.045.933.500	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.340.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.280.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>31.226.500</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	31.226.500	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>66.589.500</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.574.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.285.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.725.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.862.500	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.143.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>235.992.800</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.092.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>156.694.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.194.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>136.805.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>18.275.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.275.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>118.530.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	17.230.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	101.300.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>177.534.840</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>177.534.840</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	106.489.865	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	71.044.975	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>77.749.950</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>73.249.950</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	73.249.950	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>4.500.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.500.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>153.682.500</b>	
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>153.682.500</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	153.682.500	
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>37.141.425</b>	
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>37.141.425</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.094.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.080.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.610.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.560.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.937.500	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.704.925	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.500.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.655.000	
7.01.0.00.0.00.11.0000	<b>KAPANEWON NGEMPLAK</b>	<b>4.219.446.772</b>	
7.01.0.00.0.00.11.0000	<b>KAPANEWON NGEMPLAK</b>	<b>4.219.446.772</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.635.977.551</b>	
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>52.885.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.520.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.250.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.100.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.400.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	965.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.650.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.048.388.300</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.956.608.300	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.430.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.350.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.830.000</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.830.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>110.692.951</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.008.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.201.301	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.418.650	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.975.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.340.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.750.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.000.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.000.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>234.788.400</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.720.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.868.400	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>171.392.900</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.660.900	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.690.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.042.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>96.793.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>14.733.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.733.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>82.060.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8.980.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	73.080.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>198.109.375</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>198.109.375</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	120.914.375	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	77.195.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>102.221.900</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>95.571.900</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	95.571.900	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>6.650.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.650.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>103.660.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>103.660.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	103.660.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>82.684.946</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>82.684.946</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.200.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.700.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.975.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.550.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.310.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	31.585.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.439.946	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.925.000	
<b>7.01.0.00.00.12.0000</b>	<b>KAPANEWON NGAGLIK</b>	<b>4.399.772.695</b>	
<b>7.01.0.00.00.12.0000</b>	<b>KAPANEWON NGAGLIK</b>	<b>4.399.772.695</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.793.965.445</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.103.500</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.860.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.099.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	674.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	774.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	774.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.922.500	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.975.286.325</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.897.289.325	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.440.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.557.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>94.761.000</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	94.761.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>94.084.550</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.581.400	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.179.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.726.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.181.250	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.494.400	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.812.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.690.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.700.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	720.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>16.311.500</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	16.311.500	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>248.393.570</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.155.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.800.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.438.570	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>344.025.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.068.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.400.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.565.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.992.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>92.835.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>10.560.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.560.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>82.275.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.540.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	75.735.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>229.342.250</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>229.342.250</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	152.441.750	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76.900.500	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>91.870.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>86.670.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86.670.000	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>5.200.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.200.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>120.485.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>120.485.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120.485.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>71.275.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>71.275.000</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.800.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.725.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.500.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.500.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.900.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.235.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.175.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.440.000	
<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>KAPANEWON SLEMAN</b>	<b>4.287.317.334</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>KAPANEWON SLEMAN</b>	<b>4.287.317.334</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.672.873.834</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>35.852.500</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.762.500	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	875.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	875.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	875.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	875.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.590.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.139.214.920</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.060.395.920	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.370.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.449.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>7.000.000</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>87.353.914</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.511.414	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.375.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.740.500	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.900.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.627.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.200.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>253.913.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.490.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.840.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.583.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>149.539.500</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.609.500	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.430.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.500.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>110.240.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>13.130.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.130.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>97.110.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.050.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	91.010.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.050.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>234.175.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>234.175.000</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	109.075.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	125.100.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>72.225.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>68.350.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	68.350.000	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>3.875.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.875.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>114.850.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>114.850.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	114.850.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>82.953.500</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>82.953.500</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.523.500	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.250.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.475.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.242.500	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.890.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	31.962.500	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.980.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.630.000	
<b>7.01.00.00.00.14.0000</b>	<b>KAPANEWON TEMPEL</b>	<b>3.721.501.036</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.0.00.00.14.0000</b>	<b>KAPANEWON TEMPEL</b>	<b>3.721.501.036</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.262.379.735</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>39.637.826</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.394.848	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	739.778	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	739.778	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	813.780	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	887.783	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.061.859	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.596.707.560</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.513.133.712	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.040.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.533.848	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>90.518.734</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90.518.734	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>134.423.550</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.320.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.002.818	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.782.737	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.623.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.300.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.394.995	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>69.982.218</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9.999.900	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.982.318	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>240.752.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.160.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.360.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.242.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90.357.847</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.000.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.495.097	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.858.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.004.750	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>109.937.793</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>22.184.965</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.184.965	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>87.752.828</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.451.985	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	82.300.843	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>198.879.728</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>198.879.728</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	126.619.900	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.259.828	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>45.560.735</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>37.814.755</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	37.814.755	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>7.745.980</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.745.980	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>55.574.910</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>55.574.910</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.574.910	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>49.168.135</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>49.168.135</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.424.940	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.438.959	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.719.930	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.420.480	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.113.923	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.049.903	
<b>7.01.0.00.00.15.0000</b>	<b>KAPANEWON TURI</b>	<b>4.034.424.133</b>	
<b>7.01.0.00.00.15.0000</b>	<b>KAPANEWON TURI</b>	<b>4.034.424.133</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.458.512.233</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.220.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.970.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	250.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	250.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	250.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.250.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.929.416.673</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.839.091.673	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.525.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.800.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>14.160.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.160.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>75.849.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.309.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.625.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.285.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.400.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.780.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.050.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.900.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>38.000.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	38.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>213.181.560</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.194.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.900.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.087.560	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151.685.000</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.345.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	7.750.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.100.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.490.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>75.635.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>20.300.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.300.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>55.335.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.060.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	49.275.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>273.071.900</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>273.071.900</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	178.425.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94.646.900	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>52.630.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>48.020.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48.020.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>4.610.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.610.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>76.530.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>76.530.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	76.530.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>98.045.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>98.045.000</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.765.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.090.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.640.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.335.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.620.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.640.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.200.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.755.000	
<b>7.01.00.00.00.16.0000</b>	<b>KAPANEWON PAKEM</b>	<b>4.127.962.138</b>	
<b>7.01.00.00.00.16.0000</b>	<b>KAPANEWON PAKEM</b>	<b>4.127.962.138</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.513.366.838</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>57.763.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.463.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.600.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.550.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.850.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.575.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.725.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.002.379.738</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.921.414.738	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.440.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.525.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5.960.000</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.960.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>98.176.900</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.287.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.146.900	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.267.500	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.600.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.440.000	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.735.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.200.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>188.219.200</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.650.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.500.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.069.200	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>160.868.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.508.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.050.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.310.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>110.196.600</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>13.110.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.110.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>97.086.600</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.100.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	89.986.600	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>239.668.200</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>239.668.200</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	125.015.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	114.653.200	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>61.248.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>57.043.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	57.043.000	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>4.205.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.205.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>113.575.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>113.575.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	113.575.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>89.907.500</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>89.907.500</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.305.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.330.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.680.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.095.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.320.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	43.940.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.147.500	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.090.000	
<b>7.01.0.00.00.17.0000</b>	<b>KAPANEWON CANGKRINGAN</b>	<b>4.031.267.195</b>	
<b>7.01.0.00.00.17.0000</b>	<b>KAPANEWON CANGKRINGAN</b>	<b>4.031.267.195</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.508.911.195</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30.633.750</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.272.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	875.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	330.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	987.500	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	330.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.839.250	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.933.483.712</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.843.663.712	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.920.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.900.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>61.828.233</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	61.828.233	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>117.702.200</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.194.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.739.615	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.411.585	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.615.500	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.942.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.980.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.620.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.199.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>191.062.200</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.756.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.706.200	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>174.201.100</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.516.900	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.550.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.550.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.584.200	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>88.914.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>18.290.000</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.290.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>70.624.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.624.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	66.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>186.764.500</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>186.764.500</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	130.644.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.120.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>64.450.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>63.250.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	63.250.000	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>1.200.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.200.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>95.960.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>95.960.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	95.960.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>86.267.500</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>86.267.500</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.390.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.445.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.975.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.440.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.252.500	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14.985.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.320.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.460.000	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>8.624.021.042</b>	
<b>8.01.1.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>8.624.021.042</b>	
<b>8.01.1.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>8.624.021.042</b>	
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.967.235.895</b>	
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>79.045.979</b>	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.394.763	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.659.240	
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.659.240	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.009.948	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.009.790	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.312.998	
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.980.538.898</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.822.548.900	
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	153.240.000	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.749.998	
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>202.572.800</b>	
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	192.572.800	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>132.108.331</b>	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.898.424	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.398.260	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.693.270	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.622.205	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.725.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.438.000	
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.797.199	
8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.535.973	
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.651.200</b>	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.193.040	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.458.160	
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>298.764.177</b>	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.860.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.304.177	
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>251.554.510</b>	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.304.510	
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.950.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.600.000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.700.000	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>497.934.986</b>	
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>497.934.986</b>	
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	57.678.773	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	372.209.925	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	68.046.288	
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>2.247.418.223</b>	

## **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>2.247.418.223</b>	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	26.649.860	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.220.768.363	
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>44.917.090</b>	
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>44.917.090</b>	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	44.917.090	
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>428.749.403</b>	
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>428.749.403</b>	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	215.698.061	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	213.051.342	
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>437.765.445</b>	
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>437.765.445</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	293.141.460	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	144.623.985	

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah tertuang pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

<b>Kode</b>	<b>Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>Target Tahun Anggaran Berkenaan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>155.411.025.306</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>155.411.025.306</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	155.411.025.306
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.000.000.000</b>
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>150.411.025.306</b>

Penyertaan modal sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dialokasikan untuk PUDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dengan tujuan guna menunjang pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kabupaten Sleman.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan prioritas dan plafon anggaran akibat adanya kebijakan pemerintah serta adanya penambahan atau pengurangan sumber-sumber pendapatan dapat dilakukan penambahan/pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam nota kesepakatan prioritas dan plafon anggaran.



**RISALAH/BERITA ACARA**

**PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**TANGGAL 5 OKTOBER 2020**

Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, terdapat perubahan dari rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, baik pendapatan maupun belanja sebagai akibat penambahan pendapatan, penurunan penerimaan pembiayaan, penambahan defisit, pengurangan dan penambahan pagu belanja subkegiatan (termasuk output di dalamnya), dan penambahan pengeluaran pembiayaan yang merupakan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman. Pengurangan dan Penambahan tersebut ditambahkan langsung dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 yang disepakati antara Bupati Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:



**PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN KEGIATAN/PAGU KEGIATAN (TERMASUK OUTPUT DIDALAMNYA)  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO.</b>	<b>JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN</b>	<b>RANCANGAN AWAL (Rp.)</b>	<b>TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)</b>	<b>RANCANGAN AKHIR (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.893.957.194.065</b>	<b>(199.968.009.039)</b>	<b>2.693.989.185.027</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>649.952.865.780</b>	<b>53.904.179.120</b>	<b>703.857.044.900</b>
1	Pajak Daerah	384.539.800.000	55.100.200.000	439.640.000.000
2	Retribusi Daerah	45.248.523.780	(2.486.020.880)	42.762.502.900
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	194.855.142.000	1.290.000.000	196.145.142.000
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.237.350.225.986</b>	<b>(253.872.188.159)</b>	<b>1.983.478.037.828</b>
1	Dana Bagi Hasil	53.293.679.000	(7.428.372.000)	45.865.307.000
2	Dana Alokasi Umum	947.130.689.000	9.471.307.000	956.601.996.000
3	DAK Fisik	225.916.356.359	(161.239.452.359)	64.676.904.000
4	DAK Non Fisik	380.337.668.775	(62.239.359.350)	318.098.309.425
5	Dana Insentif Daerah	73.459.098.000	(36.473.713.000)	36.985.385.000
6	Dana Desa	105.030.876.000	5.525.484.000	110.556.360.000
7	BKK Danais	248.583.171.000	(1.488.082.450)	247.095.088.550
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.024.098.154.019</b>	<b>(179.697.943.686)</b>	<b>2.844.400.210.333</b>
<b>1</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>		<b>(158.865.936.950)</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	607.610.679.081	(56.257.884.000)	551.352.795.081
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	670.200.000	2.266.680.000	2.936.880.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.841.605.000	(1.538.722.000)	302.883.000
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.121.782.000	635.704.000	5.757.486.000
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	377.115.000	26.400.000	403.515.000
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	858.817.000	97.320.000	956.137.000
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	129.920.000	(97.320.000)	32.600.000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	673.612.500	18.080.000	691.692.500
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	819.766.000	(40.449.600)	779.316.400
10	Penambahan Ruang Kelas Baru	660.000.000	16.675.000	676.675.000
11	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	649.771.300	(435.049.300)	214.722.000
12	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	236.549.700	(133.936.700)	102.613.000
13	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.452.428.500	(428.060.500)	2.024.368.000
14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.048.444.500	(991.437.500)	1.057.007.000
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	10.201.005.900	(8.598.975.900)	1.602.030.000
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	610.314.200	(503.852.200)	106.462.000
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	348.560.200	(237.373.200)	111.187.000
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	284.920.400	(131.350.400)	153.570.000
19	Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	268.224.000	468.224.000
20	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.153.216.000	310.050.000	1.463.266.000
21	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8.250.000.000	(2.936.480.000)	5.313.520.000
22	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2.700.278.000	200.000.000	2.900.278.000
23	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	544.208.250	(1.368.250)	542.840.000
24	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	19.870.169.840	(4.697.850.000)	15.172.319.840
25	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	890.500.000	(175.343.000)	715.157.000
26	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	125.834.368.000	(41.258.459.000)	84.575.909.000
27	Penambahan Ruang Kelas Baru	440.000.000	15.812.000	455.812.000
28	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.254.858.000	(1.254.858.000)	0
29	Pembangunan Laboratorium	1.877.379.700	(1.877.379.700)	0

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
30	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	245.682.600	69.232.400	314.915.000
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.444.779.600	(204.794.600)	2.239.985.000
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.062.704.100	(420.191.100)	642.513.000
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	259.187.600	23.317.400	282.505.000
34	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	956.823.500	55.636.500	1.012.460.000
35	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	558.500.000	(42.315.000)	516.185.000
36	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.781.466.000	150.000.000	1.931.466.000
37	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.475.326.400	(3.072.173.400)	403.153.000
38	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3.066.391.500	195.055.000	3.261.446.500
39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.884.400.500	(3.312.900.000)	10.571.500.500
40	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	961.790.250	(105.981.000)	855.809.250
41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	70.373.774.000	(23.323.644.000)	47.050.130.000
42	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	945.266.600	(481.802.600)	463.464.000
43	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.876.458.000	(1.774.216.000)	102.242.000
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.425.744.700	(1.186.652.700)	239.092.000
45	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	161.825.000	438.175.000	600.000.000
46	Pengadaan Mebel PAUD	100.000.000	8.415.000	108.415.000
47	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	380.000.000	(165.823.000)	214.177.000
48	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	22.542.802.000	(5.431.200.000)	17.111.602.000
49	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	946.932.000	(9.600.000)	937.332.000
50	Pengelolaan Dana BOP PAUD	27.092.640.000	(1.767.010.000)	25.325.630.000
51	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	220.000.000	17.031.000	237.031.000
52	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	300.000.000	(37.586.000)	262.414.000
53	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	907.000	100.907.000
54	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	(24.285.000)	75.715.000
55	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40.000.000	(9.950.000)	30.050.000
56	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	155.672.500	(70.771.000)	84.901.500
57	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1.320.521.100	(519.336.100)	801.185.000
58	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	264.128.500	(80.170.500)	183.958.000
59	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.452.537.250	(42.100.000)	2.410.437.250
2	DINAS KESEHATAN		(35.612.789.379)	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	349.638.000	(174.000.000)	175.638.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.200.000	(50.000.000)	87.200.000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	159.022.893.311	(1)	159.022.893.310
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	893.400.000	1.004.016.000	1.897.416.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	305.368.400	41.384.758	346.753.158
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	384.962.000	6.369.875	391.331.875

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.720.000	123.006.017	228.726.017
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	551.468.190	(340)	551.467.850
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	409.420.000	(56.570.650)	352.849.350
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.650.000	(114.190.000)	146.460.000
11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	54.397.800.000	113.000.000.000	167.397.800.000
12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.755.000.000	(13.003.372.990)	9.751.627.010
13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.935.580.000	(4.841.296.360)	5.094.283.640
14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23.765.754.890	(13.386.197.488)	10.379.557.402
15	Pengadaan Obat, Vaksin	22.180.999.500	2.559.303.800	24.740.303.300
16	Pengadaan Bahan Habis Pakai	7.143.245.056	(17.638.880)	7.125.606.176
17	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.135.878.570	(160.000)	1.135.718.570
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.512.799.800	(25.000)	1.512.774.800
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.023.637.000	(19.000)	1.023.618.000
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.116.161.400	(125)	1.116.161.275
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.137.319.000	2.390.000	1.139.709.000
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	681.055.300	(20.500)	681.034.800
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.120.096.000	(20.000)	1.120.076.000
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	465.769.000	(389.000)	465.380.000
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.189.114.500	(300)	1.189.114.200
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	728.219.000	(25.000)	728.194.000
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	494.809.200	933.565	495.742.765
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	181.190.000	22.260.000	203.450.000
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.753.512.700	(415)	3.753.512.285
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	400.511.000	(500)	400.510.500
31	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.864.879.150	(3.040)	1.864.876.110
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	143.957.900	(40.000)	143.917.900
33	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	616.239.350	5.700.000	621.939.350
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	226.799.500	(60.000)	226.739.500
35	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.396.894.430	(60.000)	2.396.834.430
36	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	59.986.943.000	(8.765.130.170)	51.221.812.830
37	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	113.000.000.000	(113.000.000.000)	0
38	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	123.455.200	18.130.000	141.585.200
39	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	547.851.720	1.200.000.000	1.747.851.720
40	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1.000.000.000	(11.953.290)	988.046.710
41	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	188.085.000	(45.125)	188.039.875
42	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.972.128.000	(175.000.220)	3.797.127.780
43	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.178.939.775	(60.000)	1.178.879.775

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
44	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	611.336.600	(5.000)	611.331.600
3	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		<b>(70.098.180.959)</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	251.300.000	2.334.174.850	2.585.474.850
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	341.818.400	27.538.400	369.356.800
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	820.000.000	(22.000.000)	798.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	226.000.000	(3.300.000)	222.700.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	151.812.500	196.812.500
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	(5.000.000)	245.000.000
7	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	689.000.000	(15.600.000)	673.400.000
8	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.800.000.000	(49.225.000)	1.750.775.000
9	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	650.000.000	(13.460.000)	636.540.000
10	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.600.065.600	(11.888.500)	1.588.177.100
11	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	600.000.000	279.990.000	879.990.000
12	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	19.822.683.324	(162.581.100)	19.660.102.224
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	14.233.961.135	(362.834.759)	13.871.126.376
14	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.546.561.550	(7.577.600)	5.538.983.950
15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	475.000.000	(20.690.000)	454.310.000
16	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.769.400.000	(64.615.000)	6.704.785.000
17	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	33.220.744.000	(20.470.921.000)	12.749.823.000
18	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	4.190.000.000	212.600.000	4.402.600.000
19	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	986.250.000	(22.828.000)	963.422.000
20	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	472.500.000	(13.630.000)	458.870.000
21	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	8.500.000.000	(50.556.000)	8.449.444.000
22	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.750.000.000	(17.190.000)	1.732.810.000
23	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	(22.275.000)	977.725.000
24	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	2.631.445.000	(2.346.250)	2.629.098.750
25	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.999.544.000	1.674.877.000	3.674.421.000
26	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	(20.198.000)	1.479.802.000
27	Penataan Bangunan dan Lingkungan	850.000.000	(5.460.000)	844.540.000
28	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	986.000.000	(32.699.000)	953.301.000
29	Pengelolaan Leger Jalan	650.000.000	(22.084.000)	627.916.000
30	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.200.000.000	(28.446.000)	1.171.554.000
31	Pembangunan Jalan	82.399.428.868	(48.884.841.500)	33.514.587.368
32	Pemeliharaan Berkala Jalan	20.159.231.858	(5.602.324.000)	14.556.907.858
33	Pemeliharaan Rutin Jalan	12.940.000.000	4.081.000	12.944.081.000
34	Penggantian Jembatan	19.159.340.000	4.574.569.000	23.733.909.000

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
35	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.010.000.000	86.175.000	2.096.175.000
36	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	747.000.000	(2.025.000)	744.975.000
37	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.440.000.000	(23.795.000)	1.416.205.000
38	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.643.271.200	23.628.000	2.666.899.200
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	8.900.000.000	(74.425.000)	8.825.575.000
40	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	7.150.000.000	(50.030.000)	7.099.970.000
41	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	14.172.250.000	(3.790.008.000)	10.382.242.000
42	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.472.065.600	422.645.000	4.894.710.600
43	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	1.050.000.000	(15.418.000)	1.034.582.000
4	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		<b>2.221.189.100</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.770.000	(3.750)	43.766.250
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.691.000	(75)	2.690.925
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.691.000	(75)	2.690.925
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.691.000	(75)	2.690.925
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.691.000	(75)	2.690.925
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.691.000	(75)	2.690.925
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.185.000	(200)	6.184.800
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.300.000	83.040.000	188.340.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9.625.000	(100)	9.624.900
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.301.600.000	1.541.704.540	2.843.304.540
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.988.900	(4.420)	12.984.480
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.396.000	(202.230)	27.193.770
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.685.000	(9.648.870)	45.036.130
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.221.500	(225)	8.221.275
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	7.500.000	7.500.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.270.000	(33.000)	74.237.000
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.070.000	(8.400)	8.061.600
18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.475.000	(150.000)	14.325.000
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.687.350	(90)	28.687.260
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.100.000	(60.000)	98.040.000
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.750.000	(6.000)	164.744.000
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.981.400	(45)	123.981.355
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	506.450.000	(6.150)	506.443.850
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	59.937.000	129.937.000

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
25	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	740.680.800	194.069.200	934.750.000
26	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban	255.270.000	47.174.375	302.444.375
27	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000	249.850.000	749.850.000
28	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	53.516.500	50.034.820	103.551.320
29	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	45.562.500	(200)	45.562.300
30	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	39.375.000	(180.000)	39.195.000
31	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	171.630.000	(115.000)	171.515.000
32	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	651.930.000	(100.000)	651.830.000
33	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	108.177.000	(14.280)	108.162.720
34	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5.185.000	(347.500)	4.837.500
35	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	49.910.000	(1.240.000)	48.670.000
<b>5</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		<b>420.070.588</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.981.000	1.278.766	66.259.766
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	(30)	1.499.970
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	(30)	1.499.970
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.862.500	(190)	1.862.310
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.862.500	(190)	1.862.310
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.440.000	(17)	14.439.983
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	100.500.000	125.160.000	225.660.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.900.000	(192)	5.899.808
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	169.046.500	(2.440)	169.044.060
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.257.300	(13.375)	11.243.925
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.205.700	(107.426)	62.098.274
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.390.000	(2)	13.389.998
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.800.000	(100.000)	14.700.000
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.217.000	(201.000)	71.016.000
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.073.250	(224)	10.073.026
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	41.030.000	(5)	41.029.995
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.160.000	(48.000)	194.112.000
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	325.372.400	(4.434)	325.367.966
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.620.000	(133.000)	282.487.000
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.100.000	(373.000)	26.727.000

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	(25.150)	14.974.850
22	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	94.750.100	(182)	94.749.918
23	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	225.782.600	(51)	225.782.549
24	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	112.712.500	(125)	112.712.375
25	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	352.880.000	(272)	352.879.728
26	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	337.140.000	(103.620)	337.036.380
27	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	319.347.500	219.887.242	539.234.742
28	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	44.650.000	(80)	44.649.920
29	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	442.405.000	(162)	442.404.838
30	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.177.301.600	(125.610)	1.177.175.990
31	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	670.682.322	(165)	670.682.157
32	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	111.605.000	(16.125)	111.588.875
33	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	207.547.050	(56)	207.546.994
34	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	107.325.000	74.999.733	182.324.733
6	<b>DINAS SOSIAL</b>		<b>3.429.840.889</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.100.000	(44.625)	60.055.375
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.007.500	(130)	1.007.370
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.007.500	(130)	1.007.370
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.007.500	(130)	1.007.370
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.007.500	(130)	1.007.370
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.502.500	(110)	17.502.390
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.800.000	110.940.000	207.740.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.480.000	(190)	7.479.810
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiuan	421.449.400	79.896.388	501.345.788
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.382.600	(3.850)	3.378.750
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	328.000	(152.320)	175.680
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.998.400	(29.330)	71.969.070
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.501.500	(82)	13.501.418
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.550.000	(225.000)	11.325.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.026.000	(9.808.000)	115.218.000
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.480.000	(80.000)	2.400.000
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19.910.000	(468.000)	19.442.000
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.800.000	(100)	29.799.900
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.500.000	0	27.500.000
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.555.800	(26.320)	233.529.480
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	240.896.000	13.150.000	254.046.000
22	Operasional atau Lapangan		0	
23	Pemeliharaan Mebel	1.600.000	0	1.600.000
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.300.000	(4.590.000)	44.710.000

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	99.991.000	111.991.000
26	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75.785.000	(42)	75.784.958
27	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	225.300.000	(50)	225.299.950
28	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	558.940.000	(109)	558.939.891
29	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	679.003.000	(145)	679.002.855
30	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	185.865.000	(112)	185.864.888
31	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.145.480.000	(100)	6.145.479.900
32	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.368.994.500	(150)	3.368.994.350
33	Pemberian Layanan Kedaruratan	164.015.500	629.662.863	793.678.363
34	Pemberian Layanan Rujukan	6.096.620.000	4.575.631.085	10.672.251.085
35	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	142.940.000	(87)	142.939.913
36	Penyediaan Permakanan	3.311.280.000	(2.064.000.179)	1.247.279.821
37	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	410.795.000	(66)	410.794.934
38	Pemberian Layanan Rujukan	164.740.000	(235)	164.739.765
39	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	703.715.000	(182)	703.714.818
40	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	66.205.000	(232)	66.204.768
41	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	76.754.300	(91)	76.754.209
42	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	178.830.000	(185)	178.829.815
43	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39.305.000	(35)	39.304.965
7	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>		<b>136.350.000</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.660.000	136.350.000	255.010.000
8	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		<b>(392.581.899)</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.565.000	(212)	62.564.788
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.435.000	(175)	1.434.825
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.435.000	(175)	1.434.825
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.435.000	(175)	1.434.825
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.435.000	(175)	1.434.825
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.370.000	(1.125)	35.368.875
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.910.718.400	(49.322)	4.910.669.078
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	133.680.100	102.615.400	236.295.500
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.077.000	(177)	33.076.823
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	734.245.200	84.652.000	818.897.200
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	(4.310)	49.995.690
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	(6.912)	49.993.088

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.945.000	59.724.922	224.669.922
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.080.000	(829)	30.079.171
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.055.000	12.495.000	17.550.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.920.000	(84.000)	99.836.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.000.000	24.600.000	318.600.000
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.130.400	(8.300)	467.122.100
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	675.440.000	(6.000)	675.434.000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.782.211	(2.211)	215.780.000
21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	84.947.500	6.499.910	91.447.410
22	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	79.010.500	(25)	79.010.475
23	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.680.000	(125)	65.679.875
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	77.183.098	61.229.827	138.412.925
25	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	91.492.000	(100)	91.491.900
26	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	384.462.700	438.310.000	822.772.700
27	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	52.325.000	77.170.800	129.495.800
28	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	103.935.250	1.000.000	104.935.250
29	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	106.148.750	2.500.000	108.648.750
30	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40.452.500	1.749.850	42.202.350
31	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	46.863.867	1.999.933	48.863.800
32	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	70.692.500	(562)	70.691.938
33	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.074.540.000	(1.121.404.000)	953.136.000
34	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4.121.928.000	(634.782.000)	3.487.146.000
35	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	53.686.000	(6.398)	53.679.602
36	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	34.352.750	590.600.000	624.952.750
37	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	33.164.375	(45)	33.164.330

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
38	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	516.172.000	(103.372.000)	412.800.000
39	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	29.951.000	1.999.850	31.950.850
40	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	35.664.688	(38)	35.664.650
<b>9</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)</b>		<b>193.879.339</b>	
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	43.520.000	(275)	43.519.725
2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	243.907.750	(80)	243.907.670
3	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	147.000.000	(137)	146.999.863
4	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan	302.400.000	11.999.858	314.399.858
5	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	110.937.000	(17.725)	110.919.275
6	Sistem Informasi Penataan Ruang	80.080.000	(235)	80.079.765
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	133.515.000	(555)	133.514.445
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	147.247.250	18.752.605	165.999.855
9	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	305.110.000	40.889.823	345.999.823
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.710.000	(130)	82.709.870
11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.430.000	(192)	1.429.808
12	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.430.000	(192)	1.429.808
13	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.730.000	(222)	1.729.778
14	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.736.000	(92)	9.735.908
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.103.852.009	(85.813.332)	5.018.038.677
16	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.300.000	197.960.000	306.260.000
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.910.000	(290)	1.909.710
18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	514.457.000	(70)	514.456.930
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	(8.310)	2.991.690
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000	10.992.922	26.992.922
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.305.000	(2.147)	90.302.853
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.472.000	(210)	8.471.790
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.350.000	(105.000)	7.245.000
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.700.000	(430.000)	32.270.000
25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.450.000	(75)	3.449.925
26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	61.125.000	(225)	61.124.775

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.075.000	(500)	2.074.500
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.504.000	(92)	380.503.908
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.608.000	(2.150)	155.605.850
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.050.000	(270.000)	43.780.000
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.360.000	(62.100)	29.297.900
32	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	112.337.500	(22)	112.337.478
33	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	176.705.500	(282)	176.705.218
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	506.847.250	150	506.847.400
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	191.642.500	(182)	191.642.318
36	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	5.519.394.000	(1.069)	5.519.392.931
37	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	100.000.000	(68)	99.999.932
38	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	150.000.000	(60)	149.999.940
10	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>(7.288.477.865)</b>	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	9.565.623.600	(9.565.623.600)	0
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	112.392.000	105.192.000	217.584.000
3	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	357.164.500	222.067.700	579.232.200
4	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	18.891.183.000	(13.204.277.750)	5.686.905.250
5	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	212.380.000	61.300.000	273.680.000
6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2.907.317.000	421.035.300	3.328.352.300
7	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	15.308.000	(6.758.000)	8.550.000
8	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.000.000.000	(3.000.000.000)	0
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.200.000	179.360.000	313.560.000
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	107.846.000	28.883.000	136.729.000
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	522.500.000	30.000.000	552.500.000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	772.890.000	469.269.000	1.242.159.000
13	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.763.898.700	7.885.000.000	13.648.898.700
14	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	252.030.000	150.000.000	402.030.000
15	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0	9.565.623.600	9.565.623.600
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.011.257.900	(629.549.115)	2.381.708.785

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
11	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		<b>259.616.445</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	8.010.863	28.010.863
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.825.000	(287)	8.824.713
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.825.000	(900)	8.824.100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.825.000	(1.112)	8.823.888
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.407.000	26.808.338	32.215.338
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.900.000	97.280.000	172.180.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.707.000	(3.175)	2.703.825
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiuan	540.895.600	133.351.525	674.247.125
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.275.000	(130.250)	10.144.750
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.280.000	(6.127)	16.273.873
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.977.708.664	(3.418)	1.977.705.246
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	458.937.050	(2.750)	458.934.300
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.916.500	(22.100)	363.894.400
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	457.058.000	(526.600)	456.531.400
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.516.200	(833)	52.515.367
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.200.000	(4.632.000)	116.568.000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.146.500	(21.638)	236.124.862
18	Pemeliharaan Mebel	4.750.000	(75.000)	4.675.000
19	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	45.390.000	(145.000)	45.245.000
20	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.442.128.200	(16.900)	1.442.111.300
21	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa	60.610.400	(84.950)	60.525.450
22	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	229.940.000	(537)	229.939.463
23	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	64.400.000	(2.800)	64.397.200
24	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	60.475.000	(8.750)	60.466.250
25	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	216.164.100	(212)	216.163.888
26	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	67.315.000	(157)	67.314.843
27	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	360.719.500	(550)	360.718.950
28	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	80.522.100	(148.235)	80.373.865
12	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN</b>		<b>6.485.695.000</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.100.000	142.525.000	231.625.000
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.491.000	101.712.000	207.203.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.300.000	170.400.000	229.700.000
4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	111.170.000	45.000.000	156.170.000
5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	171.979.200	1.943.808.000	2.115.787.200
6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	143.977.750	40.000.000	183.977.750
7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5.991.105.000	2.587.300.000	8.578.405.000

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
8	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	208.156.000	25.000.000	233.156.000
9	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	857.694.000	840.000.000	1.697.694.000
10	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	0	589.950.000	589.950.000
<b>13</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		<b>586.326.600</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.800.000	156.600.000	309.400.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.184.000	26.724.200	56.908.200
3	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	143.213.750	38.500.000	181.713.750
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	842.433.700	148.385.400	990.819.100
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	967.768.400	45.237.000	1.013.005.400
6	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	129.340.000	25.600.000	154.940.000
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	164.612.500	145.280.000	309.892.500
<b>14</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		<b>3.156.349.000</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.550.000	91.849.000	205.399.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	49.409.600	(3.852.525)	45.557.075
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.477.240.000	1.016.500.000	4.493.740.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.769.800	(20.746.400)	289.023.400
5	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	330.772.400	815.000.000	1.145.772.400
6	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	661.431.400	150.000.000	811.431.400
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	61.843.200	1.050.000.000	1.111.843.200
8	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	373.202.800	57.598.925	430.801.725
<b>15</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		<b>(90.277.000)</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.900.000	88.860.000	168.760.000
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi	856.604.900	(112.957.245)	743.647.655
3	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	808.168.599	(66.179.755)	741.988.844
<b>16</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		<b>1.021.249.100</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.400.000	124.888.000	232.288.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	243.894.200	639.134.700	883.028.900
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	69.235.600	257.226.400	326.462.000
<b>17</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>		<b>62.048.450</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.959.750	(191)	97.959.559
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.170.000	(210)	1.169.790

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.169.750	(207)	1.169.543
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.419.750	(232)	1.419.518
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.419.750	(232)	1.419.518
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.069.500	(72)	24.069.428
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.500.000	62.220.000	152.720.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.328.750	(232)	8.328.518
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiuan	181.089.600	(135)	181.089.465
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.984.600	(1.359)	76.983.241
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.952.500	(81)	7.952.419
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.937.500	(97.500)	12.840.000
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.127.500	(53.306)	15.074.194
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.073.700	(16.044)	186.057.656
15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	871.893.000	(11)	871.892.989
16	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	218.176.000	(71)	218.175.929
17	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	56.277.000	(230)	56.276.770
18	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	34.670.250	(147)	34.670.103
19	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	284.165.000	(156)	284.164.844
20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	438.105.000	(77)	438.104.923
21	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.024.774.500	(130)	1.024.774.370
22	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	682.242.000	(92)	682.241.908
23	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	390.450.000	(195)	390.449.805
24	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	450.000.000	(154)	449.999.846
25	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	245.130.250	(6)	245.130.244
26	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	1.122.019.750	(65)	1.122.019.685
27	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	520.762.000	(139)	520.761.861
28	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	666.937.000	(163)	666.936.837
29	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	580.215.000	(113)	580.214.887
18	<b>DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)</b>		<b>(1.109.399.397)</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	130.400.000	50.200.000	180.600.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiuan	504.622.750	27.538.400	532.161.150
3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1.542.333.350	55.076.653	1.597.410.003
4	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	450.000.000	(19.375.000)	430.625.000
5	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1.215.000.000	(544.228.000)	670.772.000

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
6	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	436.104.900	(95.494.250)	340.610.650
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	360.000.000	357.614.500	717.614.500
8	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.081.000.000	(108.000.000)	973.000.000
9	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	360.000.000	(80.095.000)	279.905.000
10	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1.455.391.000	(1.303.742.100)	151.648.900
11	Festival Kebudayaan Yogyakarta	357.480.540	(4.000.000)	353.480.540
12	Gelar Budaya Jogja	1.080.000.000	1.708.603.400	2.788.603.400
13	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	630.000.000	(95.600.000)	534.400.000
14	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	3.495.000.000	(883.598.000)	2.611.402.000
15	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	748.609.000	(150.900.000)	597.709.000
16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	900.000.000	(23.400.000)	876.600.000
19	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>		<b>374.675.000</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.400.000	91.651.000	191.051.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	172.798.300	15.985.700	188.784.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	250.195.000	91.598.300	341.793.300
4	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	210.696.600	54.000.000	264.696.600
5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.340.000	10.000.000	12.340.000
6	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	60.613.200	66.440.000	127.053.200
7	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	7.029.000	20.000.000	27.029.000
8	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	6.000.000	25.000.000	31.000.000
20	<b>DINAS PARIWISATA</b>		<b>(5.494.150.300)</b>	
1	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1.510.274.000	(310.274.000)	1.200.000.000
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.900.000	66.780.000	195.680.000
3	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	478.846.000	7.060	478.853.060
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	194.872.450	80.091.600	274.964.050
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	725.691.250	(7.060)	725.684.190
6	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.541.512.750	(5.382.617.500)	2.158.895.250
7	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	351.089.000	37.329.600	388.418.600
8	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1.308.420.500	14.540.000	1.322.960.500
21	<b>DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN</b>		<b>1.954.267.200</b>	
1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	161.570.000	(4.250)	161.565.750
2	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.485.000	(147)	21.484.853
3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.243.000.000	(175.000.000)	1.068.000.000
4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.192.000	82	60.192.082
5	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	36.496.250	(126)	36.496.124

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
6	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	70.776.000	(82)	70.775.918
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.762.000	211.875	75.973.875
8	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.582.500	(130)	2.582.370
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	223.400.000	433.020.000	656.420.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	22.295.000	(80)	22.294.920
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	283.022.300	26.723.970	309.746.270
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	(170.000)	49.830.000
13	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.265.284.750	(1.755)	2.265.282.995
14	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	389.120.400	428.109.000	817.229.400
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	221.090.500	(2)	221.090.498
16	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyalur di Kecamatan serta sarana pendukungnya	890.000.000	1.051.379.000	1.941.379.000
17	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	747.380.000	(55)	747.379.945
18	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	235.870.000	189.999.900	425.869.900
22	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>		<b>2.218.321.716</b>	
1	Pengembangan Industri Kreatif	434.329.000	(135.544.000)	298.785.000
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	261.757.684	188.649.516	450.407.200
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.634.088.468	6.194.200	2.640.282.668
4	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.700.000	20.530.000	32.230.000
5	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.964.441.000	1.792.303.000	4.756.744.000
6	Pameran Dagang Nasional	144.731.000	259.789.000	404.520.000
7	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	711.158.928	86.400.000	797.558.928
23	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		<b>10.014.343.900</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	214.300.000	310.920.000	525.220.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.018.758.800	67.500.000	1.086.258.800
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.782.200	18.036.100	78.818.300
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	481.400.000	484.400.000
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	113.855.000	124.505.000	238.360.000
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	212.095.000	210.000.000	422.095.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	193.500.000	8.580.000	202.080.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	113.497.500	100.000.000	213.497.500
9	Pengadaan Mebel	1.605.215.000	2.047.285.000	3.652.500.000
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.100.000	(128.600.000)	11.500.000
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	90.500.000	105.500.000
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.745.000	68.557.000	109.302.000
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.282.485.400	463.964.200	1.746.449.600
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.109.097.200	268.549.200	1.377.646.400
15	Pemeliharaan Mebel	35.000.000	5.000.000	40.000.000
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.950.000	(20.900.000)	173.050.000

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.595.000	(19.539.000)	222.056.000
18	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	896.264.700	80.000.000	976.264.700
19	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	214.440.000	51.712.300	266.152.300
20	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	166.105.000	40.424.870	206.529.870
21	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.578.529.000	999.060.530	3.577.589.530
22	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	95.000.000	47.724.000	142.724.000
23	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100.000.000	29.238.000	129.238.000
24	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	170.000.000	89.820.000	259.820.000
25	Penataan Administrasi Pemerintahan	974.165.000	1.972.090.500	2.946.255.500
26	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	601.581.000	60.000.000	661.581.000
27	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.459.132.400	60.867.600	1.520.000.000
28	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	247.740.000	737.707.260	985.447.260
29	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	968.660.000	(554.107.260)	414.552.740
30	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	242.370.000	224.237.000	466.607.000
31	Fasilitasi Bantuan Hukum	288.253.000	423.747.000	712.000.000
32	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	97.791.000	209.779.100	307.570.100
33	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	65.370.250	50.000.000	115.370.250
34	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	120.145.500	30.000.000	150.145.500
35	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	90.537.750	30.000.000	120.537.750
36	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	185.176.000	365.000.000	550.176.000
37	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	934.320.600	350.000.000	1.284.320.600
38	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	100.612.500	87.537.500	188.150.000
39	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	47.082.000	53.748.000	100.830.000
40	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	167.630.000	80.000.000	247.630.000
41	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Sleman	0	125.000.000	125.000.000
42	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	0	75.000.000	75.000.000
43	Implementasi Budaya Pemerintahan Sleman	0	200.000.000	200.000.000
<b>24</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		<b>16.784.371.006</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.800.000	57.110.000	153.910.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.496.428.080	259.116.000	1.755.544.080
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.080.780.000	2.089.839.738	3.170.619.738
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	248.120.000	200.000.000	448.120.000
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	971.376.000	660.000.000	1.631.376.000
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.800.000	124.758.000	276.558.000
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.041.000	935.000.000	970.041.000
8	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.617.607.136	(30.693.600)	26.586.913.536
9	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	325.760.000	(1.042.832)	324.717.168
10	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8.951.440.000	500.000.000	9.451.440.000
11	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	319.830.000	3.614.880.000	3.934.710.000

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.825.859.000	116.167.500	1.942.026.500
13	Bimbingan Teknis DPRD	3.156.271.700	(63.800)	3.156.207.900
14	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.026.290.500	73.800.000	1.100.090.500
15	Pelaksanaan Reses	6.818.562.500	8.185.500.000	15.004.062.500
25	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>285.744.323</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.382.000	(66.720.000)	10.662.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.073.400	(240)	1.073.160
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	625.000	(62)	624.938
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.625.000	(365)	1.624.635
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.294.600	(175)	1.294.425
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.215.000	(250)	8.214.750
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.760.249.598	(253.977.120)	7.506.272.478
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.800.000	129.960.000	214.760.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.470.000	(22.500)	7.447.500
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	247.308.900	79.055.895	326.364.795
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.760.000	(4.652)	11.755.348
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.376.000	288.393.200	294.769.200
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.341.000	(1.582.815)	111.758.185
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.341.000	(35.718)	34.305.282
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	(150.000)	14.850.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.740.000	4.972.000	279.712.000
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.490.900	13.419.100	31.910.000
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	433.212.800	4.070.728	437.283.528
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.614.600	5.154.600	280.769.200
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.500.000	24.250.000	95.750.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	430.637.500	29.413.836	460.051.336
22	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	31.840.000	10.487.500	42.327.500
23	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	61.245.000	26.987.420	88.232.420
24	Pelaksanaan Konsultasi Publik	35.700.000	39.999.775	75.699.775
25	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	130.400.000	31.001.125	161.401.125
26	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	560.819.000	(120.000.000)	440.819.000
27	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	512.556.000	(96.866.750)	415.689.250
28	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	47.720.000	42.599.995	90.319.995
29	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	144.050.000	138.773.008	282.823.008
30	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	193.176.750	(81.452.000)	111.724.750
31	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	199.085.000	(88.742.500)	110.342.500
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	113.320.000	(37.500)	113.282.500

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
33	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	70.330.000	(7.500)	70.322.500
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.380.000	12.599.950	24.979.950
35	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	43.000.000	(5.500)	42.994.500
36	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.310.000	(500)	7.309.500
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	47.370.000	(975)	47.369.025
38	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	131.245.000	(44.457.500)	86.787.500
39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	101.400.000	(177)	101.399.823
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.675.000	(9.625)	16.665.375
41	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahany (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	117.155.000	(19.773.575)	97.381.425
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahany	30.777.500	(750)	30.776.750
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahany	260.460.000	(4.500)	260.455.500
44	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	1.435.000	(400)	1.434.600
45	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	124.250.000	46.500.000	170.750.000
46	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	30.074.000	131.959.840	162.033.840
26	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		<b>44.117.623.798</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.167.460.492	6.000.000.000	31.167.460.492
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240.600.000	550.000.000	790.600.000
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiannya	725.076.000	280.000.000	1.005.076.000
8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	210.366.291.760	17.633.708.240	228.000.000.000
16	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.000.463.900	14.232.747.936	18.233.211.836
32	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	42.978.832.378	5.421.167.622	48.400.000.000
64	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	80.167.600	(80.167.600)	0
128	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0	449.350.000	449.350.000
256	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	449.350.000	(369.182.400)	80.167.600
27	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		<b>4.681.580.000</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.000.000	140.580.000	259.580.000

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.494.983.250	4.541.000.000	8.035.983.250
28	<b>INSPEKTORAT</b>		<b>333.156.000</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.850.000	70.385.000	132.235.000
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.480.000	42.000.000	71.480.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.000.000	(48.000)	23.952.000
4	Reviu Laporan Kinerja	7.475.500	27.000.000	34.475.500
5	Reviu Laporan Keuangan	16.112.000	31.140.000	47.252.000
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60.910.000	21.520.000	82.430.000
7	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	190.155.000	(2.921.000)	187.234.000
8	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5.750.000	30.000.000	35.750.000
9	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	162.363.000	84.080.000	246.443.000
10	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5.750.000	30.000.000	35.750.000
29	<b>KAPANEWON GAMPING</b>		<b>162.003.519</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.915.000	(77)	16.914.923
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.522.250	(37)	8.522.213
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.800.000	30.990.000	76.790.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.375.000	(80)	2.374.920
5	Pendaaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.383.200	55.116.600	95.499.800
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.598.000	(58)	5.597.942
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.112.000	(973)	7.111.027
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.618.000	(163.455)	42.454.545
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.010.000	(140)	4.009.860
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	23.971.816	23.971.816
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.480.000	(75)	3.479.925
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	55.000.000	64.000.000
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.016.350	(24.016.350)	0
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.168.000	15.107.850	105.275.850
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	6.000.000	14.000.000
16	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.225.000	(200)	15.224.800
17	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.220.000	(100)	5.219.900
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	79.620.000	(74.620.950)	4.999.050
19	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.995.000	74.620.875	79.615.875

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	102.962.000	(2)	102.961.998
21	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	75.260.000	(175)	75.259.825
22	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.690.000	(100)	4.689.900
23	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.700.000	(150)	8.699.850
24	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.290.000	(50)	3.289.950
25	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.280.000	(50)	7.279.950
26	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.681.000	(125)	8.680.875
27	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.940.000	(125)	4.939.875
28	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.390.000	(100)	30.389.900
29	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.645.000	(50)	27.644.950
30	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.189.000	(200)	7.188.800
30	<b>KAPANEWON GODEAN</b>		<b>60.937.000</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.000.000	30.540.000	76.540.000
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	111.445.200	26.697.000	138.142.200
3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	96.414.950	3.700.000	100.114.950
31	<b>KAPANEWON MOYUDAN</b>		<b>129.260.000</b>	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.800.000	27.325.000	76.125.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	22.500.000	31.500.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.225.000	60.000.000	112.225.000
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.840.000	2.250.000	39.090.000
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.060.000	1.125.000	187.185.000
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.035.000	6.960.000	109.995.000
7	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	54.366.750	9.100.000	63.466.750
32	<b>KAPANEWON MINGGIR</b>	<b>3.942.420.240</b>	<b>133.181.600</b>	<b>4.075.601.840</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.495.000	26.560.400	74.055.400
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.100.000	26.940.000	73.040.000
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiuan	16.200.000	26.560.400	42.760.400
4	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.270.000	26.560.400	40.830.400

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.815.000	26.560.400	47.375.400
33	<b>KAPANEWON SEYEGAN</b>	<b>4.016.152.249</b>	<b>45.755.000</b>	<b>4.061.907.249</b>
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000	31.555.000	76.555.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	102.550.000	7.000.000	109.550.000
3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	62.540.000	7.200.000	69.740.000
34	<b>KAPANEWON MLATI</b>	<b>4.222.153.782</b>	<b>30.030.000</b>	<b>4.252.183.782</b>
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.150.000	30.030.000	77.180.000
35	<b>KAPANEWON DEPOK</b>	<b>4.357.514.034</b>	<b>80.659.686</b>	<b>4.438.173.720</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.800.000	(27.232.838)	17.567.162
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.337.500	(12.500)	11.325.000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.825.000	35.340.000	81.165.000
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.505.800	32.818.600	72.324.400
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.821.000	(11.877)	4.809.123
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.840.000	(121.694)	38.718.306
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.158.750	(400)	5.158.350
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.402.608	(202.608)	91.200.000
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.012.200	(13.671.625)	138.340.575
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.465.700	(1.250.800)	83.214.900
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.250.000	(150.000)	34.100.000
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.707.000	(883.400)	69.823.600
13	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.075.000	(350)	12.074.650
14	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	91.485.000	44.999.900	136.484.900
15	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	132.175.000	(100)	132.174.900
16	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	135.632.000	(47)	135.631.953
17	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	87.084.000	(725)	87.083.275
18	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.835.000	(1.135)	3.833.865
19	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	83.059.500	11.049.804	94.109.304
20	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.955.000	(5.302)	5.949.698

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.710.000	(625)	8.709.375
22	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.100.000	(230)	4.099.770
23	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.950.000	(1.050)	10.948.950
24	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	40.375.000	(137)	40.374.863
25	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.905.000	(500)	3.904.500
26	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.915.000	(675)	3.914.325
<b>36</b>	<b>KAPANEWON BERBAH</b>	<b>4.060.483.695</b>	<b>68.849.058</b>	<b>4.129.332.753</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.050.000	2.414.200	34.464.200
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.700.000	30.640.000	77.340.000
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32.510.200	2.071.000	34.581.200
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.521.200	(3.103.142)	152.418.058
5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	68.000.000	(6.600.000)	61.400.000
6	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	140.500.000	(5.890.500)	134.609.500
7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84.220.000	53.042.500	137.262.500
8	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.500.000	(3.725.000)	26.775.000
<b>37</b>	<b>KAPANEWON PRAMBANAN</b>	<b>4.266.336.947</b>	<b>51.462.400</b>	<b>4.317.799.347</b>
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.800.000	29.740.000	75.540.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.517.000	3.327.200	36.844.200
3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37.390.000	3.327.200	40.717.200
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.000.000	15.068.000	70.068.000
<b>38</b>	<b>KAPANEWON KALASAN</b>	<b>4.228.162.500</b>	<b>1.082.540</b>	<b>4.229.245.040</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	262.500	540.000	802.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	262.500	960.000	1.222.500
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	262.500	356.400	618.900
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	262.500	266.625	529.125
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.800.000	30.540.000	76.340.000
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.269.700	1.956.800	31.226.500
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.386.000	5.808.000	108.194.000
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	74.900.000	26.400.000	101.300.000
9	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	123.950.000	(17.460.135)	106.489.865
10	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.505.000	(17.460.025)	71.044.975

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
11	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86.930.000	(13.680.050)	73.249.950
12	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	22.850.000	(17.145.075)	5.704.925
<b>39</b>	<b>KAPANEWON NGEMPLAK</b>	<b>4.113.087.551</b>	<b>106.359.221</b>	<b>4.219.446.772</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.927.231.772	29.376.528	2.956.608.300
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.900.000	40.530.000	86.430.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.038.229	1.163.072	45.201.301
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.218.900	32.442.000	121.660.900
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.063.600	(15.373.600)	27.690.000
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	5.042.000	20.042.000
7	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	110.177.000	10.737.375	120.914.375
8	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	93.130.000	2.441.900	95.571.900
9	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.440.000	(54)	10.439.946
<b>40</b>	<b>KAPANEWON NGAGLIK</b>	<b>4.190.046.325</b>	<b>209.726.370</b>	<b>4.399.772.695</b>
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.700.000	29.740.000	75.440.000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.500.000	(5.600)	1.494.400
3	Pengadaan Mebel	17.711.500	(1.400.000)	16.311.500
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.565.000	(35.565.000)	0
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.438.600	(30)	193.438.570
6	Pemeliharaan Mebel	0	1.400.000	1.400.000
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	35.565.000	35.565.000
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	179.992.000	189.992.000
<b>41</b>	<b>KAPANEWON SLEMAN</b>	<b>4.256.487.334</b>	<b>30.830.000</b>	<b>4.287.317.334</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.200.000	(15.437.500)	25.762.500
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.540.000	30.830.000	76.370.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.172.000	15.437.500	109.609.500
<b>42</b>	<b>KAPANEWON TEMPEL</b>	<b>3.659.787.362</b>	<b>61.713.674</b>	<b>3.721.501.036</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.395.000	(152)	25.394.848
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	740.000	(222)	739.778
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	740.000	(222)	739.778
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	814.000	(220)	813.780
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	888.000	(217)	887.783
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.062.000	(141)	11.061.859
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.400.000	28.640.000	73.040.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10.534.000	(152)	10.533.848

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	55.831.400	34.687.334	90.518.734
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.363.000	(43.000)	27.320.000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.005.000	(2.182)	53.002.818
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.782.750	(13)	7.782.737
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.650.000	(27.000)	7.623.000
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.395.000	(5)	4.394.995
15	Pengadaan Mebel	10.000.000	(100)	9.999.900
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	(17.682)	59.982.318
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	(10.000)	990.000
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	(140.000)	7.360.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.247.000	(5.000)	182.242.000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.124.000	(124.000)	52.000.000
21	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	(4.903)	2.495.097
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.100.000	(242.000)	11.858.000
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	(995.250)	24.004.750
24	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.185.000	(35)	22.184.965
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan	5.452.000	(15)	5.451.985
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	82.301.000	(157)	82.300.843
27	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	126.620.000	(100)	126.619.900
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.260.000	(172)	72.259.828
29	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	37.815.000	(245)	37.814.755
30	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	7.746.000	(20)	7.745.980
31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.575.000	(90)	55.574.910
32	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.425.000	(60)	1.424.940
33	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.439.000	(41)	3.438.959
34	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.720.000	(70)	6.719.930
35	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.420.500	(20)	17.420.480
36	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	10.114.000	(77)	10.113.923
37	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.050.000	(97)	10.049.903
43	<b>KAPANEWON TURI</b>	<b>3.995.099.133</b>	<b>39.325.000</b>	<b>4.034.424.133</b>

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.200.000	39.325.000	86.525.000
<b>44</b>	<b>KAPANEWON PAKEM</b>	<b>4.094.122.138</b>	<b>33.840.000</b>	<b>4.127.962.138</b>
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.500.000	29.940.000	75.440.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.608.000	3.900.000	106.508.000
<b>45</b>	<b>KAPANEWON CANGKRINGAN</b>	<b>4.004.556.347</b>	<b>26.710.848</b>	<b>4.031.267.195</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.825.000	(10.553.000)	19.272.000
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.300.000	37.620.000	84.920.000
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiuan	60.386.400	1.441.833	61.828.233
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.040.000	(300.385)	32.739.615
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.014.000	(1.497.100)	106.516.900
6	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	130.645.000	(500)	130.644.500
<b>46</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>8.588.594.350</b>	<b>35.426.692</b>	<b>8.624.021.042</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.395.000	(237)	62.394.763
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.659.250	(10)	1.659.240
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.659.250	(10)	1.659.240
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.010.000	(52)	2.009.948
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.010.000	(210)	2.009.790
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.313.000	(2)	9.312.998
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.100.000	73.140.000	153.240.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.750.000	(2)	4.749.998
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiuan	198.831.200	(6.258.400)	192.572.800
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.500.000	(500.000)	10.000.000
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.912.800	(14.376)	1.898.424
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.944.200	(1.545.940)	8.398.260
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.389.300	(696.030)	53.693.270
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.622.350	(145)	11.622.205
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.634.500	(196.500)	35.438.000
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.797.250	(51)	13.797.199
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.536.200	(227)	2.535.973
18	Pengadaan Mebel	10.600.000	(406.960)	10.193.040
19	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	(2.541.840)	12.458.160
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.040.000	(180.000)	28.860.000
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.310.400	(6.223)	266.304.177
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.308.000	(3.490)	194.304.510

NO.	JENIS BELANJA/PERANGKAT DAERAH/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL (Rp.)	TAMBAH (Rp.) / (KURANG) (Rp.)	RANCANGAN AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5
23	Pemeliharaan Mebel	11.000.000	(50.000)	10.950.000
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000	(300.000)	10.700.000
25	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	57.679.000	(227)	57.678.773
26	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	372.210.000	(75)	372.209.925
27	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	68.046.500	(212)	68.046.288
28	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	26.650.000	(140)	26.649.860
29	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.220.768.500	(137)	2.220.768.363
30	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	44.920.000	(2.910)	44.917.090
31	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	215.698.200	(139)	215.698.061
32	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	213.060.050	(8.708)	213.051.342
33	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	293.141.500	(40)	293.141.460
34	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	169.624.000	(25.000.015)	144.623.985

